

**DAMPAK KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA  
PEMBANGUNAN SEKTORAL APBD DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TERHADAP *OUTPUT* DAN  
KESEMPATAN KERJA SEKTORAL  
(Pendekatan Model Analisis *Input-Output*)**



**TESIS**

untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Ir. Arief Boedijanto  
C4B000183

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
Maret, 2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**TESIS**  
**DAMPAK KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA**  
**PEMBANGUNAN SEKTORAL APBD DI PROVINSI JAWA**  
**TENGAH TERHADAP *OUTPUT* DAN KESEMPATAN KERJA**  
**SEKTORAL**  
(Pendekatan Model Analisis *Input-Output*)

disusun Oleh

Arief Boedijanto  
C4B000183

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 19 Maret 2003  
dan telah lulus memenuhi syarat

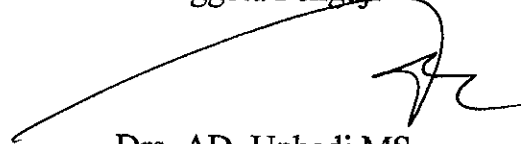
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



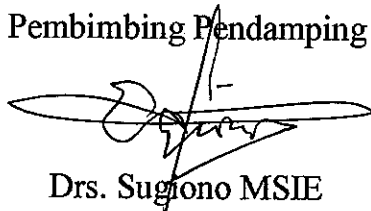
Drs. H. Wiratno MEd.

Anggota Penguji



Drs. AD. Uphadi MS

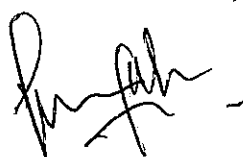
Pembimbing Pendamping



Drs. Sugiono MSIE

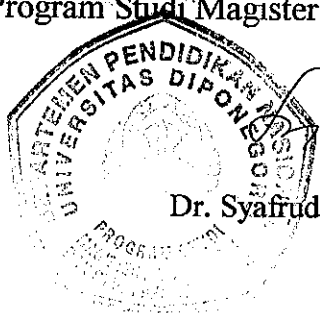


Maruto Umar Basuki SE, MSi



Firmansyah SE, MSi

Semarang,      Maret 2003  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. Syafrudin Budiningharto, SU

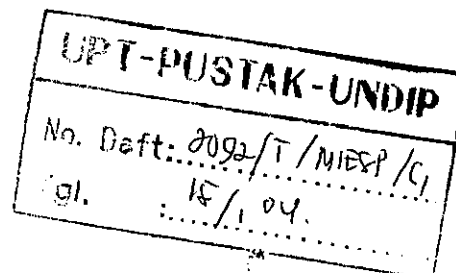
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2003

  
(Arief Boedijanto)



## ABSTRACT

This research aimed at analyzing the impact of the Central Java budget for sektor development in the 2000 fiscal year on the additional outputs and its influence to the sectoral employment opportunities. The analysis includes the regional budgets at regency levels selected within Central Java province at the same fiscal year of 2000. The other purpose of these research is to identify economics sectors that could the efforts for regional economic development; for creating working opportunity; as well as for linkages of economic inter-sectors. The data analysis is based on Central Java Input-Output Table of year 2000 that has been aggregated into 25 economic sectors.

25 out from 85 aggregated economic sectors of Central Java Input-Output Table of year 2000 is analyzed by *Leontief* inverse matrix. The analysis makes use of 3 (three) analysis approaches: *Firstly*, Final Demand Approach, consisting of (1) additional output analysis, (2) Employment Opportunity Creation analysis. *Secondly*, Multiplier Analysis, covering (1) Output Multiplier Analysis and (2) Employment Multiplier Analysis. *Finally*, Inter-sektor Linkages Analysis, comprising (1) Forward Linkages Analysis and (2) Backward Linkages Analysis.

The finding of the study suggest that (1) economic sectors that have highly forward and backward sektor linkages Food, beverage and tobacco sector, Textille, leather goods and footwear sector, Fertilizer chemical and rubber goods sektor, Base metal, iron and steel sector, and Transportation sector. Developing strategies for these sectors would be able to increase primary sectors in Central Java as their input. On the other hand, economic sector giving a high multiplier rate, both for the output and employments opportunity is Contruction sector. The increasi in development budget of this sector would have an impact on the optimal increase in outputs as well as in employment absorption. (2) Analysis to the additional total outputs suggests that the allocation of sector development expenditure in Central Java regional budget for fiscal year 2000 at regency level tended to give better additional development fund allocation to the regencies and cities in Central Java at the period of 2000 give a positive impact on the Central Java additional total outputs.

Input-Output Analysis in this study has been simulated to 2 regencies, i.e Brebes and Rembang by making use of Central Jawa Input-Output Tabel year 2000 for getting the figure of technology coefficient whereas utilizing data of the 2000 population census for providing the labor coefficient. Unfortunately, the findings were little of representative. Accordingly, in order to effectively reflect the real condition, it is needed the availability of technology and labor coefficients calculated from Input-Output Table and Population Census at regency level.

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan anggaran belanja pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan *output* dan kesempatan kerja sektoral yang ditimbulkannya, serta mencoba mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah; penciptaan kesempatan kerja; dan keterkaitan intersektoral perekonomian berdasarkan Tabel *Input-Output* (I-O) Jawa Tengah Tahun 2000 yang telah diagregasi menjadi 25 sektor ekonomi.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Leontief inverse* matrik dari Tabel I-O Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 sektor diagregasi menjadi 25 sektor ekonomi, dengan 3 (tiga) pendekatan analisis, yaitu pertama, pendekatan permintaan akhir, meliputi : (1) Analisis tambahan *output*; (2) Analisis penciptaan kesempatan kerja. Pendekatan kedua, adalah analisis pengganda yang meliputi : (1) Analisis Pengganda Keluaran/*output*, dan (2) Analisis Pengganda Kesempatan kerja. Pendekatan ketiga, adalah analisis kaitan intersektoral meliputi : (1) Analisis keterkaitan ke depan dan (2) Analisis keterkaitan ke belakang.

Hasil agregasi Tabel I-O Jawa Tengah Tahun 2000 menjadi 25 sektor ekonomi, menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keterkaitan sektoral ke depan dan ke belakang yang tinggi adalah sektor Makanan, minuman dan tembakau, sektor Tekstil, barang kulit dan alas kaki, sektor Pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor Logam dasar, besi dan baja, dan sektor Pengangkutan. Strategi pengembangan sektor-sektor ini akan mampu meningkatkan sektor-sektor primer di Jawa Tengah sebagai *input*-nya. Sedangkan sektor ekonomi yang memberikan angka pengganda yang tinggi, baik terhadap pengganda *output* maupun kesempatan kerja adalah Sektor Bangunan. Peningkatan anggaran pembangunan di sektor ini akan berdampak pada peningkatan *output* dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Hasil penelitian terhadap tambahan *output* total menunjukkan bahwa, pengalokasian anggaran pembangunan sektoral pada APBD di Jawa Tengah TA. 2000 memberikan nilai tambahan *output* total yang cenderung lebih baik dibandingkan pengalokasian pengeluaran pembangunan sektoral pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata penambahan pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2000 berdampak positif terhadap tambahan *output* total Provinsi Jawa Tengah.

Analisis *Input-Output* pada penelitian ini telah dicoba disimulasikan terhadap 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes dan Rembang, dengan masih menggunakan Tabel *Input-Output* Jawa Tengah Tahun 2000 dan data Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000 untuk mendapatkan data koefisien teknologi, dan data koefisien tenaga kerja-nya; sehingga hasil yang diperoleh belum dapat sepenuhnya representative. Untuk lebih dapat mencerminkan keadaan yang seobyektif mungkin, maka perlu adanya data-data koefisien teknologi dan koefisien tenaga kerja yang dihitung berdasarkan Tabel *Input-Output* dan Sensus Penduduk dari kabupaten yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya yang berlimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **DAMPAK KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PEMBANGUNAN SEKTORAL APBD DI PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP *OUTPUT* DAN KESEMPATAN KERJA SEKTORAL** (Pendekatan Analisis Model *Input – Output*). Penulisan tesis ini merupakan sebagian persyaratan mencapai sederajat S-2 pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih, bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak dalam rangka terselesaikannya tesis ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Syafrudin Budiningharto, SU., selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
2. Bapak Drs. H. Wiratno, MEc., selaku Pembimbing Utama;
3. Bapak Drs. Soegiono, MSIE., selaku Pembimbing Pendamping;
4. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis;

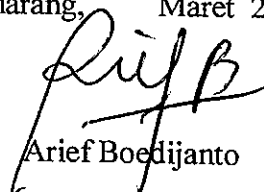
5. Bapak/ibu, saudara-saudaraku, dan teman-teman sejawat yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta do'a-nya;
6. Bapak/ibu dosen dan karyawan pada Program Pascasarjana MIESP-UNDIP Semarang, serta semua pihak yang telah turut serta membantu kelancaran studi penulis.

Secara khusus, tidak lupa pula ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada istriku Retno Widowati atas dorongan motivasi dan doa-nya, serta kepada kedua anakku Nadira Apsari dan Nydia Lalita Maredysa, yang dengan polah laku kelucuannya selalu menjadi sumber inspirasi dan penambah semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini, namun seperti pepatah bahwa *Tiada Gading Yang Tak Retak*, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Semarang, Maret 2003

  
Arief Boedijanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRACT .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS .....	10
2.1. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu .....	10
2.1.1. Tinjauan Pustaka .....	10
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	10
2.1.1.2. Pengeluaran Pemerintah .....	13
2.1.1.3. Konsep Dasar Analisis <i>Input-Output</i> ....	15
2.1.1.4. Keunggulan dan Kelemahan Analisis <i>Input-Output</i> .....	17
2.1.1.5. Faktor Produksi <i>Input-Output</i> .....	25



2.1.2. Penelitian Terdahulu .....	26
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	27
2.3. Definisi Operasional Variabel .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	38
3.1.1. Jenis Data .....	38
3.1.2. Sumber Data .....	38
3.2. Obyek Penelitian .....	39
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.4. Teknik Analisis .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Geografis .....	56
4.2. Demografi .....	57
4.3. Tenaga Kerja .....	60
4.4. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah .....	62
4.5. Pengeluaran Pembangunan Sektoral Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah .....	67
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Analisis Angka Pengganda Keluaran ( <i>Output Multiplier</i> ) dan Kesempatan Kerja ( <i>Employment Multiplier</i> ) .....	70
5.1.1. Angka Pengganda Keluaran .....	78
5.1.2. Angka Pengganda Kesempatan Kerja .....	80
5.2. Analisis Keterkaitan Intersektoral .....	81
5.3. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	88
5.3.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap <i>Output</i> Sektoral .....	88

5.3.2.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap Kesempatan Kerja Sektoral .....	90
5.4.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	92
5.4.1.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap <i>Output</i> Sektoral .....	92
5.4.2.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap Kesempatan Kerja Sektoral .....	94
5.5.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes terhadap <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	96
5.5.1.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes terhadap <i>Output</i> Sektoral .....	96
5.5.2.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes terhadap Kesempatan Kerja Sektoral .....	98
5.6.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Rembang terhadap <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	100
5.6.1.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Rembang terhadap <i>Output</i> Sektoral .....	100
5.6.2.	Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Rembang terhadap Kesempatan Kerja Sektoral .....	102
5.7.	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	103

5.7.1.	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	106
5.7.2.	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	108
5.7.3.	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral .....	109
5.7.4.	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Rembang terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja .....	109
BAB VI	PENUTUP .....	119
6.1.	Kesimpulan .....	119
6.2.	Rekomendasi Kebijakan .....	121
6.3.	Keterbatasan dan Saran .....	125
6.3.1.	Keterbatasan .....	125
6.3.2.	Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA	.....	131
LAMPIRAN	.....	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	205

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997/1998 – 2000 (ribu rp) .....	3
1.2 Prosentase Realisasi Alokasi Dana Pembangunan Sektoral APBD (Provinsi, di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Rembang) .....	7
2.1 Model <i>Input-Output</i> dalam Perencanaan .....	19
3.1 Hasil Agregasi dan Disagregasi 25 sektor menurut lapangan usaha .....	42
4.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 .....	59
4.2 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 menurut Kabupaten/kota .....	62
4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 (persen) .....	63
4.4 PDRB dan Laju Pertumbuhan Daerah Kabupaten/kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 .....	64
4.5 Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (persen) .....	67
5.1 Angka Pengganda Keluaran dan Kesempatan Kerja Sektoral ( <i>Output</i> dan <i>Employment Multiplier</i> ) .....	71
5.2 Indeks Angka Pengganda Keluaran dan Kesempatan Kerja Sektoral ( <i>Output</i> dan <i>Employment Multiplier</i> ) .....	74
5.9.1 Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2000 terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja .....	114

5.9.2	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA 2000 terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja .....	115
5.9.3	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes TA 2000 terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja ...	116
5.9.4	Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Rembang TA 2000 terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja .....	117
5.9.5	Rekapitulasi Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD TA 2000 terhadap Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja .....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Isoquant Fungsi Produksi <i>Leontief</i> .....	25
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	30
2.3 Proses Analisis .....	31
5.1 Matrik Nilai Angka Pengganda <i>Output</i> dan Angka Pengganda Kesempatan Kerja Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah .....	71
5.2 Mapping Posisi Indeks Angka Pengganda <i>Output</i> dan Angka Pengganda Kesempatan Kerja .....	73
5.3 Matrik Keterkaitan Ke Depan dan Keterkaitan Ke Belakang berdasarkan 25 sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah .....	83
5.4 Mapping Posisi Indeks Keterkaitan Ke Depan dan Ke Belakang .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel	Halaman
1    Tabel <i>I-O</i> Jawa Tengah Tahun 2000 Agregasi 25 X 25 Sektor Ekonomi .....	135
2    Koefisien <i>Input</i> .....	140
3    Invers $A_{ij}$ .....	143
4    Matriks (I-A) .....	146
5    Matriks $(I-A)^{-1}$ .....	149
6    Koefisien Keterkaitan Ke Depan Total, Langsung dan Tidak Langsung .....	152
7    Koefisien Keterkaitan Ke Belakang Total, Langsung dan Tidak Langsung .....	153
8    Koefisien Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan .....	154
9    Angka Pengganda Keluaran/ <i>Output</i> Sektoral .....	155
10   Ranking Angka Pengganda Keluaran/ <i>Output</i> Sektoral .....	156
11   Angka Pengganda dan Indeks Angka Pengganda <i>Output</i> Sektoral .....	157
12   Ranking Indeks Angka Pengganda <i>Output</i> Sektoral .....	158
13   Derajat dan Koefisien Derajat Kepekaan Sektoral .....	159
14   Ranking Derajat Kepekaan Sektoral .....	160
15   Ranking Indeks Derajat Kepekaan Sektoral .....	161
16 <i>Key Sector</i> .....	162
17   Jumlah Tenaga Kerja Sektoral atas 25 Sektor Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2000 .....	163
18   Koefisien Tenaga Kerja Sektoral .....	164

19	Matriks Diagonal Koefisien Tenaga Kerja Sektoral .....	165
20	Angka Pengganda Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Jawa Tengah 2000 .....	167
21	Angka Pengganda Sektoral Provinsi Jawa Tengah .....	169
22	Indeks Angka <i>Employment Multiplier</i> .....	170
23	Indeks Angka Pengganda <i>Output</i> dan <i>Employment</i> .....	171
24	Ranking Angka <i>Employment Multiplier</i> .....	172
25	Ranking Indeks Angka <i>Employment Multiplier</i> .....	173
26	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi dan Kab/Kota se Jateng TA. 2000 menurut Sektor dan Sub Sektor .....	174
27	Prosentase Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi dan Kab/Kota se Jateng TA. 2000 menurut Sektor dan Sub Sektor .....	180
28	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Prov. Jateng TA. 2000 hasil agregasi/disagregasi atas dasar sektor lapangan usaha .....	184
29	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Prov. Jateng TA. 2000 atas dasar sektor lapangan usaha .....	185
30	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Prov. Jateng TA. 2000 hasil agregasi/disagregasi atas dasar sektor lapangan usaha .....	186
31	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Prov. Jateng TA. 2000 atas dasar sektor lapangan usaha .....	187
32	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes dan Kabupaten Rembang TA. 2000 .....	188



33	Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi, APBD di Provinsi, APBD Kabupaten Brebes dan APBD Kabupaten Rembang TA. 2000 menurut sektor lapangan usaha .....	190
34	Prosentase Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi, APBD di Provinsi, APBD Kab. Brebes dan APBD Kabupaten Rembang TA. 2000 menurut sektor lapangan usaha .....	191
35	Prosentase Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi, APBD di Provinsi, APBD Kab. Brebes dan APBD Kabupaten Rembang TA. 2000 menurut nomenklatur sektor APBD .....	192
36	Dampak Pengeluaran Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jateng terhadap <i>Output</i> Sektoral, Struktur <i>Output</i> Sektoral, Kesempatan Kerja dan Struktur Kesempatan Kerja .....	193
37	Dampak Pengeluaran Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Brebes terhadap <i>Output</i> Sektoral, Struktur <i>Output</i> Sektoral, Kesempatan Kerja dan Struktur Kesempatan Kerja ..	194
38	Dampak Pengeluaran Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Cilacap terhadap <i>Output</i> Sektoral, Struktur <i>Output</i> Sektoral, Kesempatan Kerja dan Struktur Kesempatan Kerja .	195
39	Dampak Pengeluaran Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Wonogiri terhadap <i>Output</i> Sektoral, Struktur <i>Output</i> Sektoral, Kesempatan Kerja dan Struktur Kesempatan Kerja .....	196
40	Dampak Pengeluaran Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Rembang terhadap <i>Output</i> Sektoral, Struktur <i>Output</i> Sektoral, Kesempatan Kerja dan Struktur Kesempatan Kerja .....	197

41	Perhitungan Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral akibat Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Prov. Jateng TA. 2000 .....	198
42	Perhitungan Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral akibat Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Prov. Jateng TA. 2000 .....	199
43	Perhitungan Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral akibat Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Brebes TA. 2000 .....	200
44	Perhitungan Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral akibat Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Cilacap TA. 2000 .....	201
45	Perhitungan Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral akibat Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Wonogiri TA. 2000 .....	202
46	Perhitungan Efisiensi Kinerja <i>Output</i> dan Kesempatan Kerja Sektoral akibat Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Rembang TA. 2000 .....	203
44	Mapping <i>Forward Linkages</i> dan <i>Backward Linkages</i> .....	204

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan sosial ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan serta memperbaiki tatanan sosial masyarakat. Namun demikian pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, serta beragamnya strata penduduk mengakibatkan masalah pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat kompleks. Peliknya masalah pembangunan ini mengakibatkan program-program yang menjadi prioritas dalam pembangunan menjadi luas dan beragam. Disamping itu permasalahan lain yang juga menjadi hambatan adalah kurangnya peran serta dan dukungan aktif dari masyarakat ataupun pihak swasta. Masyarakat masih belum merasa memiliki akan hasil-hasil pembangunan selama ini, sehingga pemeliharaan pasca proyek sering terabaikan. Sedangkan peran swasta dalam pembangunan daerah ini masih sangat berorientasi kepada bisnis semata, belum banyak yang membantu di bidang sosial. Kondisi semacam ini mengakibatkan beban pemerintah daerah semakin berat dalam rangka membangun sarana dan prasarana perekonomian, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu prioritas pembangunan terutama dalam pembangunan sektoral.

Prioritas pembangunan seperti tertuang dalam Propenas 1999-2004 adalah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan pembangunan

daerah sesuai dengan GBHN 1999-2004, secara garis besar adalah mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; sehingga tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan, antara lain memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif dan efisien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dapat tercapai.

Perwujudan kinerja pelayanan pemerintah dalam perekonomian salah satunya adalah dapat dicerminkan dari pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedang dalam skala regional tercermin dari pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efek perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan *output* atau pendapatan nasional terjadi melalui *government expenditure multiplier* (Tambunan, 1996 : 90). Keynes yang dikutip oleh Suryana (2000 : 102), menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam mempengaruhi jalannya perekonomian adalah lewat manipulasi permintaan agregat. Dalam keadaan kelesuan perekonomian (resesi) pemerintah dapat memperbesar pengeluaran pemerintah/ *government expenditure* (G), sehingga lapangan kerja akan semakin meluas. Sedangkan dalam keadaan inflasi, pemerintah dapat menurunkan pengeluarannya sehingga permintaan agregat akan menurun.

Khusus untuk provinsi Jawa Tengah, perkembangan pengeluaran anggaran Provinsi Jawa Tengah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran

pembangunan ternyata senantiasa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 1997/1998 – 2000 (ribu rupiah)

Tahun	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan	Jumlah
1997/1998	8.328.980	239.742.436	248.071.416
1998/1999	12.997.392	151.726.199	164.723.591
1999/2000	15.099.004	230.040.909	245.133.913
2000	16.460.956	322.429.983	338.890.939

*Sumber : Biro Keuangan Seida Prov. Jateng dan Bappeda Prov. Jateng.*

Sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan, terlihat pada Tabel 1.1. di atas bahwa selama kurun waktu 1997/1998 – 2000 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (pengeluaran rutin dan pembangunan) menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan, kecuali pada Tahun Anggaran 1998/1999 mengalami penurunan disebabkan terjadinya permulaan krisis ekonomi.

Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ruang lingkup pemerintah daerah dalam menggali penerimaan keuangan daerah semakin sempit. Undang-Undang ini menyebutkan hanya terdapat 4 jenis pajak provinsi dan 6 pajak kabupaten/kota. Jumlah retribusi yang dipungutpun semakin berkurang, bahwa

sebelum Undang-Undang No 18 Tahun 1997 terdapat 24 jenis retribusi, kemudian berkurang hanya menjadi 7 jenis retribusi.

Demikian pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana yang diterima Provinsi mengalami perubahan pada beberapa pos. Beberapa Pos Bagi Hasil yang mengalami penurunan antara lain : Iuran Hasil Hutan (IHH) yang semula 30 % menjadi 16 %, Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH) yang semula 70 % menjadi 16 %, Agraria yang semula 40 % menjadi 0 %.

Konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, yang pada gilirannya akan mengurangi pula ketersediaan anggaran belanja pembangunan seperti tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain kebutuhan untuk pembiayaan/belanja pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga sangat perlu adanya kebijakan perencanaan pembangunan dalam pengalokasian dana tersebut untuk hal-hal yang lebih penting, terarah, cermat, efisien dan lebih bermanfaat. Pertimbangan dalam kebijakan perencanaan alokasi dana/anggaran sektoral tersebut perlu ditinjau dari segi perubahan *output* sektoral dan kesempatan tenaga kerja, serta kemampuannya terhadap efek pengganda dari aktivitas ekonomi (*multiplier effect*). Atau dapat dikatakan bahwa kebijakan perencanaan pengalokasian anggaran sektoral hendaknya bertitik tolak kepada penentuan sektor-sektor kunci (*key sector*). Menurut Sritua Arief (1993: 219), disebutkan bahwa terdapat empat metode dalam rangka penentuan sektor kunci, yaitu : (1) suatu sektor

dianggap sebagai sektor kunci apabila mempunyai kaitan ke belakang (*backward linkage*) dan kaitan ke depan (*forward linkage*) yang relatif tinggi, (2) suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila menghasilkan *output* bruto yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan *final demand* yang relatif tinggi pula, (3) suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi, dan (4) suatu sektor dianggap sektor kunci apabila mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif tinggi. Dalam konteks penelitian ini, penentuan sektor kunci didasarkan kepada metode nomor (1) dan (4), yaitu suatu sektor dikatakan menjadi sektor kunci/sektor unggulan apabila mempunyai kaitan ke belakang dan kaitan ke depan yang relatif tinggi, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif tinggi.

Untuk dapat meneliti keterkaitan antar sektor dalam suatu ekonomi atau kontribusi berbagai sektor dalam keseluruhan ekonomi dalam berbagai tujuan pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu model perencanaan pembangunan yang sesuai. Mudrajat Kuncoro (2001: 239 – 241), menyebutkan bahwa salah satu model perencanaan pembangunan yang dapat memberikan dasar bagi analisis yang rinci dari hubungan antar sektor pembangunan adalah melalui model analisis *Input – Output*.

Model analisis *Input – Output* (I-O) mempunyai kapasitas untuk menghitung dampak dari permintaan akhir terhadap kesempatan tenaga kerja dan efek pengganda (*multiplier effect*). Sebagai suatu model kuantitatif, tabel I-O akan memberikan gambaran transaksi barang dan jasa dari kegiatan-kegiatan

perekonomian untuk saling mengkaitkan aktivitas suatu sektor dengan sektor lainnya dalam suatu waktu dari sistem unit perekonomian tertentu (Miller dan Blair, 1985: 1-31). Salah satu kegunaan analitisnya yang sering dijumpai dalam praktek adalah sebagai alat peramal mengenai pengaruh suatu perubahan situasi ekonomi atau suatu kebijaksanaan ekonomi (Boediono, 1999: 52).

### **1.2. Perumusan Masalah**

Kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan sektoral seperti yang tertuang pada APBD di Provinsi Jawa Tengah selama ini secara obyektif dapat dikatakan belum berdasarkan kepada perhitungan secara terukur. Hal ini terlihat belum adanya acuan khusus yang dapat dijadikan referensi dalam kebijakan perencanaan alokasi anggaran pembangunan sektoral selama ini, sehingga dampak dari kebijakan pengalokasian anggaran terhadap *output* sektoral, dan penyerapan tenaga kerja sektoral diduga belum dapat sepenuhnya optimal dalam rangka pencapaian terhadap tujuan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Pada Tabel 1.2 tentang Prosentase Realisasi Alokasi Dana Pembangunan Sektoral APBD Provinsi, di Provinsi Jawa Tengah dan di Dua Kabupaten pada Tahun Anggaran 2000, memperlihatkan prosentase yang bervariasi pada masing-masing sektor pembangunan.



Tabel 1.2  
 Prosentase Realisasi Alokasi Dana Pembangunan Sektoral APBD Provinsi, di  
 Provinsi (Provinsi dan Kab/Kota se Jateng) dan di Dua Kabupaten  
 (Brebes dan Rembang) TA. 2000

NO	NAMA SEKTOR	REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN (dlm. persen)			
		PROVINSI	DI PROVINSI	BREBES	REMBANG
1	INDUSTRI	1.24	0.74	0.96	1.36
2	PERTANIAN DAN KEHUTANAN	10.28	5.72	4.75	4.68
3	SUMBER DAYA AIR DAN IRI GASI	13.65	4.98	0.50	0.17
4	SEKTOR TENAGA KERJA	1.24	0.57	0.52	0.70
5	PERDAG., PENGEMB. USH DAERAH, KEUDRH DAN KOPERASI	9.28	6.75	16.95	4.72
6	TRANSPORTASI	14.49	23.52	20.86	15.16
7	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0.39	0.95	2.38	0.03
8	PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	0.87	0.99	1.59	0.53
9	PEMB. DAERAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI	0.56	6.16	1.19	6.38
10	LH DAN TATA RUANG	1.29	4.27	1.46	7.30
11	PENDD., KEBUDAYAAN NAS., KEPERCAYAAN THD TUHAN YME, PEMUDA DAN OR	12.57	10.62	13.12	9.50
12	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	0.14	0.51	0.09	0.06
13	KESEHATAN, KESEJ. SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	23.57	11.10	3.72	4.78
14	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.01	7.46	0.30	6.48
15	AGAMA	0.64	1.48	2.27	2.31
16	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	0.18	1.33	0.99	0.60
17	HUKUM	0.29	0.38	0.55	0.52
18	APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN	6.65	11.22	25.66	33.56
19	POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	1.44	0.83	1.68	0.85
20	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	0.21	0.43	0.45	0.31
TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00

*Sumber : Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota se Jateng, Bappeda Kab. Brebes dan Rembang, 2002.*

Prosentase realisasi alokasi dana pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) pada tahun anggaran 2000 juga menunjukkan nilai prosentase yang bervariasi (data secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 27). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan alokasi dana anggaran yang tercermin pada “*break down*” dana anggaran pembangunan untuk sektor-sektor pembangunan APBD di Jawa Tengah diduga masih mengalami ketidak konsistenan, baik diantara

Kabupaten/Kota maupun dengan kebijakan pengalokasian anggaran sektoral Provinsi Jawa Tengah.

Berdasar data pada Tabel 1.2, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah bervariasinya prosentase alokasi dana/anggaran sektor pembangunan pada APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000, yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap pencapaian tambahan *output* dan kesempatan kerja sektoral yang belum optimal. Oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam tentang dampak kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan sektoral pada APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap tambahan *output* dan kesempatan kerja sektoral, khususnya pada tahun anggaran 2000.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menghitung prosentase alokasi anggaran APBD sektoral Provinsi dan prosentase alokasi APBD sektoral di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 hasil perhitungan *input-output*;
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (sektor kunci/sektor unggulan/*key sector*) sebagai sektor basis dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menghitung efisiensi dan menganalisis dampak tambahan *output* sektoral yang dihasilkan sebagai akibat belanja pembangunan sektoral pada APBD di Provinsi untuk tahun anggaran 2000;

4. Menghitung efisiensi dan menganalisis dampak tambahan kesempatan kerja sektoral yang dihasilkan sebagai akibat belanja pembangunan sektoral pada APBD di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2000;

### **1.3.2. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi aparat perencana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penentuan prioritas alokasi dana/anggaran pembangunan sektoral.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penelitian lainnya.
3. Bagi perkembangan ilmu, dari aspek pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis sebelumnya, terutama dalam model perencanaan pembangunan dengan menggunakan analisis *Input-Output*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA**

#### **PEMIKIRAN TEORITIS**

### **2.1. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu**

#### **2.1.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Sadono Sukirno (2000: 13), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Sedangkan menurut Boediono (1999: 1-2), dinyatakan bahwa kebijakan makro ekonomi secara garis besar mencakup dua permasalahan pokok, yaitu : (1) masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi dimana masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, agar terhindar dari tiga penyakit makro utama (inflasi, pengangguran dan ketimpangan dalam neraca pembayaran), (2) masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, dimana masalah ini adalah mengenai bagaimana kita menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi dan tersedianya dana untuk investasi.

Sedangkan Suseno Triyanto, W (1990: 35-36), berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama

Pelita atau periode tertentu (dekade), tetapi dapat pula secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah dapat diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik /Regional Bruto (PDB/PDRB) dari tahun ke tahun.

Soelistyo, dkk. (1981) yang dikutip oleh Hari Kuncoro dan Sri Suharsih (2001: 108-111) menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantab (*steady growth*) dengan hasil yang jelas dirasakan oleh seluruh lapisan dan bukannya segolongan elite masyarakat saja, merupakan dua hal yang amat dikehendaki walaupun secara operasional sulit dilakukan. Perdebatan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan masalah klasik yang belum terpecahkan hingga sekarang. Pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi sering membawa akibat tidakmeratanya distribusi pendapatan. Sebaliknya, upaya pemerataan distribusi pendapatan membawa konsekuensi penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di samping harus mengubah struktur produksi nasional yang lebih baik, harus berhasil pula mengubah distribusi pendapatan nasional menjadi semakin merata.

Terdapat tiga cara untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDB/PDRB (Sadono Sukirno, 2000: 31-33), yaitu :

- (1) cara perbelanjaan, yaitu dilakukan dengan cara menghitung dan menaksir nilai aliran perbelanjaan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, penanam modal, pemerintah dan sektor luar negeri;
- (2) cara pendapatan, yaitu menghitung dan menaksir nilai aliran pendapatan faktor faktor produksi dan
- (3) cara produksi atau nilai tambah, yaitu dengan menghitung dan menaksir nilai

tambah — yaitu pertambahan nilai uang dari sesuatu barang — yang diwujudkan oleh setiap perusahaan dalam perekonomian.

Sesuai pula dengan pendapat Parkin dan Bade (1992:43) bahwa perhitungan besarnya PDB (yang analog juga dengan PDRB) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (*production approach*); pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Perubahan masing — masing komponen dalam setiap model pendekatan akan mempengaruhi besarnya nilai PDRB. Besarnya perubahan PDRB yang diakibatkan oleh adanya perubahan masing-masing komponen dapat dihitung dengan menggunakan efek pengganda (*multiplier effect*).

Besarnya tambahan PDRB sebagai akibat pengeluaran agregat dalam sistem perekonomian terbuka merupakan penjumlahan dari pengeluaran yang dilakukan oleh sektor masyarakat, sektor perusahaan, sektor pemerintah serta sektor perdagangan luar negeri, yang dapat diformulasikan sebagai suatu identitas pendapatan nasional/regional :

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (1)$$

di mana :

Y = Pendapatan nasional/regional atau *output* ;

C = Konsumsi Masyarakat;

I = Investasi;

G = Pengeluaran Pemerintah;

X = Ekspor; dan

M = Impor

#### 2.1.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000: 85), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional (Provinsi/Kabupaten/Kota). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Faried Wijaya Mansoer, 1999 : 122).

Sesuai dengan Keynes yang dikutip oleh Sadono Sukirno (2000: 121) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah ini masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasaran bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan terjadi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Guritno, M (2000: 1-2), menyatakan bahwa peranan pemerintah adalah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara agregatif, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Dampak kebijakan fiskal oleh tindakan pemerintah ternyata menunjukkan perbedaan pendapat diantara berbagai mazhab-mahzab makroekonomi (Sadono Sukirno, 2000: 182-188), yaitu (1) pandangan golongan klasik, (2) kebijakan dalam kasus perangkap likuiditas, (3) pandangan golongan Keynesian dan (4) pandangan golongan Monetaris. Namun dengan mempertimbangkan keadaan negara Republik Indonesia saat ini yang sedang dilanda resesi dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi maka kebijakan fiskal adalah paling efektif saat ini dan ini sesuai dengan pandangan Keynesian.

Menurut Suseno Triyanto, W (1990: 75) bahwa kebijakan fiskal melalui pengeluaran anggaran pemerintah (G) ini dapat diketahui melalui APBN untuk perekonomian nasional atau APBD untuk perekonomian regional (Provinsi atau Kabupaten) pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut serta menggerakkan roda pembangunan yang berarti pula ikut mempengaruhi laju pertumbuhan PDB/PDRB dalam perekonomian nasional/regional.

Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat dan melalui peningkatan permintaan agregat ini, produksi atau *output* akan meningkat. Besarnya pengaruh tambahan pengeluaran pemerintah terhadap *output* dan penciptaan kesempatan kerja dapat dihitung dengan pendekatan analisis *input – output* (Boediono 1997 : 115).



Pengeluaran pemerintah (G) pada umumnya dialokasikan dalam dua pos pengeluaran, yaitu pos pengeluaran rutin dan pos pengeluaran pembangunan.

#### **2.1.1.3. Konsep Dasar Analisis *Input – Output* (I – O)**

Para ekonom dan perencana pembangunan biasanya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam merumuskan target-target pertumbuhan sektoral (Mudrajad Kuncoro, 2001: 239-241). Namun untuk merumuskan suatu rencana pembangunan yang menyeluruh dan konsisten antar sektor yang satu dengan sektor yang lain, agaknya penggunaan PDB atau PDRB saja terbukti masih kurang memadai, hal ini diakibatkan karena data PDB dan PDRB tidak memperhatikan interaksi antar sektor secara eksplisit.

Untuk menganalisis interaksi antar sektor pembangunan secara eksplisit digunakan suatu model perencanaan pembangunan yang sesuai, salah satunya adalah melalui pendekatan analisis *Input – Output*. Model perencanaan pembangunan model *I-O* ini terbukti dapat memberikan dasar bagi analisis yang rinci dari hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian (Mudrajad Kuncoro, 2001: 241).

Lincoln Arsyad (1999: 217) menyatakan bahwa analisis *input-output* terdiri dari 2 bagian, yaitu (1) penyusunan tabel *I-O* dan (2) penggunaan *I-O*. Tabel *I-O* pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matrik yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu (BPS, 1999). Tabel *I-O* juga merupakan suatu tabel transaksi

yang merekam data mengenai hasil produksi berbagai sektor ekonomi dan penggunaannya oleh sektor-sektor yang lain baik sebagai input antara (*intermediate inputs*) dan juga sebagai permintaan akhir (*final demand*) di suatu wilayah dan pada suatu waktu tertentu (Bachrawi Sanusi, 2000: 56). Jadi tabel *I-O* ini mengacu kepada perekonomian secara keseluruhan dalam tahun tertentu (Lincoln Arsyad, 1999: 217)

Analisis *input-output* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 oleh Prof. Wassily W Leontief dari Harvard University. Teknik ini digunakan untuk menelaah hubungan antar industri dalam rangka memahami saling ketergantungan dan kompleksitas perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan (Miller dan Blair, 1985).

Analisis *Input-Output* bertitik tolak dari asumsi bahwa struktur perekonomian adalah saling berhubungan antara satu unit dengan unit ekonomi lainnya secara simultan. Masing-masing unit ekonomi dapat dipandang sebagai produsen *output* sekaligus sebagai konsumen *input* dari unitnya sendiri dan dari unit ekonomi lainnya. Oleh karenanya, pantulan kebutuhan produk dari satu unit ekonomi atau lebih terhadap *output* yang dihasilkannya akan merebak dan mempengaruhi seluruh jaringan perekonomian secara luas (West, 1992: Todaro, 1977 dikutip oleh Haryo Kuncoro dan Sri Suharsih, 2001: 114).

#### 2.1.1.4. Keunggulan dan Kelemahan Analisis *Input – Output*

**Keunggulan.** Analisis Tabel *Input-Output* sering disebut sebagai analisis keterkaitan antar industri dikarenakan manfaat mendasar dari *Input-Output* adalah menganalisis ketergantungan antar industri dalam suatu perekonomian (Mudrajad Kuncoro, 2001: 241). Analisis *Input-Output* ini juga sangat bermanfaat sebagai alat dalam simulasi dan peramalan (*forecasting*) dalam bidang ekonomi (Miera, 2000: 1), dimana disebutkan bahwa : “*Leontif’s open models by establishing the relationship between the different magnitudes in the economic system, allow estimating the effects of variation in certain variables on the other*”.

Wolff (1994), menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan *prediksi input-output* adalah terletak pada matriks *inverse* Leontief, dimana kerangka kerja model ini memiliki keistimewaan untuk mengukur dan menganalisis produktivitas pertumbuhan ekonomi. Dalam notasi matriks, *inverse* matriks Leontief yang diperoleh dari Tabel *Input-output* dirumuskan sebagai  $[I - A]^{-1}$ , dimana (I) adalah matriks identitas dan (A) adalah matriks koefisien *input* atau matriks koefisien teknologi (Miller dan Blair, 1985).

Sedangkan Mudrajad Kuncoro (2001: 239), menyebutkan bahwa daya tarik utama analisis *Input-Output* adalah kemampuannya dalam menyajikan gambaran secara rinci mengenai struktur ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu. Struktur ekonomi tersebut dapat mencakup suatu negara, daerah, metropolitan, maupun antar daerah.

Selain itu pula kelebihan model *Input-Output* memegang peran penting dalam rangka mengantarkan data-data pokok yang tercantum dalam Tabel *Input-Output* tersebut dalam pembelajaran pembangunan yang berkelanjutan, yang oleh Stahmer (2000: 2) disebutkan bahwa Tabel *Input-Output* bukan saja berperan penting dalam analisis ekonomi, namun berperan penting terhadap studi-studi tentang ekologi/lingkungan dan sosial.

Supranto (1981: 172) menyatakan bahwa dengan membaca Tabel *Input-Output* pada tahun tertentu kita dapat mengetahui struktur perekonomian pada tahun tersebut serta dapat menghitung daya penyebaran dan derajat kepekaan bagi setiap sektor. Dan apabila permintaan akhir setiap sektor sudah diketahui, Tabel *Input-Output* dapat dipergunakan untuk (1) meramalkan *output* setiap sektor, (2) meramalkan impor setiap sektor, (3) meramalkan nilai tambah setiap sektor, (4) meramalkan jumlah tenaga kerja setiap sektor

Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro (2001: 239), manfaat Tabel *I-O* adalah (1) memberikan gambaran lengkap mengenai aliran barang, jasa, dan input antar sektor; (2) dapat digunakan sebagai alat peramal mengenai pengaruh suatu perubahan situasi ekonomi atau kebijakan ekonomi.

Aplikasi Analisis *Input-Output* Regional (Hewings, 1985: 37 – 38) adalah dapat digunakan untuk simulasi kebijakan, peramalan tenaga kerja, *output* dan *income* sektoral serta sebagai komponen pada model pasar saham. Simulasi kebijakan yang dimaksudkan adalah berupa pengeluaran pemerintah (*government expenditures*) dan dalam konteks penelitian ini adalah berupa pengeluaran pembangunan sektoral pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan analisis *Input-Output* dalam perencanaan dapat dijelaskan pada Tabel 2.1.

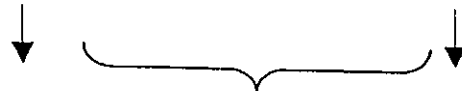
Tabel 2.1  
Analisis *Input-Output* dalam Perencanaan

Sektor	1	2	...	j	...	n	F	X
1	$X_{11}$	$X_{12}$	...	$X_{1j}$	...	$X_{1n}$	$F_1$	$X_1$
2	$X_{21}$	$X_{22}$	...	$X_{2j}$	...	$X_{2n}$	$F_2$	$X_2$
.	.	.		.		.	.	.
.	.	.		.		.	.	.
.	.	.		.		.	.	.
i	$X_{i1}$	$X_{i2}$	...	$X_{ij}$	...	$X_{in}$	$F_i$	$X_i$
.	.	.		.		.	.	.
.	.	.		.		.	.	.
.	.	.		.		.	.	.
n	$X_{n1}$	$X_{n2}$	...	$X_{nj}$	...	$X_{nn}$	$F_n$	$X_n$

$X_{ij}$  = *output* sektor i dipergunakan sebagai *input* sektor j, untuk memproduksi  $X_j$  satuan.

Dari matriks di atas berlaku hubungan berikut :

$$X_i = x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{ij} + \dots + x_{in} + F_i, \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, n$$



Output sektor i    permintaan antara    permintaan akhir

Apabila  $a_{ij}$  = banyaknya *output* sektor  $i$  yang dipergunakan untuk

memproduksi 1 satuan *output* sektor  $j$ , maka :

$a_{ij} = x_{ij}/X_j \rightarrow x_{ij} = a_{ij}X_j$  dan matriks di atas menjadi :

Sektor	1	2	...	j	...	n	F	X
1	$a_{11}X_1$	$a_{12}X_2$	...	$a_{1j}X_j$	...	$a_{1n}X_n$	$F_1$	$X_1$
2	$a_{21}X_1$	$a_{22}X_2$	...	$a_{2j}X_j$	...	$a_{2n}X_n$	$F_2$	$X_2$
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
i	$a_{i1}X_1$	$a_{i2}X_2$	...	$a_{ij}X_j$	...	$a_{in}X_n$	$F_i$	$X_i$
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
n	$a_{n1}X_1$	$a_{n2}X_2$	...	$a_{nj}X_j$	...	$a_{nn}X_n$	$F_n$	$X_n$

Maka berlaku hubungan sebagai berikut :

$$X_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \dots + a_{ij}X_j + \dots + a_{in}X_n + F_i \quad (2)$$

dan secara keseluruhan, untuk  $i = 1, 2, \dots, n$ ,

$$X_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1j}X_j + \dots + a_{1n}X_n + F_1$$

$$X_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2j}X_j + \dots + a_{2n}X_n + F_2$$

$$\begin{matrix} . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \end{matrix}$$

$$X_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \dots + a_{ij}X_j + \dots + a_{in}X_n + F_i$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot & \cdot \\
 X_n = a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nj}X_j + \dots + a_{nn}X_n + F_n
 \end{array}$$

dan dinyatakan dalam persamaan matriks :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ X_i \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ X_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot & & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ X_i \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ X_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} + \underbrace{\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_i \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{F}}$$

$$\text{Atau } \mathbf{X} = \mathbf{AX} + \mathbf{F} \quad (3)$$

dimana :

$\mathbf{A}$  = matriks koefisien *input* atau sering disebut juga dengan Koefisien teknologi, oleh karena elemen-elemennya menunjukkan besarnya *input* yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit *output* dari sektor tertentu, dan nilai-nilai ini besar kecilnya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.

$$X = AX + F \rightarrow X - AX = F$$

$$(I - A)X = F$$

$$X = [I - A]^{-1} \quad (4)$$

dimana :  $I$  = identify matrix

Matriks  $[I - A]^{-1}$  dikenal dengan nama matriks kebalikan Leontief (Lincoln Arsyad, 1999: 222; Miller and Blair, 1985: 14; Suahasil Nazara, 1997: 15). Elemen matriks ini dinotasikan dengan  $\alpha_{ij}$  yang mencerminkan efek langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap *output* sektor-sektor didalam perekonomian. Permintaan akhir merupakan variabel eksogen. Salah satu komponennya adalah pengeluaran pemerintah yang besarnya sepenuhnya diatur oleh pemerintah itu sendiri. Sementara komponen-komponen lainnya dari permintaan akhir adalah variabel-variabel yang besarnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Dalam konteks ini, permintaan akhir dapat menjadi kebijakan pemerintah.

Dalam suatu analisis *I - O* yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan Tabel *I-O* harus memenuhi tiga asumsi dasar (BPS, 1999: 14), yaitu :

1. *Asumsi homogenitas* yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi suatu *output* tunggal dengan struktur *input* tunggal dan bahwa tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sector.
2. *Asumsi proporsionalitas* yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi, hubungan antara *input* dengan *output* merupakan fungsi linier yaitu tiap jenis



*input* diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan *output* sektor tersebut.

3. *Asumsi aditivitas*, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total pelaksanaan produksi diberbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Ini berarti bahwa diluar sistem *input output* semua pengaruh dari luar diabaikan.

Berkaitan dengan asumsi-asumsi di atas, oleh Hary Kuncoro dan Sri Suharsih (2001: 114-115) disebutkan bahwa model dasar *Input-Output* yang dihasilkan oleh satu unit ekonomi tertentu akan sama dengan penjumlahan antara input antara (*intermediate input*) dengan permintaan akhir (*final demand*). Hal ini berlaku pula untuk unit-unit ekonomi yang lain dari unit 1 sampai ke unit ekonomi *n*. Pengertian tersebut di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa kuantitas produksi (penawaran) adalah sama dengan penjumlahan permintaan akhirnya, hal demikian menyiratkan adanya keadaan keseimbangan umum (*general equilibrium*).

**Kelemahan.** Analisis *input-output* disamping mempunyai banyak keunggulan, namun tetap mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan analisis model *input-output* dibandingkan dengan analisis model lainnya (Anonimus, 2000: 3) adalah antara lain :

1. Analisis *Input-Output* sebagai model kuantitatif masih tetap memiliki keterbatasan, yaitu bahwa koefisien *input* atau koefisien teknis diasumsikan tetap (konstan) selama periode analisis atau proyeksi. Karena

- koefisien dianggap konstan, maka teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksinyapun dianggap konstan, akibatnya perubahan kuantitas dan harga *input* akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga *input*,
2. Analisis *Input-Output* tidak mampu menjelaskan masalah distribusi pendapatan dalam suatu perekonomian. Hal tersebut disebabkan dalam model *input-output* tidak terdapat elemen yang dapat mencerminkan distribusi pendapatan,
  3. Analisis *Input-Output* tidak mampu menjawab bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling mungkin, dimana pilihan tersebut dihadapkan pada sumber daya tertentu. Analisis *input-output* hanya mampu menjawab pertanyaan mengenai apakah daerah mempunyai sumber daya yang mencakup untuk mencapai target yang ingin dicapai.

Walaupun analisis *input-output* sebagai suatu model perencanaan pembangunan mempunyai beberapa kelemahan, namun dengan bertitik tolak dengan konteks tujuan penelitian dan ketersediaan data relatif masih baru, yaitu Tabel *Input-Output* Jawa Tengah Tahun 2000 dan data Hasil Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000, maka analisis *input-ouput* dalam penelitian diharapkan ini masih tetap relevan untuk dapat dipergunakan dalam model perencanaan pembangunan dalam jangka menengah. Hal ini sesuai dengan Boediono (1981: 52), bahwa kegunaan analitis yang sangat penting dari analisis *input-output* yang sering dijumpai dalam praktek adalah sebagai alat peramal

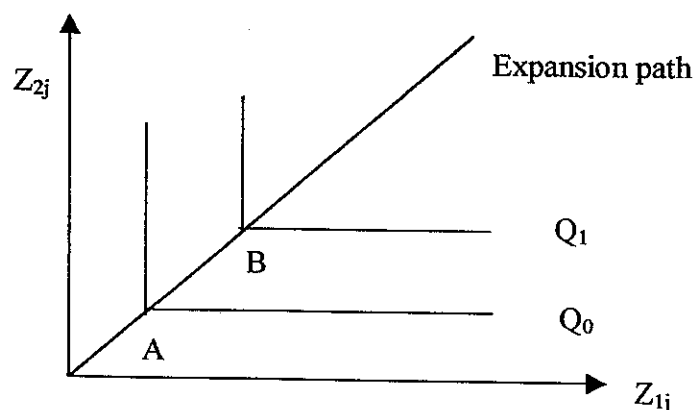
mengenai pengaruh suatu perubahan situasi ekonomi atau kebijaksanaan ekonomi.

#### 2.1.1.5. Fungsi Produksi *Input-Output*

Fungsi produksi di dalam analisis *Input-Output* adalah mengikuti apa yang disebut dengan fungsi produksi Leontief yang bersifat *Constant return to scale* (Suahazil Nazara, 1997 : 11-13; Miller and Blair, 1985 : 11-13), artinya bila seluruh *input* produksi dilipatkan  $\lambda$ -kali, maka *output* juga akan berlipat sebesar  $\lambda$ -kali. Hal ini berlaku untuk setiap sektor di dalam perekonomian.

Fungsi produksi Leontief menyatakan (Suahazil Nazara, 1997: 12 dan Miller and Blair, 1985: 12) bahwa proses produksi yang optimal di sepanjang *expansion path*-nya dilakukan dengan proporsi *input* yang konstan. Di sepanjang isoquant dari suatu proses produksi, hanya ada satu titik optimal produksi. Bentuk isoquant-nya ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.  
Isoquant Fungsi Produksi Leontief



### 2.1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *input – output* untuk perencanaan dan analisis perilaku ekonomi, di antaranya :

1. Jalili (2000) meneliti tentang faktor-faktor eksogen dan penyempurnaan tabel *input -output* di Uni Soviet. Dengan menggunakan metode RAS dan teknik La grangian, tabel *input - output* tahun 1966 disempurnakan untuk tahun 1972. Selanjutnya dengan menggunakan koefisien 1972 sebesar 10 % sebagai faktor eksogen menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan substantial dalam perubahan koefisien untuk perencanaan ke depan.
2. Shisido dkk (2000) membandingkan koefisien Leontief *input -output* dan pola pertumbuhan struktural di beberapa negara dengan menggunakan sebanyak 45 tabel *Input –Output*, didapatkan pola standar pada perubahan koefisien *input -output* dalam perkembangan ekonomi, yakni bentuk U pada rasio rata-rata nilai tambah dan U terbalik pada rasio rata-rata *input* antara.
4. Agus Hasto Y (2001) meneliti Dampak Alokasi Belanja Pembangunan APBD I Jawa Tengah TA. 1994/1995 – 1999/2000 terhadap *output* sektoral dengan menggunakan Tabel I-O Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993 memberikan hasil bahwa sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan *output* akibat pengeluaran pembangunan di Jawa Tengah adalah sektor pengangkutan, pemerintahan umum, jasa umum dan tanaman bahan makanan; sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga

kerja adalah sektor jasa umum, pemerintahan umum, tanaman bahan makanan dan pengangkutan.

5. Dwiyama Satyani D (2001) meneliti Aplikasi model *Input-Output* Regional Tunggal dalam perencanaan pembangunan daerah : Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah dengan pendekatan RAS; memberikan hasil bahwa koefisien input di perekonomian Jawa Tengah dari tahun 1993 hingga tahun 1999 telah mengalami perubahan rata-rata sebesar 2,05 persen.

Penelitian mengenai dampak kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan *output* dan kesempatan kerja sektoral berdasarkan Tabel *Input-Output* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 belum pernah diteliti.

## 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada umumnya tujuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu peranan pemerintah daerah dicerminkan dari pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh hal ini akan memperbesar permintaan agregat dan melalui peningkatan permintaan agregat ini produksi atau *output* akan meningkat.

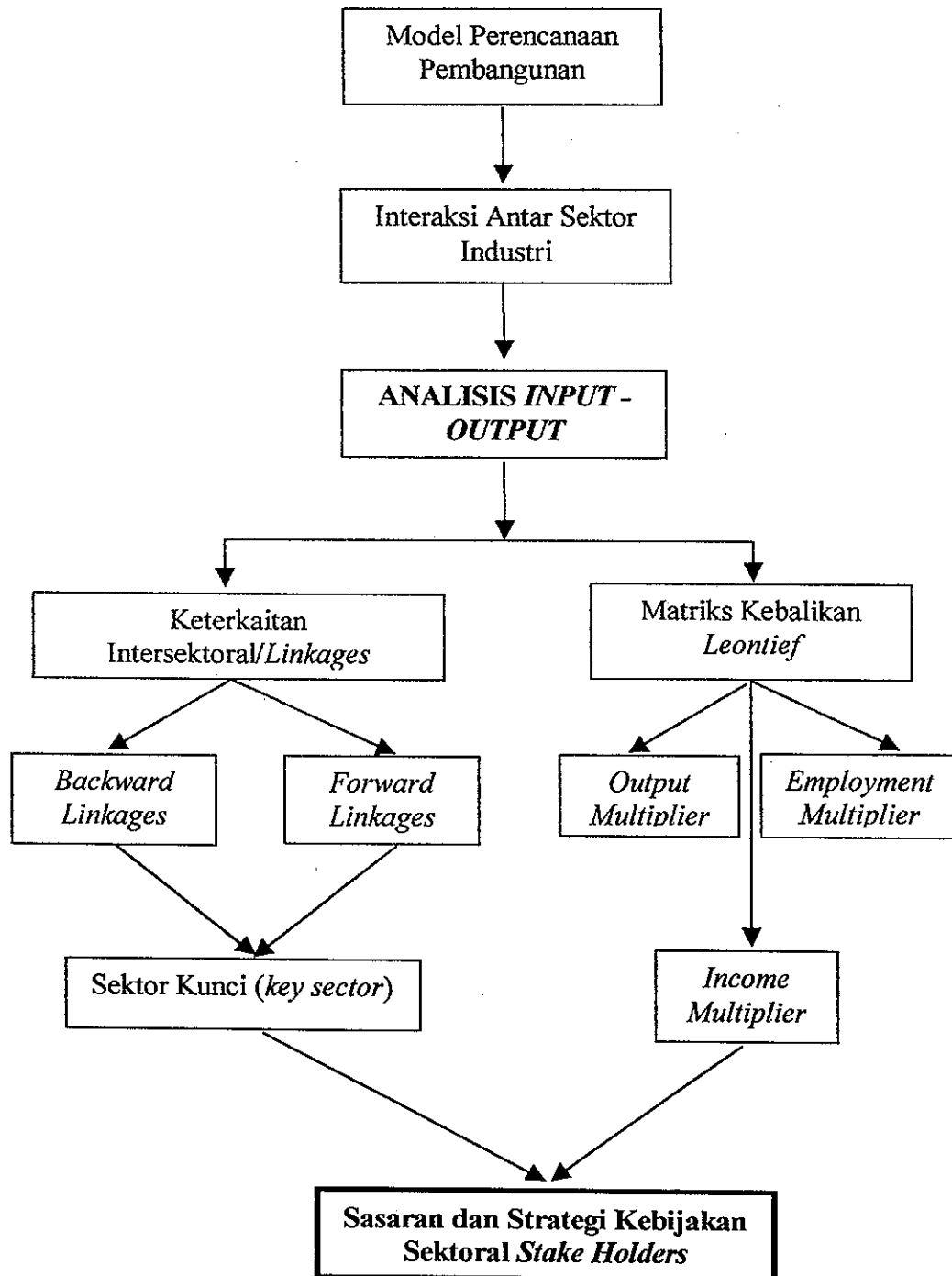
Dalam mengalokasikan sektor-sektor mana yang potensial yang dapat mendorong pertumbuhan *output* dan penciptaan kesempatan kerja serta keterkaitan antar sektoral secara khusus dapat dipergunakan formulasi yang dikembangkan oleh Leontief dengan model *input – output* ( $I - O$ ). Formulasi model  $I - O$  tersebut dalam analisis regional perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat seberapa jauh keterkaitan antara tambahan *output* sektoral dan tambahan penyerapan tenaga kerja/lapangan pekerjaan yang diciptakan jika suatu jumlah pengeluaran pemerintah dialokasikan ke dalam suatu atau beberapa sektor pembangunan; dengan demikian sumber dana pemerintah yang terbatas tersebut dapat digunakan untuk hal – hal yang lebih penting dan terarah.

Model *Input-Output* adalah suatu model yang menggambarkan suatu sistem dalam suatu perekonomian, yang terdiri dari transaksi barang dan jasa antar sektor dimana struktur perekonomiannya dapat digambarkan secara ringkas, menyeluruh dan terpadu dalam suatu tabel yang disebut dengan Tabel  $I - O$ . Dari Tabel  $I - O$  tersebut dapat dilihat antara lain alokasi *output* suatu sektor ke sektor lainnya dan struktur *input* semua sektor, jadi dengan demikian tabel  $I - O$  ini dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor dari suatu sistem perekonomian.

Dengan menggunakan prinsip yang sama dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi sektoral suatu daerah yang anggarannya bersumber dari APBD dan dijabarkan melalui program dan proyek tertentu, tidak saja berdampak terhadap sektor pembangunan yang bersangkutan, tetapi juga berdampak dengan sektor pembangunan lainnya. Misalnya anggaran

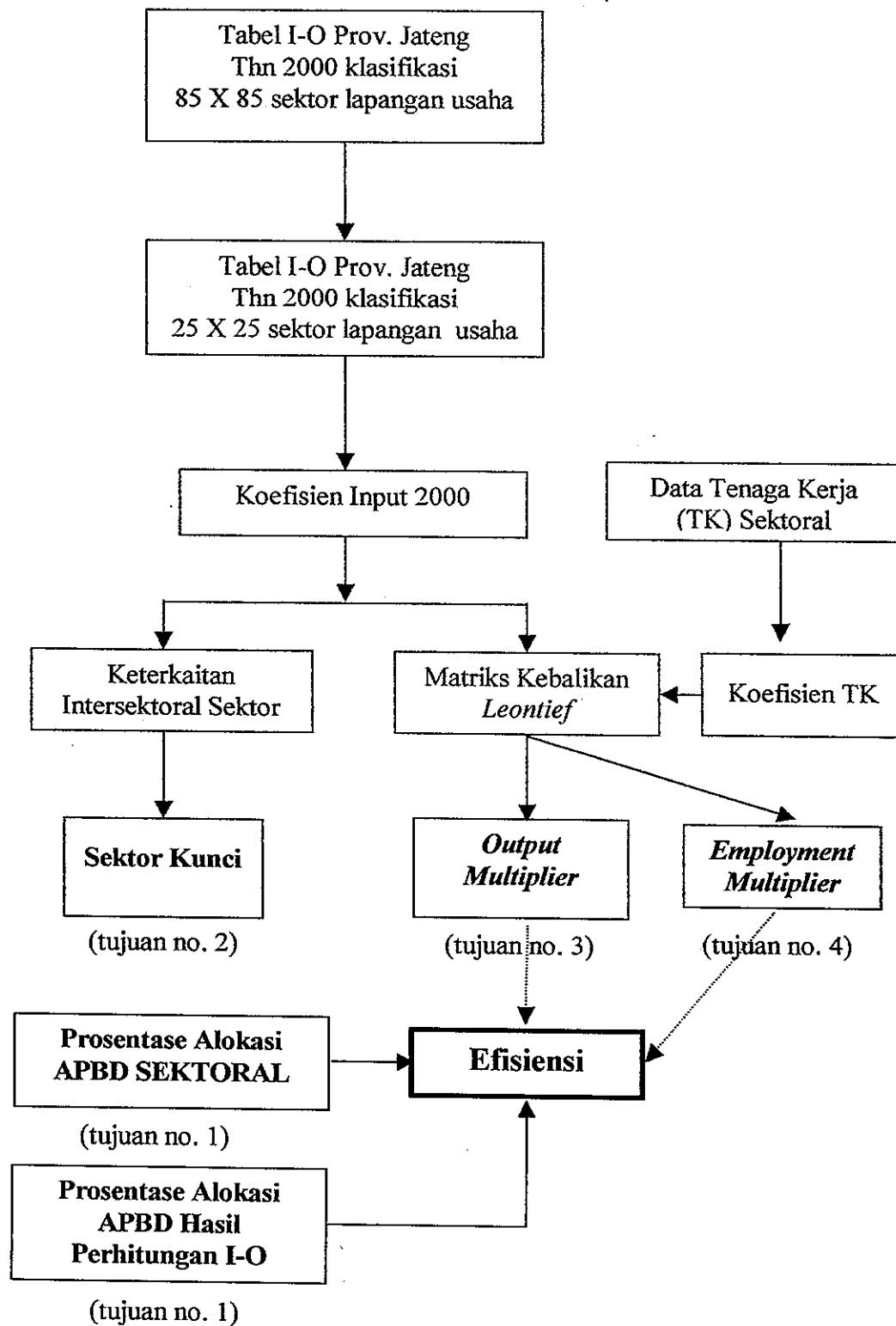
pembangunan sektor industri yang dijabarkan dalam suatu proyek pembinaan pengusaha kecil, selain berdampak terhadap sektor industri itu sendiri, juga berdampak pada sektor perdagangan, sektor ketenagakerjaan dan sektor-sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Model seperti ini akan menggambarkan keterkaitan suatu dampak program/proyek terhadap program/proyek lainnya. Kerangka Pemikiran Teoritis dari Penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2, sedang Proses Analisisnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran Teoritis





Gambar 2.3  
PROSES ANALISIS



Hubungan antara Gambar 2.2 dan Gambar 2.3, adalah sebagai berikut : Alokasi Dana Pembangunan Sektoral pada APBD di Provinsi Jawa Tengah (Provinsi maupun di Kabupaten/Kota) yang teralokasi pada sektor-sektor pembangunan hendaknya di didasarkan pada sektor kunci/sektor unggulan (*key sector*), yang mempunyai makna bahwa sektor kunci adalah sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang antar sektor relatif tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan *output* sektoral dan tambahan lapangan kesempatan kerja sektoral yang tinggi, dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan regional/PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan sektor kunci tersebut diperoleh melalui proses analisis seperti nampak pada Gambar 2.3, yaitu dengan cara melakukan agregasi dan disagregasi Tabel *Input-Output* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 X 85 sektor lapangan usaha menjadi klasifikasi 25 X 25 sektor lapangan usaha sesuai dengan sektor lapangan usaha pada Kelompok Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Penentuan klasifikasi 25 X 25 sektor lapangan usaha berdasarkan KLUI ini dengan pertimbangan bahwa 25 sektor lapangan usaha tersebut adalah nama-nama sektor-sektor dan sub sektor-sub sektor yang telah dibakukan nomenklaturnya sesuai KLUI dan telah mempunyai nilai PDRB.

Selain sektor kunci, dalam analisis penelitian akan dihitung pula dampak *output multiplier* maupun dampak *employment multiplier* berdasarkan tabel *Input-Output* Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 sektor dan telah diagregasi menjadi 25 sektor lapangan usaha menurut KLUI (sebagai variabel *endogen*) dengan pengeluaran pemerintah (G) sebagai variabel *exogen* yang tercermin

dalam Realisasi Pengeluaran Pembangunan Sektoral APBD (sebagai *final demand*-nya) seperti tampak pada Tabel 3.1. Maksud menghitung *output multiplier* dan *employment multiplier* adalah dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar dampak pengganda tambahan *output* dan pengganda tambahan kesempatan kerja yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya tambahan pengeluaran pemerintah (investasi pemerintah) yang tercermin dalam Realisasi Pengeluaran Pembangunan Sektoral APBD tersebut, khususnya untuk tahun anggaran 2000.

Hasil perhitungan *output multiplier* dan *employment multiplier* tersebut akan dibandingkan dengan alokasi pembangunan sektoral APBD riil, bertujuan untuk menghitung efisiensi kinerja sektoralnya (efisiensi kinerja tambahan *output* maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja sektoral). Pengertian efisiensi kinerja adalah perbandingan prosentase antara satu sektor lapangan usaha dengan prosentase total semua sektor. Bila hasil prosentase analisis *Input-Output* (prosentase *output multiplier* dan prosentase *employment multiplier*) memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan prosentase tanpa analisis *Input-Output* (prosentase realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD riil) pada suatu sektor, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut mempunyai efisiensi kinerja sektoral di atas 100% yang berarti bahwa sektor tersebut adalah mempunyai kinerja yang efisien, demikian pula sebaliknya bila hasil prosentase analisis *Input-Output* pada suatu sektor ternyata memberikan hasil lebih rendah dibandingkan prosentase tanpa analisis *Input-Output* (prosentase realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD riil), hal ini mengindikasikan bahwa

sektor tersebut mempunyai efisiensi kinerja di bawah 100% yang berarti bahwa sektor tersebut mempunyai kinerja yang tidak efisien (terjadi pemborosan anggaran). Pengertian efisiensi kinerja suatu sektor di atas 100% adalah bahwa sektor tersebut dapat memberikan *multiplier* lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana yang diberikan, demikian sebaliknya bahwa bila suatu sektor memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, hal ini berarti bahwa sektor tersebut memberikan *multiplier* yang lebih rendah dibanding alokasi dana yang diterimanya, yang berarti terjadi pemborosan anggaran pembangunan pada sektor tersebut. Hasil perhitungan efisiensi anggaran pembangunan terhadap pencapaian tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja pada suatu sektor mungkin saja tidak menghasilkan nilai efisiensi 100% atau lebih secara bersamaan. Namun dapat saja efisiensi kinerja tambahan *output* sektoral memberikan nilai 100% atau lebih, sedangkan efisiensi tambahan kesempatan kerja hanya memberikan nilai di bawah 100%; atau sebaliknya bahwa efisiensi tambahan kesempatan kerja memberikan nilai di 100% atau lebih, sedangkan efisiensi tambahan *output* di bawah 100%. Bila efisiensi kinerja sektoral mencapai 100% atau lebih baik untuk tambahan *output* dan kesempatan kerja, maka strategi kebijakan pengalokasian anggaran yang akan diambil tentunya akan lebih mudah. Namun bila efisiensi kinerja sektoral untuk tambahan *output* dan kesempatan kerja saling bertolak belakang, maka strategi kebijakan pengalokasian anggaran hendaknya didasarkan kepada maksud/tujuan akhir dari kebijakan pembangunan daerah, apakah akan mengejar pertumbuhan (sektor-sektor dengan efisiensi kinerja *output* 100% atau lebih yang akan di

prioritaskan) atau akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak (sektor-sektor dengan efisiensi kinerja kesempatan kerja 100% atau lebih). Strategi kebijakan pengalokasian anggaran sektoral tentunya tidak dapat hanya bertumpu pada salah satu tujuan saja (pencapaian tambahan *output* atau kesempatan kerja), namun diperlukan kombinasi antara keduanya sehingga diharapkan akan terjadi keseimbangan antar sektor.

Jika hasil perbandingan perhitungan efisiensi kinerja sektoral (baik efisiensi kinerja tambahan *output* maupun tambahan kesempatan kerja) antara alokasi pembangunan APBD (alokasi absolut/riil) dengan alokasi pembangunan APBD hasil perhitungan analisis *Input Output* tersebut telah diperoleh, maka interpretasi dari hasil kebijakan pemerintah terhadap pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD tahun anggaran 2000 dapat dilakukan sebagai suatu bahan evaluasi.

### 2.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Belanja pembangunan adalah realisasi belanja pembangunan yang dialokasikan untuk anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perhitungan Anggaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2000.
2. Tabel *Input-Output* adalah Tabel *Input-Output* Jawa Tengah Tahun 2000 berdasarkan transaksi domestik harga produsen. Penentuan atas transaksi

domestik adalah bahwa transaksi yang dihitung dalam penelitian ini adalah hanya mencakup transaksi atas barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Jawa Tengah. Sedangkan atas dasar harga produsen, dikarenakan dalam penelitian ini tidak memperhitungkan biaya transportasi dan margin perdagangan.

3. *Output* sektoral adalah nilai produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, dan dalam penelitian ini yang dimaksudkan sektor produksi adalah sektor-sektor pembangunan yang berjumlah 20 sektor produksi pada tahun anggaran 2000.
4. Efisiensi anggaran adalah perbandingan antara prosentase tambahan *output* sektoral ataupun kesempatan kerja sektoral dengan prosentase anggaran sektoral pada APBD Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kesempatan kerja adalah jumlah pekerjaan yang tersedia dalam proses produksi yang memungkinkan angkatan kerja memperoleh pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Hubungan antar sektor diartikan sebagai kenyataan bahwa *input* suatu sektor merupakan *output* dari sektor lain dan sebaliknya *output* dari suatu sektor merupakan *input* dari sektor lain.
7. Angka Pengganda Keluaran (*output multiplier*) adalah merupakan alat analisis untuk menghitung total nilai produksi dari semua sektor ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi nilai permintaan akhir dari *output* suatu sektor.

8. Angka Pengganda Kesempatan Kerja (*employment multiplier*) adalah alat analisis untuk mengetahui dampak perubahan permintaan akhir pada suatu sektor terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.
9. Daya Penyebaran adalah besaran yang menunjukkan dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap *output* seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara. Daya Penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara.
10. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyumbangkan *input* kepadanya.
11. Derajat Kepekaan adalah besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap *output* suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Derajat Kepekaan dapat dimanfaatkan untuk melihat keterkaitan ke depan (*forward linkage*), oleh karena besaran ini menjelaskan pembentukan *output* di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian.
12. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor yang menghasilkan *output* untuk digunakan sebagai *input* bagi sektor yang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1. Jenis Data**

Data yang dipergunakan dan diolah untuk penelitian ini adalah berupa data sekunder yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, meliputi :

1. Data Realisasi Keuangan Pembangunan Sektoral pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000;
2. Data Realisasi Keuangan Pembangunan Anggaran Sektoral pada APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000;
3. Data Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000;
4. Data Tenaga Kerja Sektoral Jawa Tengah Tahun 2000.

##### **3.1.2. Sumber Data**

Seluruh data sekunder untuk penelitian tesis ini didapatkan dari :

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah untuk data-data *Input-Output* Jawa Tengah 2000, dan data Sensus Penduduk Jawa Tengah (SP Jawa Tengah) 2000;
2. Bappeda Provinsi Provinsi Jawa Tengah untuk data-data Realisasi Keuangan Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000;



3. Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk data-data Realisasi Keuangan Pembangunan Sektoral APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2000.

### 3.2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah meliputi :

1. Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
2. Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi ditambah APBD Kabupaten/kota se Jawa Tengah)
3. Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di 2 Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu : Kab. Brebes dan Rembang.

Pemilihan ke 2 Kabupaten tersebut didasarkan atas pertimbangan geografis wilayah pantai utara Pulau Jawa, dimana Kabupaten Brebes yang terletak di sebelah Barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Rembang yang terletak di sebelah Timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur

Tujuan dilakukan analisis terhadap ke 2 kabupaten adalah dalam rangka melakukan simulasi/ccontoh penerapan model penelitian terhadap dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral terhadap tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja sektoral masing-masing kabupaten tersebut.

### 3.3. Metode Penelitian

Agar sesuai dengan tujuan analisis penelitian dan sesuai pula dengan jumlah lapangan usaha menurut KLUI, maka sektor-sektor pembangunan pada nomenklatur APBD di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 20 sektor pembangunan (nomenklatur sektor untuk tahun anggaran 2000) perlu diagregasikan dan atau didisagregasikan ke dalam 25 sektor lapangan usaha, meliputi :

- (1) Tanaman Bahan Makanan
- (2) Tanaman Perkebunan
- (3) Peternakan dan Hasilnya
- (4) Kehutanan
- (5) Perikanan
- (6) Pertambangan dan Penggalian
- (7) Industri Migas
- (8) Makanan, Minuman dan Tembakau
- (9) Tekstil, Barang kulit dan Alas Kaki
- (10) Barang Kayu dan Hasil Hutan
- (11) Kertas dan Barang Cetak
- (12) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet
- (13) Semen dan Barang lain bukan Logam
- (14) Logam dasar besi dan baja
- (15) Alat angkutan, mesin dan peralatan
- (16) Barang lainnya

- (17) Listrik, Gas dan Air Bersih
- (18) Bangunan
- (19) Perdagangan Besar dan Eceran
- (20) Hotel
- (21) Pengangkutan
- (22) Komunikasi
- (23) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- (24) Pemerintahan Umum
- (25) Jasa Umum

Hasil Agregasi dan Disagregasi 25 Sektor menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
 AGREGASI/DISAGREGASI SEKTOR/SUBSEKTOR LAPANGAN USAHA, APBD DAN TABEL INPUT - OUTPUT JAWA TENGAH TAHUN 2000

LAPANGAN USAHA			SEKTOR APBD		SEKTOR INPUT-OUTPUT 85 X 85		
KODE	NAMA SEKTOR/SUBSEKTOR	AGREGASI/ DISAGREGASI	KODE	NAMA SEKTOR/SUBSEKTOR	AGREGASI	KODE	NAMA SEKTOR
1	Tanaman Bahan Makanan	Disagregasi 2	2	Pertanian dan Kehutanan 2.1. Sub Sektor Pertanian Rakyat	1 s/d 10	1	Padi
			3	Sumberdaya air dan irigasi		2	Jagung
						3	Ketela Pohon
						4	Umbi Lainnya
						5	Bawang Merah
						6	Sayur-sayuran
						7	Pisang
						8	Buah-buahan
						9	Kacang-kacangan
						10	Bahan Makanan Lainnya
2	Tanaman Perkebunan	Disagregasi 2	2.2	2.2. Sub Sektor Perkebunan	11 s/d 19	11	Karet
						12	Tebu
						13	Kelapa
						14	Tembakau
						15	Kopi
						16	Cengkeh
						17	Hasil Tanaman Serat
						18	Hasil Perkebunan Lainnya
						19	Hasil Pertanian Lainnya
3	Peternakan dan Hasilnya	Disagregasi 2	2.3	2.3. Sub Sektor Peternakan	20 s/d 21	20	Ternak dan Hasil-hasilnya
						21	Unggas dan Hasil-hasilnya
4	Kehutanan	Disagregasi 2	2.5	2.5. Sub Sektor Kehutanan	22 s/d 23	22	Kayu
						23	Hasil Hutan Lainnya
5	Perikanan	Disagregasi 2	2.4	2.4. Sub Sektor Perikanan	24 s/d 26	24	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
						25	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
						26	Jasa Pertanian
6	Pertambangan dan Penggalian	Disagregasi 7	7	7.1. Sub Sektor Pertambangan	27 s/d 30	27	Garam Kasar
						28	Pasir Besi
						29	Pertambangan Lainnya
						30	Barang Galian Segala Jenis

lanjutan Tabel 3.1 (2)

1	2	3	4	5	6	7	8
7 a. Industri Migas		Agregasi	1	Industri	54	54	Industri Pengilangan Minyak
8 1) Makanan, Minuman dan Tembakau			1	Industri	31 s/d 42	31	Industri Pengolahan dan Pengawetan Makanan
						32	Industri Minyak dan Lemak
						33	Industri Penggilingan Padi
						34	Industri Tepung Terigu dan Tepung Lainnya
						35	Industri Roti dan Kue Kering Lainnya
						36	Industri Kopi Giling dan Kupas
						37	Industri Makanan Lainnya
						38	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Lainnya
						39	Industri Makanan Ternak
						40	Industri Gula Tebu dan Gula Kelapa
						41	Industri Minuman
						42	Industri Rokok dan Pengolahan Tembakau
9 2) Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki			1	Industri	43 s/d 47	43	Industri Penintalan
						44	Industri Tekstil
						45	Industri Tekstil dan Tekstil Lainnya
						46	Industri Pakatan Jadi
						47	Industri Kulit dan Alas Kaki
10 3) Barang Kayu & Hasil Hutan			1	Industri	48 s/d 49	48	Industri Kayu dan Bln Bangunan dari Kayu
						49	Industri Perabot Rumah Tangga dari Kayu
11 4) Kertas & Brg. Cetakan			1	Industri	50 s/d 51	50	Industri Kertas dan barang dari Kertas
						51	Penerbitan dan Percetakan
12 5) Pupuk, Kimia dan Barang dr Karet			1	Industri	52, 53, 55, 56	52	Industri Farmasi dan Jamu Tradisional
						53	Industri Kimia dan Pupuk
						55	Industri Karet dan Barang dari Karet
						56	Industri Plastik dan Barang dari Plastik
13 6) Semen & Barang Lain bukan Logam			1	Industri	57 s/d 59	57	Industri Barang Mineral bukan Logam
						58	Industri Kapur dan Barang dari Semen
						59	Industri Senen
14 7) Logam Dasar, Besi & Baja			1	Industri	60 s/d 61	60	Industri Dasar Baja dan Besi
						61	Industri Logam Bukan Besi dan Barang Logam

1	2	3	4	5	6	7	8
15	8) Alat Angk. Mesin dan Peralatan		1	Industri	62 s/d 63	62	Industri Mesin dan Perlengkapan Listrik
16	9) Barang Lainnya		1	Industri	64	63	Industri Alat Angkutan dan Perbaikannya
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	Disagregasi 7	7.2	Sub Sektor Energi/Listrik	65	64	Industri Barang Lainnya
18	Bangunan	Agregasi 9 & 14	9	Pemb. Daerah dan Pemukiman	66 s/d 67	65	Listrik, Gas dan Air Minum
			14	Perumahan dan Pemukiman		66	Bangunan Tmpt Tinggal dan Bukan Tmpt Tinggal
19	a. Perdagangan Besar & Eceran	Disagregasi 5	5.1	Sub Sektor Perdagangan	68	67	Bangunan Lainnya
20	b. Hotel				69 s/d 70	68	Perdagangan
			6	Transportasi	71 s/d 75	69	Jasa Restoran
21	a. Pengangkutan					70	Jasa Perhotelan
						71	Jasa Angkutan Kereta Api
						72	Jasa Angkutan Jalan Raya
						73	Angkutan Air
						74	Angkutan Udara
						75	Jasa Penunjang Angkutan
22	b. Komunikasi		8.2	Sub Sektor Telekomunikasi	76	76	Komunikasi
23	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Disagregasi 5	5.2	Sub Sektor Pengembangan Dunia	77 s/d 79	77	Jasa Bank
			5.3	Sub Sektor Keu. Daerah		78	Jasa Keuangan selain Bank
			5.4	Koperasi dan Usaha Kecil		79	Real Estate dan Jasa Perusahaan
24	a. Pemerintahan	Agregasi 10; 16; 17; 18; 19 dan 20	10	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	80	80	Pemerintahan Umum & Pertanian
			16	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
			17	Hukum			
			18	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan			
			19	Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa			
			20	Keamanan dan Ketertiban Umum			
25	b. Jasa Umum	Agregasi 4; 8; 11; 12; 13; dan 15	4	Tenaga Kerja	81 s/d 85	81	Jasa Pendidikan Swasta
			8	Sub Sektor Pariwisata		82	Jasa Kesehatan Swasta
			11	Pendid. Kebudayaan Nas., Kepercayaan Thid Tuhan YME		83	Jasa Hiburan
			12	Kependudukan dan KB		84	Jasa-jasa Lainnya
			13	Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja		85	Kegiatan yg tidak jelas batasannya
			15	Agama			

Sumber : Nomenklatur APBD Pro. Jateng Tahun Anggaran 2000, Tabel Input-Output Jawa Tengah Tahun 2000 dan Nomenklatur Kelompok Lapangan Usaha Indonesia (KLU), ditolah.

### 3.4. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan analisis, pendekatan *pertama* adalah permintaan akhir meliputi : (1) analisis tambahan keluaran/*output* sektoral sebagai akibat belanja pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah di berbagai sektor; dan (2) analisis tambahan kesempatan kerja. Pendekatan *kedua* adalah analisis pengganda meliputi : (1) analisis pengganda pengeluaran (*output multiplier*); dan (2) analisis pengganda tenaga kerja (*employment multiplier*). Pendekatan *ketiga* adalah keterkaitan intersektoral meliputi : (1) analisis keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dan (2) analisis keterkaitan ke belakang (*backward linkages*).

Ketiga pendekatan analisis dalam penelitian ini diperoleh dari perhitungan sektoral pada Tabel *Input-Output* Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 x 85 sektor lapangan usaha yang diagregasikan menjadi 25 sektor lapangan usaha sesuai klasifikasi KLUI.

#### 1. Pendekatan Permintaan Akhir (*Final Demand*)

##### (1). Analisis Tambahan Keluaran/*Output*

Adalah dampak yang ditimbulkan karena adanya tambahan permintaan akhir/*final demand*, dan dalam penelitian adalah adanya tambahan pengeluaran pemerintah pada realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD TA. 2000.

Formulasi matematisnya sebagai berikut (Richardson , 1972 : 29) :

$$\Delta X_i = [I - A]^{-1} \Delta Y \quad (5)$$

di mana :

$\Delta X_i$  = tambahan *output* di sektor  $i$  ;

$[ I - A ]^{-1}$  = Leontief *inverse* matrik tabel *I-O*;

$\Delta Y$  = permintaan akhir baru (belanja pembangunan sektoral APBD Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Tengah)

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan sektoral adalah bagian dari permintaan, sehingga timbulnya permintaan yang berasal dari APBD di Provinsi Jawa Tengah akan berdampak positif terhadap tambahan *output*. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi makro (khususnya teori Keynes), bahwa jika terjadi perubahan permintaan, maka *output* setiap sektor juga akan berubah. Perubahan terjadi melalui pengaruh langsung dan tidak langsung permintaan pada seluruh penyediaan (*supply*), jadi adanya permintaan akan menghasilkan perubahan *output*.

## (2). Analisis Tambahan Kesempatan Kerja

Tambahan kesempatan kerja disebabkan adanya tambahan *output* sebagai dampak dari perubahan permintaan akhir, dan dalam penelitian adalah adanya tambahan pengeluaran pemerintah pada realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD TA. 2000.

Formula matematisnya sebagai berikut (Boediono, 1993 : 57) :

$$\Delta N_i = n_i . \Delta X_i \quad (6)$$



di mana :

$\Delta N_i$  = tambahan kesempatan kerja;

$n_i$  = koefisien kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah

$(n_i = N_i / X_i)$  ;

$N_i$  = kesempatan kerja sektoral;

$X_i$  = total *output* sektoral;

$\Delta X_i$  = tambahan *output* sektoral

Interpretasi dari rumus tambahan kesempatan kerja menunjukkan bahwa koefisien kesempatan kerja sektoral merupakan indikator untuk melihat daya serap tenaga kerja di masing-masing sektor. Semakin tinggi koefisien kesempatan kerja di suatu sektor menunjukkan semakin tinggi pula daya serap tenaga kerja di sektor yang bersangkutan, karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit *output*. Sebaliknya sektor yang semakin rendah koefisien kesempatannya menunjukkan semakin rendah pula daya serap tenaganya.

Informasi tentang koefisien kesempatan kerja sektoral antara lain dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menyusun berbagai kebijakan dan perencanaan di bidang ketenagakerjaan.

## 2. Pendekatan Analisis Angka Pengganda (*multiplier analysis*)

Pada intinya, analisis angka pengganda adalah suatu metoda/cara untuk mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen

tertentu apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen, seperti permintaan akhir, di dalam perekonomian (Suahasil Nazara, 1997: 58). Dua variabel yang menjadi perhatian utama dalam analisis angka pengganda dalam penelitian ini adalah angka pengganda keluaran (*output multiplier*) sektor-sektor produksi, dan angka pengganda kesempatan kerja/lapangan pekerjaan (*employment multiplier*).

(1). Angka Pengganda Keluaran (*output multiplier*)

Formulasi matematisnya sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985 : 103) :

$$O_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} \quad (7)$$

di mana :

$O_j$  = pengganda keluaran (*output multiplier*);

$\alpha_{ij}$  = elemen matrik kebalikan Leontief Table *Input-Output*

Jawa Tengah.

Rekomendasi kebijakan dari analisis angka pengganda keluaran ini adalah bahwa jika yang ingin dicapai adalah memaksimalkan *output* sektor produksi, maka tambahan permintaan akhir harus dialokasikan sepenuhnya ke sektor dengan angka pengganda *output* tertinggi.

(2) Angka Pengganda Kesempatan Kerja/Lapangan Pekerjaan  
(*employment multiplier*)

Angka pengganda kesempatan kerja/lapangan pekerjaan biasa disebut pula dengan efek lapangan pekerjaan (*employment effect*) merupakan efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di perekonomian akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di suatu sektor tertentu (Suahasil Nazara, 1997: 73)

Formulasi matematisnya sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985 : 111) :

$$Ej = \sum_{i=1}^n W_{n+1,i} \alpha_{ij} \quad (8)$$

di mana :

$Ej$  = pengganda kesempatan kerja;

$W$  = koefisien *input* tenaga kerja;

$\alpha_{ij}$  = elemen matrik kebalikan Leontief Tabel *Input-Output*

Jawa Tengah

Interpretasi dari rumus (8) di atas adalah bahwa jika terdapat tambahan permintaan akhir di sektor  $j$  akan menyebabkan tambahan *output* tidak saja di sektor  $j$ , tetapi juga tambahan di sektor  $i$ . Pada gilirannya, tambahan *output* di sektor  $j$  tadi akan meningkatkan permintaan tenaga kerja untuk sektor  $j$  tersebut. Sedangkan tambahan *output* di sektor  $i$ , akibat tambahan permintaan akhir di sektor  $i$  tadi, akan meningkatkan tenaga kerja di sektor  $i$  pula (Suahasil Nazara, 1997: 74).

Implikasi kebijakan dari angka pengganda kesempatan kerja ini adalah mencoba menerjemahkan peningkatan permintaan akhir tersebut dalam bentuk kesempatan kerja/lapangan pekerjaan. Jika terdapat perubahan permintaan akhir dalam model *input-output* ini, terjadi pula perubahan *output* yang diproduksi oleh sektor sektor produksi di perekonomian, perubahan *output* tersebut tentunya akan pula mengubah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan.

### 3. Pendekatan Keterkaitan Intersektoral

Analisis keterkaitan intersektoral adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat/derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain dalam suatu sektor perekonomian. Bila suatu sektor mendapat *input* dari sektor lain maka dapat disebut adanya keterkaitan ke belakang (*Backward Linkages*), dan bila suatu sektor menyumbang *output*nya untuk menjadi *input* sektor lainnya maka dapat disebut adanya keterkaitan ke depan (*Forward Linkages*)

#### (1) Kaitan ke Belakang (*Backward Linkages*)

Formulasi matematisnya sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985 : 324) :

$$B(d+i)_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} \quad (9)$$

di mana :

$B(d+i)_j$  = indeks kaitan ke belakang sektoral;

$\alpha_{ij}$  = elemen matrik kebalikan Leontief Tabel *Input-*

*Output* Jawa Tengah

Jumlah dampak dalam persamaan (9) disebut juga sebagai jumlah daya penyebaran (BPS, 1999: 42); dan besaran ini menunjukkan dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap *output* seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Sifat permintaan akhir dari masing-masing sektor adalah saling berbeda satu sama lain, sehingga persamaan (9) bukan merupakan ukuran yang sah untuk membandingkan dampak yang terjadi pada setiap sektor. Untuk keperluan perbandingan, maka persamaan (9) harus dinormalkan (*normalized*) (Sritua Arief, 1993: 220 dan BPS, 1999: 43), yaitu dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dihasilkan dari proses ini disebut sebagai indeks daya penyebaran dengan formulasi matematis sebagai berikut :

$$\alpha_j = \frac{\frac{1}{n} \sum_i b_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_i \sum_j b_{ij}} \quad (10)$$

dimana :

$\alpha_j$  = indeks daya penyebaran sektor  $j$  dan lebih dikenal sebagai daya penyebaran sektor  $j$ ; dan dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar 1 atau lebih kecil dari 1.

Interpretasi dari persamaan (10) adalah bila  $\alpha_j = 1$ , hal tersebut berarti bahwa daya penyebaran sektor  $j$  sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai  $\alpha_j > 1$  menunjukkan daya penyebaran sektor  $j$  berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya  $\alpha_j < 1$  menunjukkan daya penyebaran sektor  $j$  lebih rendah.

Implikasi kebijakan dari keterkaitan sektoral ke belakang adalah bahwa sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong yang cukup kuat dibandingkan terhadap sektor yang lainnya (Suahasil Nazara, 1999: 73)

## (2) Kaitan ke Depan (*Forward Linkages*)

Formulasi secara matematis sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985: 324) :

$$F(d+i)_i = \sum_{j=1}^n q_{ij} \quad (11)$$

di mana :

$F(d+1)_i$  = indeks kaitan ke depan sektoral ;

$q_{ij}$  = elemen matrik kebalikan Leontief Tabel *Input-*

*Output* Jawa Tengah

Nilai dalam persamaan (11) disebut juga sebagai jumlah derajat kepekaan, yaitu besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap *output* suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian (Suahasil Nazara, 1999: 44).

Untuk keperluan perbandingan antar sektor dan logika yang serupa dengan pembahasan pada daya penyebaran, maka persamaan (11) dinormalkan menjadi :

$$\beta_i = \frac{\sum_j^n b_{ij}}{(1/n) \sum_i \sum_j^n b_{ij}} \quad (12)$$

dimana :

$\beta_i$  = indeks derajat kepekaan sektor  $i$  dan lebih dikenal sebagai derajat kepekaan sektor  $i$ ; dan dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar 1 atau lebih kecil dari 1.

Interpretasi dari persamaan (12) adalah bila  $\beta_i = 1$ , hal tersebut berarti bahwa derajat kepekaan sektor  $i$  sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Nilai  $\beta_i > 1$  menunjukkan derajat kepekaan sektor  $i$  berada di atas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya  $\alpha_j < 1$  menunjukkan derajat kepekaan sektor  $i$  lebih rendah.

Implikasi kebijakan dari keterkaitan sektoral ke depan adalah bahwa sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi terhadap sektor lain (Suahasil Nazara, 1999: 73).

Berdasarkan indeks daya penyebaran (DP) dan indeks derajat kepekaan (DK) ini, sektor-sektor ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok (Suahasil Nazara, 1999: 75), sebagai berikut:

1. Kelompok I

Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DK dan indeks DP relatif tinggi (di atas rata-rata)

2. Kelompok II

Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DK tinggi (di atas rata-rata), tetapi indeks DP-nya rendah (di bawah rata-rata)

3. Kelompok III

Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP rendah (di bawah rata-rata) dan indeks DP-nya juga rendah (di bawah rata-rata)



#### 4. Kelompok IV

Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP tinggi (di atas rata-rata), tetapi indeks DK-nya rendah (di bawah rata-rata).

Indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan yang adalah penurunan dari keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, oleh para ahli telah digunakan dalam rangka menganalisis dan menentukan sektor-sektor kunci/sektor unggulan (*key sector*) yang akan dikembangkan dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Suahasil Nazara, 1999: 73).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1. Geografis**

Posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Provinsi Jawa Tengah antara 5 °40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan adalah 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Batas geografis Provinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah Selatan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia, serta sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota, yang terdiri atas 544 kecamatan, meliputi 8.491 desa/kelurahan dan 31.820 dusun/lingkungan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 3,25 juta hektar atau sekitar 1,7 persen dari luas wilayah Indonesia atau 25,04 persen dari luas wilayah Pulau Jawa.

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah yang paling luas adalah Kabupaten Cilacap yaitu seluas 213.851 hektar atau 6,57 persen dari luas wilayah provinsi. Kabupaten yang paling sempit adalah Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 42.512 hektar atau sekitar 1,31 persen

dari luas wilayah provinsi. Kota yang paling luas adalah Kota Semarang dengan luas wilayah 37.367 hektar atau 1,15 persen dari luas provinsi, sedang kota yang paling sempit adalah Kota Magelang dengan luas wilayah 1.812 hektar atau 0,06 persen dari luas provinsi.

#### **4.2. Demografi**

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Jawa Tengah Tahun 2000 (BPS, 2001) adalah sebesar 30,78 juta jiwa atau 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan menempati urutan ketiga terbesar dari seluruh provinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten adalah di Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk sebesar 1.689.011 orang, sedang jumlah penduduk terbanyak untuk kota adalah di Kota Semarang dengan jumlah penduduk sebesar 1.341.730 orang. Jumlah penduduk paling sedikit untuk kabupaten adalah di Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk sebesar 554.690 orang, sedang jumlah penduduk paling sedikit untuk kota adalah di Kota Salatiga dengan jumlah penduduk sebesar 150.201 orang.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1996 – 2000) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, dimana pada tahun 2000 tercatat 946 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi untuk kabupaten adalah di Kabupaten Klaten dengan tingkat kepadatan sebesar 1.689,36 jiwa setiap kilometer persegi, sedang untuk kota adalah di Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sebesar 11.114,42 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk paling rendah untuk kabupaten

adalah di Kabupaten Blora dengan tingkat kepadatan sebesar 450,54 jiwa setiap kilometer persegi, sedang untuk kota adalah di Kota Salatiga dengan tingkat kepadatan sebesar 2.836,12 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )
1.	Kab. Cilacap	1.600.834	748,57
2.	Kab. Banyumas	1.447.865	1.090,60
3.	Kab. Purbalingga	782.714	1.006,51
4.	Kab. Banjarnegara	831.327	777,13
5.	Kab. Kebumen	1.160.922	905,03
6.	Kab. Purworejo	703.691	680,01
7.	Kab. Wonosobo	730.677	742,05
8.	Kab. Magelang	1.092.77	1.006,49
9.	Kab. Boyolali	891.363	878,13
10.	Kab. Klaten	1.107.477	1.689,36
11.	Kab. Sukoharjo	768.752	1.647,35
12.	Kab. Wonogiri	966.271	530,23
13.	Kab. Karanganyar	754.802	977,47
14.	Kab. Sragen	842.759	890,40
15.	Kab. Grobogan	1.257.958	636,67
16.	Kab. Blora	808.443	450,54
17.	Kab. Rembang	554.690	546,98
18.	Kab. Pati	1.144.300	767,37
19.	Kab. Kudus	701.537	1.650,02
20.	Kab. Jepara	962.909	958,92
21.	Kab. Demak	965.499	1.075,85
22.	Kab. Semarang	828.169	874,65
23.	Kab. Temanggung	659.881	758,28
24.	Kab. Kendal	845.370	843,46
25.	Kab. Batang	658.321	834,43
26.	Kab. Pekalongan	795.044	950,86
27.	Kab. Pemalang	1.253.706	1.238,96
28.	Kab. Tegal	1.374.382	1.562,33
29.	Kab. Brebes	1.89.011	1.018,87
30.	Kota Magelang	116.245	6.415,29
31.	Kota Surakarta	489.368	11.114,42
32.	Kota Salatiga	150.201	2.836,12
33.	Kota Semarang	1.341.730	3.590,68
34.	Kota Pekalongan	260.814	5.801,02
35.	Kota Tegal	236.038	6.843,66
Jateng		30.775.846	945,67

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka 2001.

### 4.3. Tenaga Kerja

Menurut Hasil Susenas 2000 Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2001), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2000 tercatat sebanyak 15.129.122 orang, dimana jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja berjumlah 14.491.222 orang, dan jumlah angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan berjumlah 637.900 orang (4,40 persen). Perincian jumlah angkatan kerja per kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2000 berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) Jawa Tengah Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000  
menurut Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Mencari Kerja	Jumlah
1.	Kab. Cilacap	663.265	35.409	698.674
2.	Kab. Banyumas	640.565	45.636	686.201
3.	Kab. Purbalingga	345.543	7.531	353.074
4.	Kab. Banjarnegara	397.997	13.776	411.773
5.	Kab. Kebumen	524.974	17.793	542.767
6.	Kab. Purworejo	324.559	7.200	331.759
7.	Kab. Wonosobo	384.870	10.276	395.146
8.	Kab. Magelang	584.440	11.911	596.351
9.	Kab. Boyolali	494.343	8.009	502.352
10.	Kab. Klaten	534.606	24.962	559.568
11.	Kab. Sukoharjo	362.908	23.362	386.270
12.	Kab. Wonogiri	517.904	11.572	529.476
13.	Kab. Karanganyar	391.678	12.901	404.579
14.	Kab. Sragen	433.503	12.722	446.225
15.	Kab. Grobogan	603.932	22.680	626.612
16.	Kab. Blora	433.706	11.353	445.059
17.	Kab. Rembang	261.580	7.656	269.236
18.	Kab. Pati	564.842	28.482	593.324
19.	Kab. Kudus	364.314	13.050	377.364
20.	Kab. Jepara	461.265	11.190	472.455
21.	Kab. Demak	430.195	21.209	451.404
22.	Kab. Semarang	413.223	9.410	422.633
23.	Kab. Temanggung	356.855	6.631	363.486
24.	Kab. Kendal	364.453	19.514	383.967
25.	Kab. Batang	314.151	10.476	324.627
26.	Kab. Pekalongan	355.845	16.631	372.476
27.	Kab. Pemalang	520.240	45.384	565.624
28.	Kab. Tegal	576.657	38.425	615.082
29.	Kab. Brebes	764.195	41.668	805.863
30.	Kota Magelang	47.886	2.891	50.777
31.	Kota Surakarta	213.492	15.432	228.924
32.	Kota Salatiga	63.426	10.487	73.913
33.	Kota Semarang	583.896	47.346	631.242
34.	Kota Pekalongan	105.300	6.120	111.420
35.	Kota Tegal	90.614	8.805	99.419
Provinsi		14.491.222	637.900	15.129.122

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Hasil Sensus Penduduk (SP)  
Jawa Tengah Tahun 2000

Dilihat dari lapangan pekerjaannya, maka peran sektor pertanian pada tahun 2000 masih cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian ini masih menyerap 42,34 persen tenaga kerja. Sektor-sektor lain yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan (20,91 persen), sektor industri (15,71 persen) dan sektor jasa (10,98 persen). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ternyata kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja sedikit mengalami penurunan, dimana pada tahun 1999 masih sebesar 43,37 persen. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran sektor pertanian ke sektor industri semakin membaik dari tahun ke tahun.

#### **4.4. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah**

Dampak krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tahun 1997 ternyata berimbas pula terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebelum terjadi krisis ekonomi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, namun mengalami penurunan pada tahun 1997 dan 1998 akibat dampak krisis ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1996 mencapai 7,30 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 3,03 persen pada tahun 1997, dan bahkan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus 11,74 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran yang selama ini sektor-sektor tersebut memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB Jawa Tengah.



Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai terlihat adanya kenaikan pada tahun 1999 yaitu sebesar 3,49 persen, sedang untuk tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,93 persen (angka diperbaiki). Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan dalam Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 (persen) dapat dilihat pada Tabel. 4.3, sedangkan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993,  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 (persen)

Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian	3,37	(3,20)	(3,35)	3,07	3,31
2. Pertambangan dan Penggalan	11,85	11,35	(7,11)	5,49	2,49
3. Industri Pengolahan	8,71	2,87	(14,61)	2,82	3,19
4. Listrik, Gas dan Air Minum	14,03	13,47	3,64	10,38	9,66
5. Bangunan	11,24	6,37	(32,10)	11,93	1,49
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,35	6,40	(9,00)	3,20	6,71
7. Pengangkutan dan Komunikasi	12,88	3,61	(0,09)	10,29	5,45
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,11	7,99	(34,20)	3,77	2,99
9. Jasa-jasa	4,13	2,64	(9,60)	(0,20)	1,27
<b>PDRB Total</b>	<b>7,30</b>	<b>3,03</b>	<b>(11,74)</b>	<b>3,39</b>	<b>3,93</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, *Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2000*.

Tabel 4.4

PDRB, PDRB per kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Kabupaten/Kota  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000

No.	Kabupaten/Kota	PDRB*) (jutaan Rp)	PDRB*) per kapita (Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
1	2	3	4	5
1.	Kab. Cilacap	2.206.677,43	1.329.127,59	5,25
2.	Kab. Banyumas	1.028.604,67	695.805,68	4,03
3.	Kab. Purbalingga	611.664,77	734.230,62	2,78
4.	Kab. Banjarnegara	866.034,16	1.010.039,54	2,65
5.	Kab. Kebumen	930.822,49	800.861,83	4,28
6.	Kab. Purworejo	684.306,71	897.887,12	2,41
7.	Kab. Wonosobo	513.121,93	688.646,12	4,41
8.	Kab. Magelang	1.054.929,26	963.004,68	3,50
9.	Kab. Boyolali	892.046,22	969.235,14	0,86
10.	Kab. Klaten	1.199.551,88	956.415,71	3,98
11.	Kab. Skoharjo	1.112.790,61	1.425.581,79	3,52
12.	Kab. Wonogiri	785.059,86	708.888,39	3,73
13.	Kab. Karanganyar	1.193.085,08	1.512.008,50	4,51
14.	Kab. Sragen	696.930,14	782.783,48	2,85
15.	Kab. Grobogan	749.529,21	568.309,08	11,15
16.	Kab. Blora	676.637,68	820.474,19	2,45
17.	Kab. Rembang	504.132,77	905.422,25	4,98
18.	Kab. Pati	940.874,70	806.927,90	0,36
19.	Kab. Kudus	3.087.617,87	4.521.193,33	1,89
20.	Kab. Jepara	989.279,74	1.020.967,51	4,61
21.	Kab. Demak	744.316,44	766.614,18	2,89
22.	Kab. Semarang	1.047.365,80	1.325.120,29	4,78
23.	Kab. Temanggung	697.991,69	1.037.831,78	3,47
24.	Kab. Kendal	1.550.396,93	1.771.947,01	2,17
25.	Kab. Batang	721.649,41	1.092.109,25	2,01
26.	Kab. Pekalongan	862.264,91	1.093.198,78	2,37
27.	Kab. Pemalang	1.089.043,63	863.324,09	3,71
28.	Kab. Tegal	911.597,09	660.970,35	4,89
29.	Kab. Brebes	1.381.023,44	841.558,41	4,56
30.	Kota Magelang	317.300,62	2.752.649,15	3,59
31.	Kota Surakarta	1.302.715,92	2.375.450,25	4,15
32.	Kota Salatiga	254.362,19	1.756.790,55	3,57
33.	Kota Semarang	5.142.532,90	3.959.928,09	4,97
34.	Kota Pekalongan	434.639,68	1.663.323,28	3,99
35.	Kota Tegal	359.940,91	1.519.379,11	5,40
Jateng		37.540.838,74	1.302.800,14	3,76

Ket : \*) tanpa migas

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2000.

Pada Tabel 4.3. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor pada tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan pada tahun 1998 laju pertumbuhan PDRB semua sektor menunjukkan nilai negatif dikarenakan pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi. Pada tahun 1999 mulai tampak adanya perbaikan perekonomian, dimana pertumbuhan PDRB semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif kecuali untuk sektor Jasa-jasa yang masih menunjukkan pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2000 untuk sektor Listrik, Gas dan Air Bersih menunjukkan pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 9,66 persen. Pertumbuhan PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih ini dimungkinkan karena sektor ini merupakan kebutuhan pokok dan sangat penting bagi masyarakat Jawa Tengah.

Sektor yang mengalami pertumbuhan PDRB terendah pada tahun 2000 adalah sektor Jasa-Jasa, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 1,27 persen. Walaupun sektor Jasa-jasa ini mengalami pertumbuhan PDRB paling rendah pada tahun 2000, namun menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan cukup besar, dimana pada tahun 1999 masih menunjukkan nilai yang negatif yaitu sebesar minus 0,20 persen. Kenaikan pertumbuhan PDRB pada sektor Jasa-jasa ini dimungkinkan karena adanya kondisi Jasa Pemerintahan Umum yang relatif stabil dan Jasa Pelayanan Swasta mulai bergerak naik sejak dua tahun terakhir.

Pada Tabel 4.4, terlihat bahwa Kabupaten yang mempunyai PDRB Total dan PDRB per kapita terbesar adalah di Kabupaten Kudus dengan nilai PDRB

Total Rp. 3.087.617.870.000,- dengan PDRB per kapita Rp. 4.521.193,33,-. Hal ini cukup beralasan mengingat potensi industri di Kabupaten Kudus cukup besar, khususnya industri rokok. Sedangkan Kabupaten yang mempunyai PDRB Total terkecil adalah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 504.132.770.000,- dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 905.422,25.

Untuk PDRB Total maupun PDRB per kapita Kota yang paling tinggi/terbesar dicapai oleh Kota Semarang yaitu Rp. 5.142.532.900.000,- dengan PDRB per kapita mencapai Rp. 3.959.928,09. PDRB Total Kota terendah dicapai oleh di Kota Magelang sebesar Rp. 317.300.620.000,- dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 2.752.649,15.

Apabila dilihat dari struktur ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 sampai dengan 2000 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.5, ternyata sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah, dimana pada tahun 1996 kontribusinya mencapai sebesar 31,84 persen dan pada tahun 2000 sebesar 30,34 persen.

Sektor-sektor lainnya yang memberikan sumbangan terbesar pada tahun 2000 adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan peranan sebesar 23,53 persen, dan sektor Pertanian memberikan peranan sebesar 20,65 persen. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terkecil atas pembentukan PDRB Jawa Tengah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, yaitu dengan nilai sebesar 1,21 persen. Bila dilihat secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir (tahun

1996 – tahun 2000) ternyata belum menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang berarti, dimana posisi masing-masing sektor masih tetap. Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (persen) dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5  
Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000  
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (persen)

Sektor Ekonomi	1996	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian	20,27	19,05	20,86	20,78	20,64
2. Pertambangan dan Penggalan	1,26	1,36	1,43	1,46	1,44
3. Industri Pengolahan	31,84	31,79	30,76	30,55	30,35
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,83	0,91	1,07	1,14	1,21
5. Bangunan	4,81	4,96	3,82	4,13	4,03
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,58	22,29	22,98	22,91	23,53
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,07	4,10	4,64	4,94	5,01
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,05	5,29	3,95	3,96	3,92
9. Jasa-jasa	10,29	10,25	10,50	10,12	9,87
PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2000.*

#### 4.4. Pengeluaran Pembangunan Sektoral Pemerintah Daerah di Provinsi

##### Jawa Tengah

Pelaksanaan pembangunan daerah di Jawa Tengah tidak sepenuhnya dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah semata, namun peran serta pihak swasta dan masyarakat juga memberikan andil yang cukup besar. Peranan kedua pihak tersebut (swasta dan masyarakat) sangat penting dalam rangka menentukan keberhasilan dan kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah.

Peran pemerintahan dalam meningkatkan PDB/PDRB potensial atau *output* dari suatu negara/daerah dapat dalam bentuk modal seperti dalam pembangunan industri ataupun dapat juga dalam bentuk investasi langsung seperti proyek-proyek sarana dan prasarana yang langsung maupun tidak langsung mendorong perkembangan perekonomian, dimana sektor swasta tidak dapat atau tidak berkeinginan untuk melakukannya (Samuelson, 1994 : 554-559). Dampak positif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan juga diperkuat hasil penelitian Arief Hadiono (2001) yang menyatakan bahwa investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi dana/investasi pembangunan sektoral yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berasal dari berbagai sumber dana. Untuk dana pembangunan provinsi, sumber dana dapat berasal dari APBD Provinsi sendiri maupun dari APBN Sektoral, sedang dana pembangunan kabupaten/kota sumber dana dapat berasal dari APBD Kabupaten/kota sendiri, APBD Provinsi (dalam bentuk Dana Bantuan Daerah Bawahan/2POA dan Ingub), atau berasal dari APBN Sektoral. Dalam penelitian tesis ini akan dibatasi sumber dana sektoral baik APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota untuk belanja pembangunan sektoral. Realisasi dan Persentase Anggaran Sektoral Pembangunan APBD di Provinsi Jawa Tengah (Provinsi dan Kab//Kota) Tahun 2000 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 26 dan 27.

Berdasarkan Lampiran Tabel 27 dapat diketahui bahwa prosentase realisasi anggaran sektoral masing-masing kabupaten/kota terlihat bervariasi

antar sektor pembangunan, hal ini kemungkinan disebabkan bervariasinya kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penentuan pokok permasalahan dan kepentingannya yang hendak dicapai pada daerah masing-masing.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Analisis Angka Pengganda Keluaran (*Output Multiplier*) dan Kesempatan Kerja (*Employment Multiplier*) Sektoral

Hasil perhitungan angka pengganda keluaran (*output multiplier*) dengan menggunakan persamaan (7) dan angka pengganda kesempatan kerja (*employment multiplier*) dengan menggunakan persamaan (8) berdasarkan Tabel *Input-Output* Tahun 2000 Jawa Tengah untuk sektor-sektor ekonomi di Jawa Tengah, disajikan pada Tabel 5.1. Sedangkan untuk pembahasan yang lebih terperinci dan mudah dipahami dalam rangka mengetahui sektor-sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja secara simultan, maka disusun suatu matrik 4 dimensi dengan klasifikasi sebagai berikut : (1) mempunyai angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja yang tinggi; (2) mempunyai angka pengganda keluaran tinggi namun angka pengganda kesempatan kerja rendah; (3) mempunyai angka pengganda kesempatan kerja tinggi namun angka pengganda keluaran rendah dan (4) mempunyai angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja rendah. Klasifikasi tinggi adalah apabila angka kaitan sektoralnya melebihi rata-rata keseluruhan sektor dalam perekonomian (klasifikasi 25 sektor), demikian sebaliknya bahwa klasifikasi rendah adalah apabila angka kaitan sektoralnya kurang dari rata-rata keseluruhan sektor dalam perekonomian (klasifikasi 25 sektor). Matrik 4 dimensi tersebut disajikan pada gambar 5.1. Angka/nilai yang tercantum pada Matrik Gambar 5.1 tersebut



adalah angka/nilai dari Tabel 5.1 yang telah dinormalkan (*normalized*) terlebih dahulu dikarenakan sifat permintaan akhir dari masing-masing sektor adalah saling berbeda satu sama lainnya; dan hasilnya pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1  
Angka Pengganda Keluaran dan Kesempatan Kerja Sektor  
(*Output dan Employment Multiplier*)  
Berdasarkan Tabel Input-Output Jawa Tengah 2000 klasifikasi 25 sektor

SEKTOR		MULTIPLIER	
		OUTPUT	EMPLOYMENT
1		2	3
1	Tanaman Bahan Makanan	1,08	0,00316
2	Tanaman Perkebunan	1,16	0,00132
3	Peternakan dan Hasilnya	1,49	0,00038
4	Kehutanan	1,15	0,00145
5	Perikanan	1,20	0,00075
6	Pertambangan dan Penggalian	1,16	0,00069
7	Industri Migas	1,09	0,00035
8	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,73	0,00051
9	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	1,84	0,00032
10	Barang Kayu dan Hasil Hutan	1,62	0,00065
11	Kertas dan barang cetakan	1,32	0,00027
12	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	1,52	0,00047
13	Semen dan Barang Lain bukan logam	1,46	0,00035
14	Logam dasar, besi dan baja	1,67	0,00037
15	Alat angk. Mesin dan Peralatan	1,34	0,00039
16	Barang Lainnya	1,71	0,00040
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,47	0,00050
18	Bangunan	1,54	0,00119
19	Perdagangan Besar dan Eceran	1,26	0,00160
20	Hotel	1,75	0,00054
21	Pengangkutan	1,42	0,00080
22	Komunikasi	1,32	0,00050
23	Keu., Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,16	0,00089
24	Pemerintahan Umum	1,34	0,00152
25	Jasa Umum	1,31	0,00098

Sumber : Lampiran Tabel 21.

Gambar 5.1

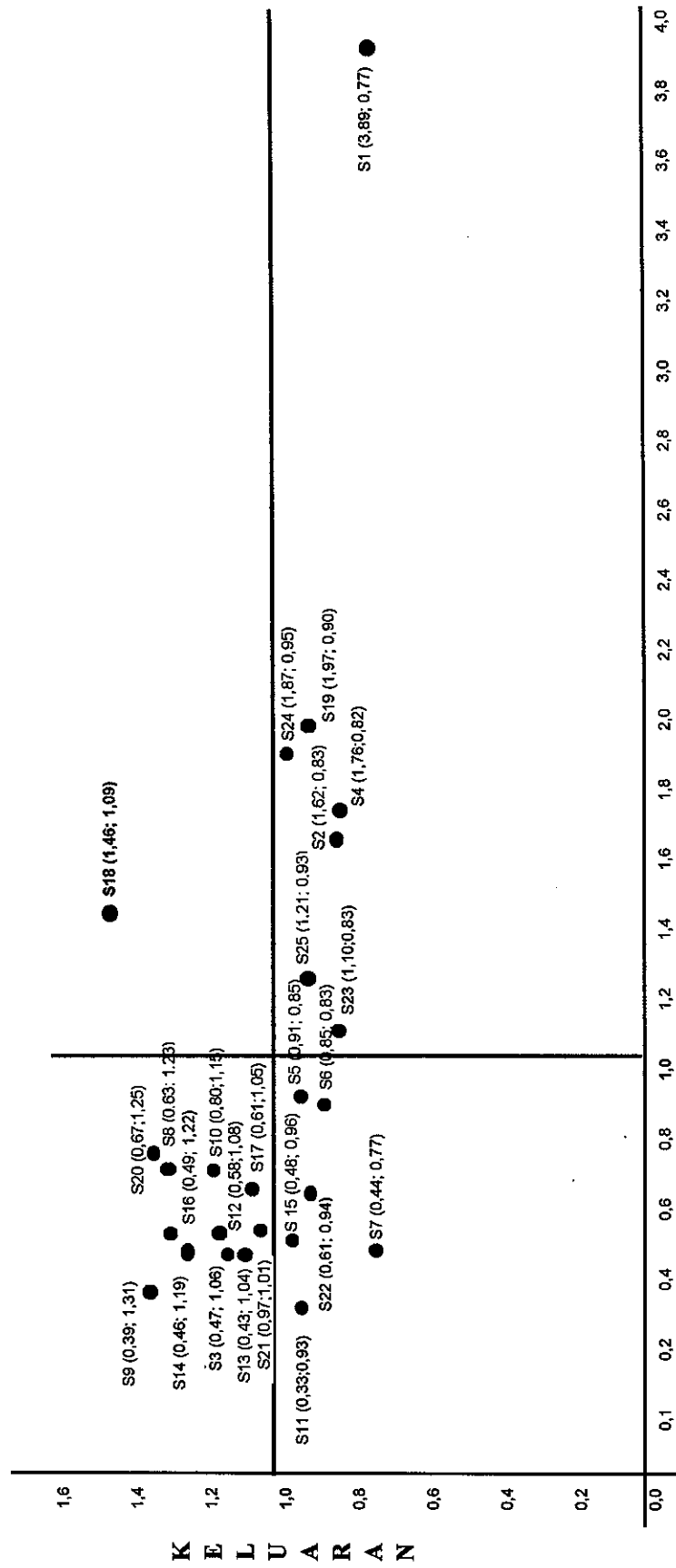
Matrik Sektor Perekonomian Jawa Tengah berdasarkan Indeks Angka Pengganda Keluaran dan Indeks Angka Pengganda Kesempatan Kerja

		ANGKA PENGGANDA KELUARAN	
		RENDAH	TINGGI
ANGKA PENGGANDA KESEMPATAN KERJA	TINGGI	Tanaman Bahan Makanan (sektor 1) Tanaman Perkebunan (sektor 2) Kehutanan (sektor 4) Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 19) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (sektor 23) Pemerintahan Umum (sektor 24) Jasa Umum (sektor 25)	Bangunan (sektor 18)
	RENDAH	Perikanan (sektor 5) Pertambangan dan Penggalian (sektor 6) Industri migas (sektor 7) Kertas dan barang cetakan (sektor 11) Alat angkutan, mesin dan peralatan (sektor 15) Komunikasi (sektor 22)	Peternakan dan Hasilnya (sektor 3) Makanan, minuman dan tembakau (sektor 8) Tekstil, barang kulit dan alas kaki (sektor 9) Barang kayu dan hasil hutan (sektor 10) Pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor 12) Semen dan barang lain bukan logam (sektor 13) Logam dasar, besi dan baja (sektor 14) Barang lainnya (sektor 16) Listrik, gas dan air bersih (sektor 17) Hotel (sektor 20) Pengangkutan (sektor 21)

Sumber Data : Tabel 5.1 dan 5.2, diolah

Guna mempermudah dalam melihat posisi koordinat angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja masing-masing sektor, maka perlu dibuat mapping koordinat yang dapat dilihat pada Gambar 5.2.

**Gambar 5.2.**  
**Mapping Posisi Koordinat Indeks Angka Pengganda Keluaran/Output dan Angka Pengganda Kesempatan Kerja Masing-masing Sektor Lapangan Usaha (25 Sektor)**



**KESEMPATAN KERJA**

Tabel 5.2  
 Indeks Angka Pengganda Keluaran dan Kesempatan Kerja Sektoral  
 (*Output dan Employment Multiplier*)  
 Berdasarkan Tabel *Input-Output* Jawa Tengah 2000 klasifikasi 25 sektor

SEKTOR		INDEKS MULTIPLIER	
		OUTPUT	EMPLOYMENT
1		2	3
1	Tanaman Bahan Makanan	0,77	3,89
2	Tanaman Perkebunan	0,83	1,62
3	Peternakan dan Hasilnya	1,06	0,47
4	Kehutanan	0,82	1,77
5	Perikanan	0,85	0,91
6	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,85
7	Industri Migas	0,77	0,44
8	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,23	0,63
9	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	1,31	0,39
10	Barang Kayu dan Hasil Hutan	1,15	0,80
11	Kertas dan barang cetakan	0,93	0,33
12	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	1,08	0,58
13	Semen dan Barang Lain bukan logam	1,04	0,43
14	Logam dasar, besi dan baja	1,19	0,46
15	Alat angk. Mesin dan Peralatan	0,96	0,48
16	Barang Lainnya	1,22	0,49
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,05	0,61
18	Bangunan	1,09	1,46
19	Perdagangan Besar dan Eceran	0,90	1,97
20	Hotel	1,25	0,67
21	Pengangkutan	1,01	0,97
22	Komunikasi	0,94	0,61
23	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,83	1,10
24	Pemerintahan Umum	0,95	1,87
25	Jasa Umum	0,93	1,21
Jumlah		25	25
Rata-rata		1	1

Sumber : Lampiran Tabel 23

Dari Tabel 5.1, Tabel 5.2, Gambar 5.1 dan Gambar 5.2, dapat ditarik suatu pola keterkaitan sebagai berikut :

1. Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran dan kesempatan kerja tinggi ternyata hanya pada sektor bangunan (sektor 18). Dengan demikian tambahan pengeluaran pemerintah berupa tambahan investasi baik secara langsung (melalui alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD) maupun investasi secara tidak langsung (melalui fungsi dan peran pemerintah) pada sektor bangunan ini akan memberikan tambahan keluaran/output sektoral dan tambahan kesempatan kerja yang optimal.
2. Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran rendah dan angka pengganda kesempatan kerja tinggi adalah : Sektor Tanaman Bahan Makanan (sektor 1); Sektor Pemerintahan Umum (sektor 24); Sektor Jasa Umum (sektor 25); Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 19); Sektor Tanaman Perkebunan (sektor 2); Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (sektor 23); dan Sektor Kehutanan (sektor 4). Angka pengganda kesempatan kerja yang tinggi pada sektor-sektor ini menginterpretasikan bahwa bila prioritas kebijakan pemerintah dalam rangka penyerapan tenaga kerja maka hendaknya pengeluaran pemerintah dapat dialokasikan pada sektor-sektor tersebut. Sedang angka pengganda keluaran rendah mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut sebagian besar merupakan sektor primer dan sektor padat karya.
3. Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran tinggi namun angka pengganda kesempatan kerja rendah adalah : Sektor Tekstil, barang kulit

dan alas kaki (sektor 9); Sektor Hotel (sektor 20); Sektor Makanan, minuman dan tembakau (sektor 8); Sektor Listrik, gas dan air bersih (sektor 17); Sektor Pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor 12); Sektor Barang lainnya (sektor 16); Sektor Peternakan dan Hasilnya (sektor 3); Sektor Logam dasar, besi dan baja (sektor 14); Sektor Semen dan barang lain bukan logam (sektor 13); Sektor Pengangkutan (sektor 21); Sektor Barang kayu dan hasil hutan (sektor 10). Bila kita cermati ternyata bahwa, sebagian besar sektor-sektor ini merupakan sektor sekunder, sehingga peran pemerintahan dalam mengalokasikan/menginvestasikan anggaran untuk sektor-sektor ini hendaknya lebih berhati-hati, atau diserahkan saja kepada mekanisme pasar/swasta. Rendahnya angka pengganda kesempatan kerja pada mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor yang padat modal, perlu investasi yang cukup besar, sehingga peran pemerintah sedapat mungkin dibatasi hanya sebagai fungsi fasilitator, dinamisator, regulator dan/ atau stabilitator.

4. Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja rendah adalah : Sektor Alat angkutan, mesin dan peralatan (sektor 15); Sektor Komunikasi (sektor 22); Sektor Kertas dan barang cetakan (sektor 11); Sektor Perikanan (sektor 5); Sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor 6); dan Sektor Industri migas (sektor 7). Sektor-sektor ini tidak hanya peka terhadap kenaikan permintaan namun juga tidak dapat diandalkan untuk peningkatan *output*

dan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengeluaran anggaran pemerintah hendaknya dibatasi secukupnya saja dalam rangka menunjang fungsi/peran pemerintah yaitu berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan/atau stabilitator. Rendahnya nilai angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja sektor-sektor di atas mengindikasikan bahwa sektor tersebut masih berupa padat karya, berskala kecil dan dengan teknologi yang belum begitu maju. Atau dapat pula mengindikasikan bahwa keberadaan pusat industri (*holding company*) sektor-sektor tersebut bukan berlokasi di Jawa Tengah, Jawa Tengah hanya sebagai limpahan pemasaran atau hanya sebagai kantor cabang industri sektor-sektor tersebut.

Hasil analisis perhitungan angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja pada analisis penelitian ini dibandingkan dengan hasil analisis penelitian Agus Hasto Y (2001), ternyata memberikan hasil yang sedikit berbeda. Perbedaan ini disebabkan pada penelitian Agus Hasto Y (2001) masih menggunakan Tabel *Input – Output* Jawa Tengah Tahun 1993 dibandingkan dengan hasil penelitian yang sudah menggunakan Tabel *Input – Output* Jawa Tengah Tahun 2000, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan koefisien teknologi pada masing-masing sektor.

Sektor-sektor yang memberikan angka pengganda keluaran di atas rata-rata keseluruhan sektor (di atas 1) dan sektor-sektor yang memberikan angka pengganda kesempatan kerja di bawah rata-rata keseluruhan sektor (kurang dari

1) pada hasil analisis penelitian ini ternyata lebih banyak dibanding hasil analisis penelitian dari Agus Hasto Y (2001) tersebut.

Sektor Peternakan dan Hasilnya; sektor Makanan, minuman dan tembakau, sektor Tekstil, barang kulit dan alas kaki; sektor Barang kayu dan hasil hutan; sektor Semen dan barang lain bukan logam; sektor Logam dasar, besi dan baja,; sektor Listrik, gas dan air bersih; sektor Hotel; dan sektor Pengangkutan adalah sejumlah sektor yang semula pada penelitian Agus Hasto Y (2001) masih mempunyai angka pengganda keluaran rendah, namun pada hasil analisis penelitian ternyata sektor-sektor tersebut telah bergeser menjadi sektor-sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran tinggi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Hasil Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000 (BPS, 2001) yang menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Jawa Tengah dari semula sektor pertanian (sektor primer) ke sektor industri (sektor sekunder), dimana kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun semakin menurun, sedang kontribusi sektor industri dan jasa menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja pada tahun 1999 masih sekitar 43,37%, menjadi 42,34% pada tahun 2000.

#### **5.1.1. Angka Pengganda Keluaran**

Pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang mampu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah adalah sektor-sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran (*output multiplier*) lebih dari



1 (satu) dari rata-rata keseluruhan sektor dalam perekonomian (klasifikasi 25 sektor), yaitu sektor peternakan dan hasilnya (sektor 3); sektor makanan, minuman dan tembakau (sektor 8); sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki (sektor 9); sektor barang kayu dan hasil hutan (sektor 10); sektor pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor 12); sektor semen dan barang lain bukan logam (sektor 13); sektor logam dasar, besi dan baja (sektor 14); sektor barang lainnya (sektor 16); sektor listrik, gas dan air bersih (sektor 17); sektor bangunan (sektor 18); sektor hotel (sektor 20); dan sektor pengangkutan (sektor 21).

Pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa, sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran terbesar dicapai oleh sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki (sektor 9), dengan nilai pengganda keluaran sebesar 1,843285; artinya bahwa jika terdapat tambahan permintaan akhir atas sektor ini sebesar Rp. 1.000.000,-, maka tambahan total *output* yang tercipta dalam perekonomian diharapkan dapat bertambah sebesar Rp. 1.843.285,-. Besarnya nilai pengganda keluaran pada sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki ini mengindikasikan bahwa kebijakan investasi pada sektor ini akan memberikan sumbangan/tambahan keluaran/*output* yang cukup besar bagi perekonomian daerah. Namun dikarenakan sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki membutuhkan investasi yang cukup besar (padat modal/*capital intensive*), maka peran swasta sangatlah diperlukan dalam bentuk investasi langsung. Sedangkan pemerintah dapat berperan dalam investasi tidak langsung melalui fungsi fasilitator, dinamisator, regulator dan atau stabilitator, seperti misalnya adanya kemudahan dan konsistensi perijinan, tata ruang yang jelas, pengenaan pajak

yang kompetitif, sarana prasarana penunjang yang memadai, kondisi keamanan yang kondusif dan undang-undang perburuhan yang konsisten mendukung dunia usaha..

### **5.1.2. Angka Pengganda Kesempatan Kerja**

Pada Tabel 5.1 terlihat ada 8 sektor yang mampu menjadi pendorong dalam menciptakan kesempatan kerja yaitu sektor tanaman bahan makanan (sektor 1); sektor tanaman perkebunan (sektor 2), sektor kehutanan (sektor 4), sektor bangunan (sektor 18), sektor perdagangan besar dan eceran (sektor 19), sektor keuangan persewaan dan jasa (sektor 23), sektor pemerintahan umum (sektor 24), dan sektor jasa umum (sektor 25). Sektor-sektor ini mempunyai angka indeks pengganda kesempatan kerja lebih besar daripada rata-rata nilai angka indeks pengganda kesempatan kerja seluruh sektor perekonomian (klasifikasi 25 sektor).

Bila dilihat dari nilai pengganda kesempatan kerja pada Tabel 5.1, maka sektor yang mempunyai nilai angka pengganda kesempatan kerja terbesar adalah pada sektor tanaman bahan makanan (kode sektor 1) dengan nilai 0,003162; dimana nilai ini memberikan arti bahwa dengan adanya kenaikan permintaan akhir sebesar satu milyar rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dalam perekonomian sebesar 3.162 unit kesempatan kerja. Sumbangan Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Jawa Tengah memang masih terbesar disebabkan struktur tenaga kerja di Jawa Tengah memang masih bertumpu pada Sektor Tanaman Bahan

Makanan, walaupun berkecenderungan mulai menurun, yaitu sekitar 42,34% pada tahun 2000 dari sekitar 43,37% pada tahun 1999 (BPS, 2001).

## 5.2. Analisis Keterkaitan Intersektoral

Keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain dalam suatu perekonomian. Keterkaitan ke belakang merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyumbang *input* kepadanya, sedangkan keterkaitan ke depan merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat keterkaitan antara suatu sektor yang menghasilkan *output* untuk digunakan sebagai *input* bagi sektor-sektor yang lain.

Nilai keterkaitan antar sektor di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pengolahan data Tabel *Input-Output* klasifikasi 25 sektor dengan menggunakan persamaan (9) untuk menghitung keterkaitan ke belakang (*Backward Linkages*) dan persamaan (11) untuk menghitung keterkaitan depan (*Forward Linkages*) disajikan pada Tabel 5.2.

Untuk keperluan perbandingan antar sektor dikarenakan sifat permintaan dari masing-masing sektor tersebut saling berbeda, maka persamaan (9) dan persamaan (11) perlu di normalkan dengan menggunakan persamaan (10) untuk mendapatkan Indeks Keterkaitan Ke Belakang (Indeks Daya Penyebaran/DP) dan persamaan (12) untuk mendapatkan Indeks Keterkaitan Ke Depan (Indeks Derajat Kepekaan/DK). Berdasarkan Tabel 5.2 tersebut dapat disusun suatu matrik 4 dimensi dengan klasifikasi pengelompokkan sebagai berikut : (1)

Kelompok I : sektor-sektor yang indeks keterkaitan ke Depan (Derajat Kepekaan/DK) dan indeks keterkaitan ke Belakang (Daya Penyebaran/DP) relatif tinggi (di atas rata-rata); (2) Kelompok II : sektor-sektor yang mempunyai indeks DK tinggi (di atas rata-rata), tetapi indeks DP-nya rendah (di bawah rata-rata); (3) Kelompok III : sektor-sektor yang mempunyai indeks DP dan indeks DK rendah (di bawah rata-rata) dan (4) Kelompok IV : sektor-sektor yang mempunyai indeks DP tinggi (di atas rata-rata), tetapi indeks DK-nya rendah (di bawah rata-rata). Penentuan klasifikasi berdasarkan kepada indeks keterkaitan antarsektor, yaitu apabila angka keterkaitan sektoralnya melebihi 1 (satu) maka di klasifikasikan tinggi dalam arti sektor tersebut mempunyai angka keterkaitan sektoral melebihi laju perekonomian secara keseluruhan. Apabila angka keterkaitan sektoralnya kurang dari 1 (satu) maka di klasifikasikan rendah dalam arti sektor tersebut mempunyai keterkaitan sektoral lebih rendah dibandingkan dengan laju perekonomian secara keseluruhan. Matrik 4 dimensi tersebut disajikan pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3

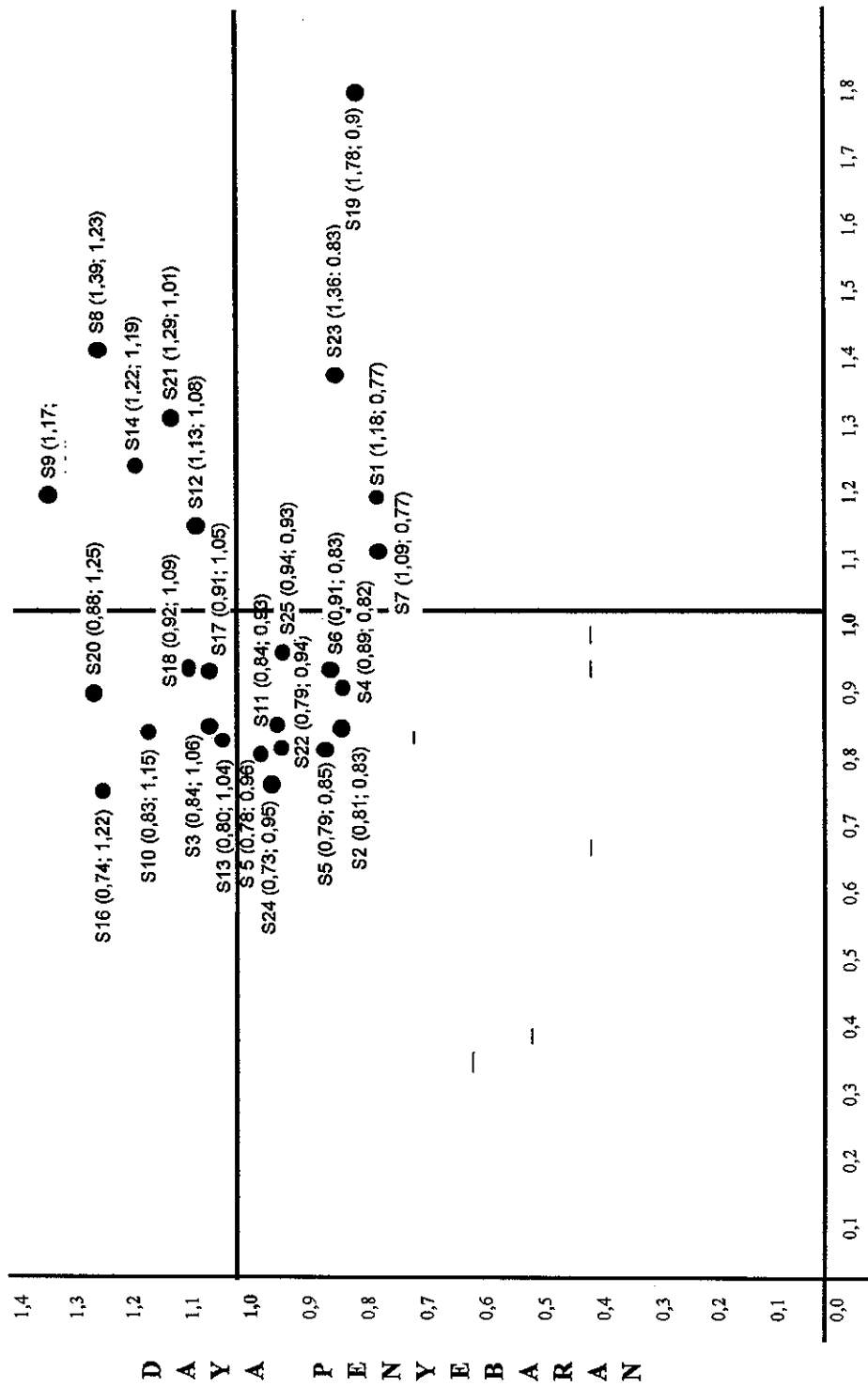
Matrik Indeks Keterkaitan Ke Depan dan Ke Belakang Atas Dasar  
Klasifikasi 25 Sektor Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah

KETERKAITAN KE BELAKANG		KETERKAITAN KE DEPAN	
		RENDAH	TINGGI
	TINGGI	Peternakan dan Hasilnya (sektor 3) Barang kayu dan hasil hutan (sektor 10) Semen dan barang lain bukan logam (sektor 13) Barang lainnya (sektor 16) Listrik, gas dan air bersih (sektor 17) Bangunan (sektor 18) Hotel (sektor 20)	Makanan, minuman dan tembakau (sektor 8) Tekstil, barang kulit dan alas kaki (sektor 9) Pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor 12) Logam dasar, besi dan baja (sektor 14) Pengangkutan (sektor 21)
KETERKAITAN KE BELAKANG	RENDAH	Tanaman Perkebunan (sektor 2) Kehutanan (sektor 4) Perikanan (sektor 5) Pertambangan dan Penggalan (sektor 6) Kertas dan barang cetakan (sektor 11) Alat angkutan, mesin dan peralatan (sektor 15) Komunikasi (sektor 22) Pemerintahan Umum (sektor 24) Jasa Umum (sektor 25)	Tanaman Bahan Makanan (sektor 1) Industri migas (sektor 7) Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 19) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (sektor 23)

Sumber : Lampiran Tabel 9, diolah

Guna mempermudah dalam melihat posisi keterkaitan ke depan dan ke belakang masing-masing sektor, maka perlu dibuat mapping posisi koordinat yang dapat dilihat pada Gambar 5.4.

**Gambar 5.4.**  
**Mapping Posisi Koordinat Indeks Keterkaitan Ke Depan dan Keterkaitan Ke Belakang Masing-masing**  
**Sektor Lapangan Usaha (25 Sektor)**



Dari Gambar 5.3 dan Gambar 5.4, dapat ditarik suatu pola keterkaitan sebagai berikut :

1. Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) dan indeks keterkaitan ke belakang (DP) yang tinggi (Kelompok I), adalah sektor Makanan, minuman dan tembakau (sektor 8); sektor Tekstil, barang kulit dan alas kaki (sektor 9); sektor Pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor 12); sektor Logam dasar, besi dan baja (sektor 14); sektor Pengangkutan (sektor 21). Peningkatan investasi di sektor-sektor ini akan memberikan dampak yang luas, tidak hanya terhadap *input* namun juga terhadap sektor *output*-nya. Tingginya nilai keterkaitan ke belakang menunjukkan tingginya penyebaran dampak dari perubahan sektor tersebut terhadap sektor lainnya, yang berada dalam industri hulu (sektor *input*). Sedangkan *output* dari sektor-sektor ini akan menjadi *input* bagi sektor di industri hilir. Sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang tinggi sering disebut juga dengan sektor kunci/sektor unggulan (*key sector*). Bila dicermati, ternyata semua sektor kunci/sektor unggulan tersebut adalah sektor sekunder dan sektor tersier/jasa yang secara relatif membutuhkan investasi cukup besar, sehingga akan lebih efisien bila dilakukan investasi oleh pihak swasta. Sedangkan peran atau fungsi pemerintah adalah berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, regulator dan/atau stabilisator.

2. Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) tinggi namun indeks keterkaitan ke belakang (DP) rendah (Kelompok II) adalah sektor Tanaman Bahan Makanan (sektor 1); sektor Industri migas (sektor 7); sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 19); sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (sektor 23). Keterkaitan ke belakang rendah menyebabkan sektor-sektor ini peka terhadap perubahan sektor lainnya sebagai akibat perubahan permintaan akhir terhadap masing-masing sektor lainnya tersebut. Sementara itu perubahan permintaan akhir terhadap sektor ini tidak banyak dampaknya terhadap sektor lainnya karena keterkaitan ke belakangnya rendah.
3. Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) dan indeks keterkaitan ke belakang (DP) rendah (Kelompok III) adalah sektor Tanaman Perkebunan (sektor 2); sektor Kehutanan (sektor 4); sektor Perikanan (sektor 5); sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor 6); sektor Kertas dan barang cetakan (sektor 11); sektor Alat angkutan, mesin dan peralatan (sektor 15); sektor Komunikasi (sektor 22); sektor Pemerintahan Umum (sektor 24); sektor Jasa Umum (sektor 25). Sektor-sektor ini tidak dapat diandalkan untuk menumbuhkan sektor-sektor lainnya bila dilakukan penambahan investasi di sektor ini, dikarenakan keterkaitan sektoralnya lebih rendah dari angka rata-rata keseluruhan sektor dalam perekonomian (klasifikasi 25 sektor), yang artinya sektor ini tidak banyak terkait dengan sektor hulu maupun hilirnya.



4. Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke belakang tinggi (DP) namun mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) rendah (Kelompok IV) adalah sektor Peternakan dan Hasilnya (sektor 3); sektor Barang kayu dan hasil hutan (sektor 10); sektor Semen dan barang lain bukan logam (sektor 13); sektor Barang lainnya (sektor 16); sektor Listrik, gas dan air bersih (sektor 17); sektor Bangunan (sektor 18); sektor Hotel (sektor 20). Rendahnya indeks keterkaitan ke depan dikarenakan sektor ini merupakan sektor hilir dalam proses *input-output*, atau *output* sektor ini merupakan konsumsi akhir bagi sektor lainnya. Sedangkan tingginya angka keterkaitan ke belakang merupakan alasan mengapa industri pengolahan perlu dijadikan prioritas dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan dengan tingginya keterkaitan ke belakang adalah juga mengindikasikan tingginya *multiplier output* bagi perekonomian. Investasi di sektor ini akan menumbuhkan sektor hulu, khususnya sektor pertanian.

Sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang tinggi (dinamakan juga sektor unggulan/sektor kunci/*key sector*) dari hasil analisis penelitian ini bila dibandingkan dengan hasil penelitian Agus Hasto Y (2001) ternyata memberikan hasil sedikit berbeda. Hasil analisis penelitian Agus Hasto Y (2001) berdasarkan pada Tabel *Input – Output* Jawa Tengah 1993, didapatkan bahwa sektor kunci di Jawa Tengah pada waktu itu hanya pada sektor sekunder. Namun dari hasil analisis penelitian berdasarkan Tabel *Input – Output* Jawa Tengah 2000 ini sudah mulai tampak adanya sektor tersier (jasa), yaitu pada sektor Pengangkutan (*Lampiran Tabel 16*).

### **5.3. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap *Output* dan Kesempatan Kerja Sektoral**

#### **5.3.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah terhadap *Output* Sektoral**

Pengeluaran pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dalam bentuk anggaran pembangunan sektoral adalah bagian dari permintaan, sehingga timbulnya tambahan permintaan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota akan berdampak positif terhadap tambahan *output* terlepas dari nilai besaran riilnya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Arief Hadiono (2001), yang menyatakan bahwa investasi pemerintah ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Dampak realisasi pengeluaran anggaran pembangunan sektoral pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 terhadap *output* sektoral disajikan pada Lampiran Tabel 35. Pada Lampiran Tabel 35 tersebut tampak bahwa total *output* yang berasal dari realisasi pengeluaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 diharapkan dapat bertambah sebesar Rp. 389.098.738.000,-, dan menghasilkan koefisien pengganda *output* total sebesar 1,28 karena total realisasi pengeluaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 adalah sebesar Rp. 303.276.242.000,-. Nilai koefisien pengganda *output* total sebesar 1,28 mengandung arti bahwa bila terjadi adanya penambahan investasi 1 unit satuan uang, maka diharapkan akan tercipta tambahan *output* sebesar 1,28 kali unit satuan uang pada perekonomian tersebut.

**Efisiensi Kinerja.** Efisiensi kinerja alokasi anggaran sektoral mengandung pengertian perbandingan atas alokasi anggaran sebesar 1 unit satuan terhadap satuan *output* dari masing-masing sektor tersebut yang dinyatakan dalam prosen. Nilai efisiensi kinerja dikatakan memuaskan apabila memberikan nilai di atas 100%, dan sebaliknya efisiensi kinerja dikatakan tidak memuaskan apabila memberikan nilai di bawah 100%.

Pada Lampiran Tabel 40 terlihat bahwa sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan *output* di atas 10% berturut-turut adalah sektor tanaman bahan makanan (14,50%); sektor pengangkutan (13,24%); dan sektor jasa umum (32,21%). Namun bila dilihat dari alokasi anggarannya ternyata ke tiga sektor tersebut memberikan hanya kontribusi yang rendah atau mempunyai efisiensi kinerja alokasi anggaran dibawah 100%. Hal ini dapat dilihat pada sektor tanaman bahan makanan mendapat alokasi anggaran 16,54%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 14,50%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 87,64%; sektor pengangkutan yang mendapat alokasi anggaran sebesar 14,49%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 13,24%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 91,35%; demikian juga untuk sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 39,03%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 32,21% sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 82,53%. Hasil efisiensi kinerja dibawah 100%, mengindikasikan telah terjadi pemborosan (*over budgeting*) pada sektor-sektor tersebut.

Sedang di sektor-sektor lainnya masih ada yang dapat memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, namun alokasi anggarannya relatif masih sedikit, yaitu sektor kehutanan (266,64%); sektor pertambangan dan penggalian (131,05%); sektor makanan, minuman dan tembakau (250,20%); sektor listrik, gas dan air bersih (5.855,34%); sektor bangunan (141,40%); sektor perdagangan besar dan eceran (1.741,20%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (103,41%), sehingga masih dimungkinkan adanya penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut.

### **5.3.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi terhadap Kesempatan Kerja Sektoral**

Jumlah tenaga kerja sektoral hasil Sensus Penduduk tahun 2000 di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 15.748.351 orang dengan tenaga kerja terbesar berada pada sektor pertanian yaitu sebesar 7.574.087 orang (48,09%), dan apabila diperinci berdasarkan sub sektor maka yang terbesar adalah sub sektor tanaman bahan makanan dengan jumlah tenaga kerja 6.738.270 orang (42,48%).

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat pada Lampiran Tabel 36. Pada Lampiran Tabel 36 tersebut ditunjukkan bahwa bila dilihat secara absolut/riil, ada beberapa sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam penciptaan kesempatan kerja (melebihi 10.000 TK), yaitu pada sektor tanaman bahan makanan (163.218 TK/42,01%); sektor pengangkutan (21.189 TK/5,45%); sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan (14.768 TK/3,80%); sektor pemerintahan umum (46.518 TK/11.97%) dan sektor jasa umum (97.978 TK/25.22%).

**Efisiensi Kinerja.** Pada Lampiran Tabel 40 dapat dilihat bahwa efisiensi kinerja sektor-sektor tersebut, ternyata hanya ada 2 sektor yang memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman bahan makanan sebesar 254,01%; dan sektor pemerintahan umum sebesar 118,90%. Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, yaitu sektor pengangkutan sebesar 37,65%; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 248,20%; dan sektor jasa umum sebesar 64,62%. Hasil pencapaian efisiensi kinerja sektor dibawah 100% mengindikasikan telah terjadi pemborosan dana (*over budgeting*), sehingga perlu adanya peninjauan terhadap kebijakan pengalokasian anggaran terhadap sektor tersebut.

Berdasarkan kepada alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi, pada Lampiran Tabel 40, terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan (254,01%); sektor tanaman perkebunan (120,52%); sektor kehutanan (341,39%); dan sektor pemerintahan umum (118,90%), sehingga masih dimungkinkan adanya kebijakan penambahan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor tersebut.

Pada Lampiran Tabel 36 juga terlihat bahwa sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan *output* dan kesempatan kerja di atas 100% adalah sektor kehutanan (266,64% dan 341,34%); sektor listrik, gas dan air bersih (5.855,34% dan 2.218,38%); sektor bangunan (141,40% dan

141,02%); dan sektor perdagangan besar dan eceran (1.741,20% dan 1.620,38%). Kebijakan pengalokasian dana dari pemerintah daerah (provinsi) terhadap sektor-sektor ini secara proporsional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah baik ditinjau dari tambahan *output* sektoral (terhadap sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan) maupun penyerapan tenaga kerja (terhadap sektor kehutanan; dan sektor bangunan), berdasarkan hasil perhitungan *output multiplier* dan *employment multiplier* dari penelitian ini.

#### **5.4. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral di Provinsi**

##### **Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota) terhadap**

##### ***Output* dan Kesempatan Kerja Sektoral**

##### **5.4.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral di Provinsi**

##### **Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota) terhadap**

##### ***Output* Sektoral**

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan *output* sektoral disajikan pada Lampiran Tabel 37. Sedangkan pada Lampiran Tabel 41 terlihat bahwa tambahan total *output* yang berasal dari pengeluaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 diharapkan dapat bertambah sebesar Rp. 1.401.837.093.000,-, dan menghasilkan koefisien pengganda *output* total sebesar 1,35 karena total pengeluaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 adalah sebesar Rp. 1.038.121.033.000,-. Nilai koefisien pengganda *output* total sebesar 1,35 mengandung arti bahwa bila

terjadi adanya penambahan investasi 1 unit satuan uang, maka diharapkan akan tercipta penambahan *output* sebesar 1,35 kali unit satuan uang pada perekonomian tersebut.

**Efisiensi Kinerja.** Pada Lampiran Tabel 37 terlihat bahwa sektor-sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan *output* di atas 10% berturut-turut adalah sektor bangunan (11,21%); sektor pengangkutan (19,93%); sektor pemerintahan umum (13,77%); dan sektor jasa umum (20,84%). Namun bila dilihat dari alokasi anggarannya seperti dapat dilihat pada Lampiran Tabel 42, ternyata ke empat sektor tersebut memberikan kontribusi yang rendah atau mempunyai efisiensi kinerja alokasi anggaran dibawah 100%. Hal ini dapat dilihat pada sektor bangunan mendapat alokasi anggaran 13,62%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 11,21%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 82,31%; sektor pengangkutan yang mendapat alokasi anggaran sebesar 23,52%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 19,93%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 84,77%; sektor pemerintahan umum mendapat alokasi anggaran 18,46%, memberikan kontribusi *output* sebesar 13,77%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 74,58%; demikian juga untuk sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 25,18%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 20,84%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 82,77%. Hasil pencapaian efisiensi kinerja sektoral di bawah 100% menunjukkan adanya pemborosan alokasi anggaran atau terjadi *overbudgeting*.

Sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja diatas 100% adalah sektor tanaman perkebunan (100,83%); sektor peternakan dan hasilnya (100,27%); sektor kehutanan (171,34%); sektor pertambangan dan penggalian (260,60%); sektor makanan, minuman dan tembakau (295,77%); sektor listrik, gas dan air bersih (177,10%); sektor perdagangan besar dan eceran (273,20%); dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (132,33%). Tingginya pencapaian efisiensi kinerja mengindikasikan bahwa sebenarnya masih perlu adanya kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut.

#### **5.4.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral di Provinsi**

##### **Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota) terhadap**

##### **Kesempatan Kerja Sektoral**

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat pada Lampiran Tabel 37. Pada Lampiran Tabel 37 tersebut menunjukkan bahwa beberapa sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam penciptaan kesempatan kerja (melebihi 10.000 TK), yaitu pada sektor tanaman bahan makanan (253.850 KK/20,76%); sektor tanaman perkebunan (11.626 KK/0,95%); sektor perikanan (12.651 KK/1,03%); sektor bangunan (156.448 KK/12,79%); sektor perdagangan besar dan eceran (53.625 KK/5,07%); sektor pengangkutan (114.974 KK/9,40%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (37.346 KK/3,05%); sektor pemerintahan umum (290.988 KK/23,80%); dan sektor jasa umum (228.405 KK/18,68%).



**Efisiensi Kinerja.** Pada Lampiran Tabel 41 dapat dilihat bahwa bila dilihat dari efisiensi kinerja ke sembilan sektor-sektor tersebut hanya 5 sektor yang memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman bahan makanan (295,27%); sektor tanaman perkebunan (145,68%); sektor pertambangan dan penggalian (163,98%); sektor perdagangan besar dan eceran (290,98%); dan sektor pemerintahan umum (128,89%). Sedangkan lima sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, yaitu sektor perikanan (64,565%); sektor bangunan (93,95%); sektor pengangkutan (39,98%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (61,02%); dan sektor jasa umum (74,18%). Hasil pencapaian efisiensi kinerja sektor dibawah 100% mengindikasikan telah terjadi pemborosan dana (*over budgeting*), sehingga perlu adanya peninjauan terhadap kebijakan pengalokasian anggaran terhadap sektor tersebut.

Berdasarkan kepada alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi, maka pada Lampiran Tabel 41 terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan (295,27%); sektor tanaman perkebunan (145,68%); sektor kehutanan (251,04%); sektor pertambangan dan penggalian (163,98%); sektor perdagangan besar dan eceran (290,98%); dan sektor pemerintahan umum (128,89%); sehingga masih dimungkinkan adanya kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut.

Pada Lampiran Tabel 41 juga terlihat bahwa sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan *output* dan kesempatan kerja di

atas 100% adalah sektor perkebunan (100,83% dan 145,86%); sektor kehutanan (171,34% dan 251,04%); sektor pertambangan dan penggalian (260,60% dan 163,98%); dan sektor perdagangan besar dan eceran (273,20% dan 290,98%). Kebijakan pengalokasian dana dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap sektor-sektor secara proporsional ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah baik ditinjau dari tambahan *output* sektoral (terhadap sektor pertambangan dan penggalian), maupun penyerapan tenaga kerja (terhadap sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor perdagangan besar dan eceran), berdasarkan hasil perhitungan *output multiplier* dan *employment multiplier* dari penelitian ini.

## **5.5. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten**

### **Brebes terhadap *Output* dan Kesempatan Kerja Sektoral**

#### **5.5.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten**

##### **Brebes terhadap *Output* Sektoral**

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan *output* sektoral disajikan pada Lampiran Tabel 38 dan Lampiran Tabel 42. Pada Lampiran Tabel 42 tersebut dapat dilihat bahwa koefisien pengganda *output* total adalah sebesar 1,32. Hal ini dikarenakan dari pengeluaran pembangunan sektoral APBD Kab. Brebes TA. 2000 sebesar Rp. 21.979.276.000,- diharapkan dapat menghasilkan tambahan total *output* sektoral sebesar Rp. 29.115.796.000,-. Nilai koefisien pengganda *output* total sebesar 1,32 mengandung arti bahwa bila terjadi adanya

penambahan investasi 1 unit satuan uang, maka diharapkan akan tercipta penambahan *output* sebesar 1,32 kali unit satuan uang pada perekonomian tersebut.

**Efisiensi Kinerja.** Pada Lampiran Tabel 42 dapat dilihat bahwa sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan *output* di atas 10% berturut-turut adalah sektor pengangkutan (18,44%); sektor keuangan, persewaan dan jasa (12,79%); sektor pemerintahan umum (23,37%); dan sektor jasa umum (18,35%). Namun bila dilihat dari alokasi anggarannya ternyata keempat sektor tersebut tidak satupun yang mempunyai kontribusi tinggi. Hal ini dapat dilihat pada sektor pengangkutan mendapat alokasi anggaran 20,86%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 18,44%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 88,40%; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mendapat alokasi anggaran 13,03%, memberikan kontribusi tambahan *output* 12,79%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 98,12%; sektor pemerintahan umum mendapat alokasi anggaran 30,78%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 23,37%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 86,05%; sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 21,32%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 18,35%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 86,05%. Pencapaian hasil efisiensi kinerja di bawah 100% ini mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (*over budgeting*) pada sektor-sektor tersebut

Sektor-sektor yang memberikan tambahan *output* di bawah 10% namun mempunyai efisiensi kinerja diatas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan

(118,42%); sektor peternakan dan hasilnya (132,48%); sektor makanan, minuman dan tembakau (252,72%); sektor listrik, gas dan air bersih (103,38%); sektor bangunan (180,10%); dan sektor perdagangan besar dan eceran (144,41%). Kebijakan penambahan alokasi dana pada sektor-sektor tersebut masih dapat dimungkinkan, disebabkan prosentase dananya relatif kecil (dibawah 4%).

### **5.5.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten**

#### **Brebes terhadap Kesempatan Kerja Sektoral**

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Brebes TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat pada Lampiran Tabel 42. Pada Lampiran Tabel 42 tersebut ditunjukkan bahwa beberapa sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam tambahan penciptaan kesempatan kerja (melebihi 1.000 TK), yaitu sektor tanaman bahan makanan (2.417 KK/9,90%); sektor perdagangan besar dan eceran (1.533 KK/6,28%); sektor pengangkutan (2.210 KK/9,05%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.499 KK/6,14%); sektor pemerintahan umum (10.258 KK/42,03%) dan sektor jasa umum (4.176 KK/17,11%).

**Efisiensi Kinerja.** Bila dilihat dari efisiensi kinerja ke enam sektor-sektor tersebut, ternyata ada tiga sektor yang memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%; yaitu sektor pengangkutan (43,39%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (47,12%); dan sektor jasa umum (80,25%). Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman

bahan makanan (408,76%); sektor perdagangan besar dan eceran (160,04%); dan sektor pemerintahan umum (136,53%). Pencapaian hasil efisiensi kinerja di bawah 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan dana (*over budgeting*), sedangkan pencapaian hasil efisiensi kinerja di atas 100% mengindikasikan masih perlunya kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor tersebut.

Berdasarkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Brebes TA. 2000 pada Lampiran Tabel 42 terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan (408,76%); sektor perkebunan (142,82%); sektor bangunan (213,91%); sektor perdagangan besar dan eceran (160,04%); dan sektor pemerintahan umum (136,53%). Untuk sektor tanaman bahan makanan, sektor perkebunan, sektor bangunan dan sektor perdagangan besar dan eceran, kebijakan penambahan alokasi anggaran masih dapat dipertimbangkan, dikarenakan prosentase anggarannya masih relatif kecil (di bawah 4%). Sedangkan sektor Pemerintahan Umum mendapatkan prosentase alokasi anggaran sangat besar yaitu sebesar 30,78%, sehingga walaupun efisiensi kinerja kesempatan kerja mencapai di atas 100%, kebijakan untuk penambahan alokasi anggaran adalah tidak perlu karena pencapaian efisiensi kinerja *output* sektoralnya di bawah 100% (hanya mencapai 23,37%).

Pada Lampiran Tabel 42 juga terlihat bahwa sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan *output* dan kesempatan kerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan (118,42% dan 408,76%), sektor bangunan (180,10% dan 213,91%), dan sektor perdagangan besar dan

eceran (144,41% dan 160,04%). Kebijakan pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah terhadap sektor-sektor secara proporsional ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah baik ditinjau dari tambahan *output* sektoral (terhadap sektor bangunan) maupun penyerapan tenaga kerja (terhadap sektor tanaman bahan makanan dan sektor perdagangan besar dan eceran), berdasarkan hasil perhitungan *output multiplier* dan *employment multiplier* dari penelitian ini.

## **5.6. Dampak Realisasi Pembangunan Sektoral Kabupaten Rembang terhadap *Output* dan Kesempatan Kerja Sektoral**

### **5.6.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten Rembang terhadap *Output* Sektoral**

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan *output* sektoral disajikan pada Lampiran Tabel 39. Pada Lampiran Tabel 39 tersebut terlihat bahwa koefisien pengganda *output* total adalah sebesar 1,36. Hal ini dikarenakan dari pengeluaran pembangunan sektoral APBD Kab. Rembang TA. 2000 sebesar Rp. 14.922.167.000,- diharapkan dapat menghasilkan tambahan total *output* sektoral sebesar Rp. 20.331.793.000,-. Nilai koefisien pengganda *output* total sebesar 1,36 mengandung arti bahwa bila terjadi adanya penambahan investasi 1 unit satuan uang, maka diharapkan akan tercipta penambahan *output* sebesar 1,36 kali unit satuan uang pada perekonomian tersebut.

**Efisiensi Kinerja.** Pada Lampiran Tabel 43 dapat dilihat bahwa sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan *output* di atas 10%, adalah sektor bangunan (10,88%); sektor pengangkutan (13,83%); sektor pemerintahan umum (31,81%); dan sektor jasa umum (15,04%). Namun bila dilihat dari alokasi anggarannya ternyata ke empat sektor tersebut tidak satupun yang mempunyai nilai efisiensi kinerja alokasi anggaran di atas 100%, atau dapat dikatakan bahwa ke empat sektor tersebut mempunyai efisiensi kinerja di bawah 100%. Hal ini dapat dilihat pada sektor bangunan yang mendapat alokasi anggaran sebesar 12,86%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 10,88%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 84,58%; sektor pengangkutan mendapat alokasi anggaran sebesar 15,16%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 13,83%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 91,18%; sektor pemerintahan umum mendapat alokasi anggaran sebesar 43,14%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 31,81%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 73,73%; demikian juga untuk sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 17,88%, memberikan kontribusi tambahan *output* sebesar 15,04%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 84,16%. Pencapaian hasil efisiensi kinerja di bawah 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan alokasi anggaran (*over budgeting*) pada sektor-sektor tersebut.

Sektor-sektor yang memberikan tambahan *output* di bawah 10% namun mempunyai efisiensi kinerja diatas 100%, adalah sektor tanaman bahan makanan (116,74%); sektor perkebunan (139,98%); sektor peternakan dan

hasilnya (138,38); sektor pertambangan dan penggalian (3.495,77%); sektor makanan, minuman dan tembakau (205,72%); sektor perdagangan besar dan eceran (224,85%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (181,98%). Kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut masih dapat dipertimbangkan, dikarenakan prosentase anggarannya relatif masih rendah (di bawah 4%).

#### **5.6.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten**

##### **Rembang terhadap Kesempatan Kerja Sektoral**

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Rembang TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat pada Lampiran Tabel 43. Pada Lampiran Tabel 43 tersebut terlihat bahwa ada lima sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam tambahan penciptaan kesempatan kerja (melebihi 1.000 TK), yaitu sektor tanaman bahan makanan (1.858 TK/9,44%); sektor bangunan (2.202 TK/11,21%); sektor pengangkutan (1.157 TK/5,89%); sektor pemerintahan umum (9.750 TK/49,63%); dan sektor jasa umum (2.391 TK/12,17%).

**Efisiensi Kinerja.** Bila dilihat dari efisiensi kinerja ke lima sektor tersebut, hanya dua sektor yang memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman bahan makanan (349,59%); dan sektor pemerintahan umum (115,03%). Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, yaitu sektor bangunan (87,15%); sektor pengangkutan (38,82%); dan sektor jasa umum (68,08%).



Berdasarkan kepada alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Rembang, maka dapat dilihat pada Lampiran Tabel 43 bahwa sektor-sektor yang mempunyai efisiensi kinerja di atas 100%, adalah sektor tanaman bahan makanan (349,59%), sektor tanaman perkebunan (182,58%); sektor pertambangan dan penggalian (1.985,81%); sektor perdagangan besar dan eceran (1216,20%); dan sektor pemerintahan umum (115,03%). Kebijakan penambahan anggaran pada sektor-sektor tersebut masih dapat dipertimbangkan, dikarenakan prosentase alokasi anggarannya masih relatif kecil (di bawah 4%), kecuali untuk sektor pemerintahan umum, prosentase alokasi anggarannya sudah di atas 4%.

Sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan *output* dan kesempatan kerja di atas 100%, adalah sektor tanaman bahan makanan (116,74% dan 349,59%); sektor perkebunan (139,98 dan 182,58); dan sektor perdagangan besar dan eceran (224,85% dan 216,20%). Kebijakan pengalokasian dana dari pemerintah daerah terhadap sektor-sektor tersebut secara proporsional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, berdasarkan hasil perhitungan *output multiplier* dan *employment multiplier* dari penelitian ini.

#### **5.7. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja *Output* dan Kesempatan Kerja**

Investasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengalokasian dana pembangunan sektoral diharapkan dapat memberikan

dampak positif terhadap tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja. Penilaian obyektif tentang dampak ini dapat dihitung melalui efisiensi kinerja sektoral baik untuk tambahan *output* maupun terhadap tambahan tenaga kerja seperti telah dijelaskan pada bagian efisiensi kinerja *output* dan tenaga kerja terdahulu. Namun penilaian ini belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai implikasi kebijakan yang perlu diambil sehubungan adanya investasi/pengalokasian anggaran pembangunan sektoral oleh pemerintah tersebut. Efisiensi kinerja terhadap *output* dan tenaga kerja hanya memberikan gambaran mengenai efisiensi biaya investasi/pengalokasian anggaran sektoral terhadap dampak tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja untuk satu satuan uang yang telah dikeluarkan.

Agar dapat memberikan implikasi kebijakan terhadap efisiensi kinerja sektoral tersebut maka perlu diberikan patokan besaran prosentase anggaran sektoral minimal, yang menurut Bambang PS. Brodjonegoro (2002: 3) adalah sebesar 4 persen dari nilai total pengeluaran pembangunan. Kriteria terhadap implikasi kebijakan meliputi : (1) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi tambahan *output* maupun tambahan kesempatan kerja; (2) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi tambahan *output*, namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja terlalu besar (*overbudgeting*); (3) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi tambahan *output*, namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja terlalu rendah (*underbudgeting*); (3) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi tambahan kesempatan kerja, namun alokasi dana dari sisi tambahan *output* terlalu besar (*overbudgeting*); (4) Alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan

kerja kerja sudah sesuai, namun alokasi dana dari sisi tambahan *output* terlalu rendah (*underbudgeting*); (5) Alokasi dana dari sisi tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja terlalu tinggi (*overbudgeting*); (6) Alokasi dana dari sisi tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja terlalu rendah (*underbudgeting*); (7) Alokasi dana dari sisi tambahan *output* terlalu tinggi (*overbudgeting*), namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja terlalu tinggi (*underbudgeting*); dan (8) Alokasi dana dari sisi tambahan *output* terlalu rendah (*underbudgeting*), namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja terlalu tinggi (*overbudgeting*). Pengertian atau definisi alokasi dana terlalu tinggi (*overbudgeting*) adalah jika prosentase alokasi dana sektor melebihi 4 persen, indeks angka pengganda *output* sektor tersebut di bawah rata-rata perekonomian (kurang dari 1), dan efisiensi kinerjanya di bawah 100 persen. Definisi alokasi dana terlalu rendah (*under budgeting*) adalah jika prosentase alokasi dana sektor kurang dari 4 persen, indeks angka pengganda *output* sektor tersebut melebihi rata-rata perekonomian (lebih besar dari 1), dan efisiensi kinerjanya di atas 100 persen. Sedangkan pengertian alokasi dana sesuai adalah jika prosentase alokasi dana sektor dibanding angka pengganda dan efisiensi kinerjanya proporsional, dalam arti jika indeks angka pengganda di bawah rata-rata perekonomian, alokasi anggaran di bawah 4 persen dan efisiensi kinerja di bawah 100 persen; atau jika indeks angka pengganda di atas rata rata perekonomian, alokasi anggaran di atas 4 persen dan efisiensi kinerja di atas 100 persen.

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil perhitungan dari Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Sektor Tahun Anggaran 2000 Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Rembang, secara detail dapat dilihat pada Tabel 5.9.1; Tabel 5.9.2; Tabel 5.9.3; dan Tabel 5.9.4. Sedangkan rekapitulasinya dapat dilihat pada Tabel 5.9.5

**5.7.1. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektor APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja *Output* dan Kesempatan Kerja**

Pada Tabel 5.9.1 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai angka pengganda di atas rata rata perekonomian (baik untuk angka pengganda *output* maupun tenaga kerja) ternyata tidak ada satu sektorpun yang sesuai alokasi dananya, dilihat dari sisi tambahan *output* maupun dari sisi tambahan kesempatan kerja.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan indeks angka pengganda *output* dan kesempatan kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan 1,459913) dan merupakan sektor kunci/sektor unggulan, walaupun memberikan efisiensi kinerja di atas 100 persen, baik untuk efisiensi kinerja tambahan *output* (141,40%) maupun efisiensi kinerja kesempatan kerja (141,02%), namun alokasi dananya masih sangat kecil (kurang dari 4 persen/1,57%), sehingga memungkinkan adanya kebijakan penambahan investasi/pengalokasian anggaran pemerintah pada sektor ini, baik investasi secara langsung maupun tidak langsung.

Pengalokasian anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada sektor kunc/sektor unggulan (*key sector*), yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, alokasi dana masih perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan (*under budgeting*) dikarenakan walaupun dengan alokasi dana di bawah 4% (1,24%), ternyata mampu memberikan efisiensi kinerja tambahan *output* sebesar 250,20%. Sedangkan untuk sektor Pengangkutan menunjukkan alokasi dana sektor yang terlalu besar (*over budgeting*), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian dana di atas 4% (14,49%), namun hanya memberikan efisiensi kinerja tambahan *output* sebesar 91,35% dan efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja hanya sebesar 37,65% . Pengalokasian anggaran pemerintah terhadap sektor-sektor yang mempunyai dampak *output* sektoral tinggi berdasarkan hasil analisis penelitian, ternyata juga memberikan hasil yang bervariasi, ada yang *over budgeting* ada pula yang *under budgeting*. Untuk itu strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah perlu dilakukan secara integral dan hati-hati, apakah akan mengejar pertumbuhan *output* sektoral tinggi, atau penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya, atau kombinasi antara keduanya; tentunya akan didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai. Implikasi kebijakan untuk sektor-sektor lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.1.

### 5.7.2. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan

#### Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap Efisiensi Kinerja *Output* dan Kesempatan Kerja

Pada Tabel 5.9.2 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai indeks angka pengganda di atas rata rata perekonomian (baik untuk indeks angka pengganda *output* maupun tenaga kerja) ternyata tidak ada satu sektorpun yang sesuai alokasi dananya, dilihat dari sisi tambahan *output* maupun dari sisi tambahan kesempatan kerja.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan indeks angka pengganda *output* dan tenaga kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan 1,459913), dengan alokasi dana di atas 4% (13,62%), namun memberikan efisiensi kinerja di bawah 100 persen, baik untuk efisiensi kinerja tambahan *output* (82,31%) maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja (93,95%), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada sektor bangunan ini terlalu besar (*overbudgeting*).

Pengalokasian anggaran pemerintah pada sektor kunci/sektor unggulan (*key sector*) di Provinsi Jawa Tengah (anggaran Provinsi ditambah anggaran Kabupaten dan Kota), yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, kebijakan penambahan alokasi dana masih perlu dipertimbangkan (*under budgeting*) dikarenakan dengan alokasi dana di bawah 4% (0,74%), ternyata mampu memberikan efisiensi kinerja tambahan *output* sebesar 295,77%. Sedangkan untuk sektor

Pengangkutan menunjukkan alokasi dana sektor yang terlalu besar (*over budgeting*), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian dana di atas 4% (23,52%), namun hanya memberikan efisiensi kinerja sebesar 84,77% untuk tambahan *output* dan 39,98% untuk tambahan kesempatan kerja.

Pengalokasian anggaran pemerintah terhadap sektor-sektor yang mempunyai dampak *output* sektoral tinggi berdasarkan hasil analisis penelitian, ternyata juga memberikan hasil yang bervariasi, ada yang *over budgeting* ada pula yang *under budgeting*. Untuk itu strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah perlu dilakukan secara integral dan hati-hati, apakah akan mengejar pertumbuhan *output* tinggi, atau penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya, atau kombinasi antara keduanya; tentunya akan didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai. Implikasi kebijakan untuk sektor-sektor lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.2.

### **5.7.3. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan**

#### **Sektoral APBD Kab. Brebes TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja**

##### ***Output dan Kesempatan Kerja***

Pada Tabel 5.9.3 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai indeks angka pengganda di atas rata rata perekonomian (baik untuk indeks angka pengganda *output* maupun tenaga kerja) ternyata tidak ada satu sektorpun yang sesuai alokasi dananya, dilihat dari sisi tambahan *output* maupun dari sisi tambahan kesempatan kerja.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan indeks angka pengganda *output* dan tenaga kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan 1,459913), walaupun memberikan efisiensi kinerja di atas 100 persen, baik untuk efisiensi kinerja tambahan *output* (180,10%) maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja (213,91%), namun alokasi dananya masih sangat kecil/under budgeting (kurang dari 4 persen/1,49%), sehingga memungkinkan adanya kebijakan penambahan investasi/pengalokasian dana pemerintah pada sektor ini, baik investasi secara langsung maupun tidak langsung.

Pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD pada sektor kunci (*key sector*) di Kabupaten Brebes, yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, alokasi dana masih perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan (*under budgeting*) dikarenakan dengan alokasi dana di bawah 4% (0,96%), ternyata mampu memberikan efisiensi kinerja tambahan *output* sebesar 257,72%. Sedangkan untuk sektor Pengangkutan menunjukkan alokasi dana sektor yang terlalu besar (*over budgeting*), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian dana di atas 4% (20,86%), namun hanya memberikan efisiensi kinerja sebesar 88,40% untuk tambahan *output* dan 43,39% untuk tambahan kesempatan kerja.

Pengalokasian anggaran pembangunan terhadap sektor Pemerintahan Umum memperlihatkan prosentase yang sangat besar dan cenderung dominan dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu mencapai 30,78%. Tingginya prosentase alokasi anggaran pada sektor tersebut mengindikasikan bahwa strategi



kebijakan alokasi anggaran yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan hasil analisis penelitian terutama terhadap tambahan *output* sektoral, hal ini dikarenakan untuk sektor Pemerintahan Umum hanya menghasilkan indeks angka pengganda *output* relatif rendah (di bawah rata-rata perekonomian). Rendahnya angka pengganda *output* pada sektor Pemerintahan Umum ini dapat mengindikasikan relatif masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Selain itu pula sektor pemerintahan umum sudah mendapat alokasi anggaran pada alokasi anggaran rutin, sehingga pengalokasian anggaran pada anggaran pembangunan dapat diperkecil. Implikasi kebijakan untuk sektor-sektor lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.3.

#### **5.7.4. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kab. Rembang TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja *Output* dan Kesempatan Kerja**

Pada Tabel 5.9.4 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai indeks angka pengganda di atas rata-rata perekonomian (baik untuk indeks angka pengganda *output* maupun kesempatan kerja) ternyata hanya ada satu sektor yang sesuai alokasi dananya, dilihat sisi tambahan kesempatan kerja, yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa. Kriteria sesuai pada sisi tambahan kesempatan kerja untuk sektor ini dikarenakan efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja di bawah 100% (75,76%), alokasi anggaran di bawah 4% (2,51%), sehingga walaupun jika ada penambahan investasi pemerintah pada

sektor ini menjadi lebih dari 4% tetap akan memberikan efisiensi kinerja tenaga kerja di bawah 100%, dalam arti tetap terjadi pemborosan dana (*over budgeting*) bila dilakukan penambahan investasi pemerintah. Untuk itu peran swasta agar lebih dipacu untuk lebih berperan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan angka pengganda *output* dan kesempatan kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan 1,459913), dengan alokasi dana di atas 4% (20,43%), namun memberikan efisiensi kinerja di bawah 100 %, baik untuk efisiensi kinerja tambahan *output* (84,58%) maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja (87,15%), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada sektor bangunan ini terlalu besar (*overbudgeting*).

Pengalokasian anggaran pemerintah pada sektor kunci/sektor unggulan (*key sector*) di Kabupaten Rembang, yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, alokasi anggaran masih perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan (*under budgeting*) dikarenakan dengan alokasi anggaran di bawah 4% (1,36%), ternyata mampu memberikan efisiensi kinerja tambahan *output* sebesar 205,72%. Sedangkan untuk sektor Pengangkutan menunjukkan alokasi anggaran sektor yang terlalu tinggi (*over budgeting*), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian anggaran di atas 4% (15,16%), namun hanya memberikan efisiensi kinerja sebesar 91,18% untuk tambahan *output* dan 38,82% untuk tambahan kesempatan kerja.

Pengalokasian anggaran terhadap sektor Pemerintahan Umum di Kabupaten Rembang memperlihatkan prosentase yang sangat besar dan cenderung dominan dan memperlihatkan prosentase tertinggi dibandingkan terhadap Kabupaten Brebes, yaitu mencapai 43,14%. Tingginya prosentase alokasi anggaran pada sektor tersebut mengindikasikan bahwa strategi kebijakan alokasi anggaran yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan hasil analisis penelitian terutama terhadap tambahan *output* sektoral, hal ini dikarenakan untuk sektor Pemerintahan Umum hanya menghasilkan indeks angka pengganda *output* relatif rendah (di bawah rata-rata perekonomian). Rendahnya angka pengganda *output* pada sektor Pemerintahan Umum ini dapat mengindikasikan relatif masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Selain itu pula sektor pemerintahan umum sudah mendapat alokasi anggaran pada alokasi anggaran rutin, sehingga pengalokasian anggaran pada anggaran pembangunan dapat diperkecil dan dapat dialihkan kepada sektor lainnya. Implikasi kebijakan untuk sektor-sektor lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.4.

Tabel 5.9.1  
Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000

Kode	Nama Sektor	Sektor diatas rata-rata angka penganda		Alokasi Anggaran didas 4%		Alokasi Anggaran dibawah 4%		Efisiensi Kinerja		Implikasi Kebijakan
		OUTPUT	TK	OUTPUT	TK	OUTPUT	TK	OUTPUT	TK	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanaman Bahan Makanan	0.770921	3.894815	16.54	16.54			87.64	254.01	alokasi dr sisi output terlalu besar, dr sisi TK cukup
2	Tanaman Perkebunan	0.828050	1.621004			1.40	1.40	95.47	120.52	alokasi dr sisi TK perlu ditambah, dr sisi Output cukup
3	Peternakan dan Hasilnya	1.060673	0.466060			2.22	2.22	98.26	27.90	alokasi cukup karena ef. di bawah 100% (dr sisi output dan TK)
4	Kebudayaan	0.821836	1.755833			0.03	0.03	266.64	341.34	alokasi perlu ditambah (dr sisi TK dan output)
5	Perikanan									
6	Pertambangan dan Penggalian									
7	Industri Migas									
8	Makanan, Minuman dan Tembaku	1.228536	0.633631			1.24	1.24	250.20	35.14	alokasi dr sisi output perlu ditambah, dr sisi TK cukup
9	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki									
10	Barang Kayu dan Hasil Hutan									
11	Kertas dan barang cetakan									
12	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet									
13	Semen dan Barang Lain bukan logam									
14	Logam dasar, besi dan baja									
15	Alat angk. Mesin dan Peralatan									
16	Barang Lainnya	1.048362	0.610950			0.01	0.01	5,855.34	2,218.38	alokasi perlu ditambah (dr sisi output)
17	Lisrik, Gas dan Air Bersih	1.094955	1.459913	1.57	1.57	1.57	1.57	141.40	141.02	alokasi perlu ditambah (dr sisi output dan TK)
18	Bangunan	0.897169	1.972670			0.15	0.15	1,741.20	1,620.38	alokasi perlu ditambah (dr sisi TK)
19	Perdagangan Besar dan Eceran									
20	Hotel	1.013316	0.974712	14.49	14.49	14.49	14.49	91.35	37.65	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
21	Pengangkutan									
22	Komunikasi	0.826431	1.100653	9.12	9.12			103.41	41.66	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
23	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.953969	1.872990	10.07	10.07			78.73	118.89	alokasi cukup ( dr sisi TK), dr sisi output terlalu besar
24	Pemerintahan Umum	0.931126	1.206167	39.03	39.03			82.53	64.62	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
25	Jasa Umum									

Koefisien penganda output total : 1,28  
Tambahan TK : 388.482

**Keterangan :**

- \* Cetak Merah pada nama sektor menandakan bahwa sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD atau dianggap dibiayai pihak swasta
- \* Cetak Biru adalah sektor yang mempunyai angka penganda output dan kesempatan kerja, serta mempunyai keterkaitan sektoral tinggi (key sector)

Tabel 5.9.2  
Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000

Kode	Nama Sektor	Sektor diatas rata-rata angka penganda				Alokasi Anggaran diatas 4%				Alokasi Anggaran dibawah 4%				Efisiensi Kinerja				Implikasi Kebijakan
		OUTPUT	TK	4	5	OUTPUT	TK	5	6	OUTPUT	TK	6	7	OUTPUT	TK	8	9	
1	Tanaman Bahan Makanan	0.770921	3.894815		7.03		7.03							89.01	295.27	10		alokasi dr sisi output terlalu besar, dr sisi TK cukup
2	Tanaman Perkebunan	0.828050	1.621004							0.65	0.65			100.83	145.68			alokasi dr sisi TK perlu ditambah, dr sisi Output cukup
3	Peternakan dan Hasilnya	1.060673	0.466060							1.23	1.23			100.27	32.59			alokasi cukup (dr sisi output dan TK)
4	Kehutanan	0.821836	1.755833							0.18	0.18			171.34	251.04			alokasi dr sisi TK perlu ditambah, dr sisi Output cukup
5	Perikanan																	
6	Pertambangan dan Penggalian																	
7	Industri Migas																	
8	Makanan, Minuman dan Tembakau	1.228536	0.633631							0.74	0.74			295.77	47.55			alokasi dr sisi output perlu ditambah, dr sisi TK cukup
9	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki																	
10	Barang Kayu dan Hasil Hutan																	
11	Kertas dan barang cetakan																	
12	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet																	
13	Semen dan Barang Lain bukan logam																	
14	Logam dasar, besi dan baja																	
15	Alat angk. Mesin dan Peralatan																	
16	Barang Lainnya																	
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.048362	0.610950							0.45	0.45			177.09	76.79			alokasi dr sisi output perlu ditambah, dr sisi TK cukup
18	Bangunan	1.094955	1.459913		13.62		13.62			13.62	13.62			82.31	93.95			alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
19	Pertdagangan Besar dan Eceran	0.897169	1.972870							1.74	1.74			273.20	290.98			alokasi dr sisi TK perlu ditambah, dr sisi Output cukup
20	Hotel																	
21	Pengangkutan	1.013316	0.974712		23.52		23.52							84.77	39.98			alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
22	Komunikasi																	
23	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.826431	1.100653		5.00		5.00							132.33	61.02			alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
24	Pemerintahan Umum	0.953969	1.872990		18.46		18.46							74.58	128.89			alokasi dr sisi TK cukup, dr sisi output terlalu besar
25	Jasa Umum	0.931126	1.206167		25.18		25.18							82.77	74.18			alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)

Koefisien penganda output total : 1.35  
Tambahan TK : 1.222.888

Keterangan :

- \* Cetak Merah pada nama sektor menandakan bahwa sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD atau dianggap dibiayai pihak swasta
- \* Cetak Biru adalah sektor yang mempunyai angka penganda output dan kesempatan kerja, serta mempunyai keterkaitan sektoral tinggi (key sector)

Tabel 5.9.3  
Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Brebes TA. 2000

Kode	Nama Sektor	Sektor diatas rata-rata angka penganda		Alokasi Anggaran didas 4%		Alokasi Anggaran dibawah 4%		Efisiensi Kinerja		Implikasi Kebijakan
		OUTPUT	TK	OUTPUT	TK	OUTPUT	TK	OUTPUT	TK	
1	Tanaman Bahan Makanan	0.770921	3.894815			2.42	2.42	118.42	408.76	alokasi dr sisi TK perlu ditambah, dr sisi Output cukup
2	Tanaman Perkebunan	0.828050	1.621004			0.91	0.91	95.00	142.82	alokasi dr sisi TK perlu ditambah, dr sisi Output cukup
3	Peternakan dan Hasilnya	1.060673	0.466060			0.57	0.57	132.48	44.80	alokasi dr sisi output perlu ditambah, dr sisi TK cukup
4	Kehutanan	0.821836	1.755833			0.00	0.00	0.00	0.00	alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi TK)
5	Perikanan									
6	Pertambangan dan Penggalian									
7	Industri Migas									
8	Makanan, Minuman dan Tembakau	1.228536	0.633631			0.96	0.96	252.72	42.27	alokasi dr sisi output perlu ditambah, dr sisi TK cukup
9	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki									
10	Barang Kayu dan Hasil Hutan									
11	Kertas dan barang cetakan									
12	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet									
13	Semen dan Barang Lain bukan logam									
14	Logam dasar, besi dan baja									
15	Alat angk. Mesin dan Peralatan									
16	Barang Lainnya	1.048362	0.610950			2.38	2.38	103.38	46.64	alokasi dr sisi output perlu ditambah, dr sisi TK cukup
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.094955	1.459913			1.49	1.49	180.10	213.91	alokasi perlu ditambah (dr sisi output dan TK)
18	Bangunan	0.897169	1.972670	1.49	1.49	3.92	3.92	144.41	160.04	alokasi dr sisi TK perlu ditambah
19	Perdagangan Besar dan Eceran									
20	Hotel	1.013316	0.974712	20.86	20.86			88.40	43.39	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
21	Pengangkutan									
22	Komunikasi	0.826431	1.100653	13.03	13.03			98.19	47.12	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
23	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.953969	1.872990	30.78	30.78			75.92	136.53	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
24	Pemerintahan Umum	0.931126	1.206167	21.32	21.32			86.05	80.25	alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
25	Jasa Umum									

Koefisien penganda output total : 1,32 (Rangk. 4)  
 Tambahan TK : 27.420 (Rangk. 1)  
 Realisasi Anggaran Total : Rp 21.979.276.000,- (Rangk. 1)

**Keterangan :**

- \* Cetak Merah pada nama sektor menandakan bahwa sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD atau dianggap dibiayai pihak swasta
- \* Cetak Biru adalah sektor yang mempunyai angka penganda output dan kesempatan kerja, serta mempunyai keterkaitan sektoral tinggi (key sector)

Tabel 5.9.4  
Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Kabupaten Rembang TA. 2000

Kode	Nama Sektor	Sektor diatas rata-rata angka penganda			Alokasi Anggaran dibawah 4%			Efisiensi Kinerja			Implikasi Kebijakan
		OUTPUT	TK	3	OUTPUT	TK	4	OUTPUT	TK	5	
1	Tanaman Bahan Makanan	0.770921	3.894815		2.70	2.70		116.74	349.59		alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi TK)
2	Tanaman Perkebunan	0.828050	1.621004		0.27	0.27		139.98	182.58		alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi TK)
3	Peternakan dan Hasilnya	1.060673	0.466060		0.54	0.54		138.38	40.60		alokasi dr sisi Output dapat ditingkatkan dan dr sisi TK cukup
4	Kehutanan	0.821836	1.755833		0.00	0.00		0.00	0.00		alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi TK)
5	Perikanan										
6	Pertambangan dan Pengalihan										
7	Industri Migas										
8	Makanan, Minuman dan Tembakau	1.228536	0.633631		1.36	1.36		205.72	29.85		alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi output)
9	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki										
10	Barang Kayu dan Hasil Hutan										
11	Kertas dan barang cetakan										
12	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet										
13	Semen dan Barang Lain bukan logam										
14	Logam dasar, besi dan baja										
15	Alat angk. Mesin dan Peralatan										
16	Barang Lainnya										
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.048362	0.610950		0.00	0.00		0.00	0.00		alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi output), dr sisi TK cukup
18	Bangunan	1.094955	1.459913	12.86	12.86	12.86		84.58	87.15		alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
19	Perdagangan Besar dan Eceran	0.897169	1.972670		2.22	2.22		224.85	216.20		alokasi dapat ditingkatkan (dr sisi TK), dr sisi Output cukup
20	Hotel										
21	Pengangkutan	1.013316	0.974712	15.16	15.16			91.18	38.82		alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)
22	Komunikasi										
23	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.826431	1.100653		2.51	2.51		181.98	75.76		alokasi sesuai
24	Pemerintahan Umum	0.953969	1.872990	43.14	43.14			73.73	115.03		alokasi cukup (dr sisi TK), dr sisi output terlalu besar
25	Jasa Umum	0.931126	1.206167	17.88	17.88			84.16	68.08		alokasi terlalu besar (dr sisi output dan TK)

Koefisien penganda output total : 1,36  
 Tambahan TK : 19.647  
 Realisasi Anggaran Sektoral : Rp. 19.932.219.000,-

**Keterangan :**

- \* Cetak Merah pada nama sektor menandakan bahwa sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD atau dianggap dibiayai pihak swasta
- \* Cetak Biru adalah sektor yang mempunyai angka penganda output dan kesempatan kerja, serta mempunyai keterkaitan sektoral tinggi (key sector)

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Hasil perhitungan analisis keterkaitan sektoral, angka pengganda, dampak permintaan akhir dan dampak implikasi kebijakan terhadap penganggaran sektoral pada Provinsi (APBD Provinsi) dan di Provinsi Jawa Tengah (APBD Kab/kota TA. 2000 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sektor-sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan maupun ke belakang tinggi (merupakan sektor kunci/sektor unggulan/*key sector*) di Provinsi Jawa Tengah berturut-turut dari yang mempunyai nilai terbesar adalah sektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas kaki; sektor Logam Dasar, Besi dan Baja; sektor Pengangkutan; sektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet; dan sektor Makanan, Minuman dan Tembakau (*lampiran Tabel 13*). Investasi pada sektor-sektor kunci ini akan memberikan dampak yang luas tidak hanya terhadap sektor *input* tetapi juga sektor *output*-nya. Kebijakan terhadap pengalokasian anggaran pada sektor kunci ini dapat disimpulkan belum konsisten, hal ini nampak dari hasil perhitungan efisiensi kinerja yang masih bervariasi antara *under budgeting* ataupun *over budgeting* (*Tabel 5.9.5*).
2. Sektor-sektor yang mampu menjadi pendorong dalam memacu pertumbuhan ekonomi (*multiplier output*) di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor-sektor industri pengolahan (sektor sekunder), yaitu berturut-turut



dari yang mempunyai nilai terbesar adalah sektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki; sektor Hotel; sektor Makanan, Minuman dan Tembakau; sektor Barang Lainnya; sektor Barang Kayu dan Hasil Hutan; sektor Bangunan; sektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet; sektor Peternakan dan Hasilnya; sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; sektor Semen dan Barang Lain Bukan Logam; dan sektor Pengangkutan (*lampiran Tabel 13*). *Output multiplier* yang tinggi pada sektor ini mengindikasikan bahwa di Jawa Tengah telah terjadi pergeseran sektor, yaitu dari sektor primer ke sektor-sektor sekunder bahkan ke sektor tersier yang tentunya akan dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi terhadap PDRB Jawa Tengah

3. Sektor-sektor yang mampu menjadi pendorong dalam penciptaan kesempatan kerja, adalah sektor Tanaman Bahan Makanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Pemerintahan Umum; sektor Kehutanan; sektor Tanaman Perkebunan; sektor Bangunan; sektor Jasa Umum; dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
4. Sektor yang mampu menjadi pendorong dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja tinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor Bangunan.
5. Tingginya tambahan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan atau diinvestasikan pada sektor-sektor pembangunan APBD ternyata memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan *output* di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah (Provinsi dan

Kabupaten/Kota) terhadap pertumbuhan *output* di Jawa Tengah (*Tabel 5.9.2*), ternyata memberikan nilai *output* yang lebih tinggi dibanding anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah (*Tabel 5.9.1*). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien pengganda *output* total sebesar 1,35 pada pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/kota), dibanding nilai pengganda *output total* hanya sebesar 1,28 pada pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi) untuk tahun anggaran 2000.

6. Hasil analisis perhitungan efisiensi anggaran sektoral menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000 ternyata belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dari perhitungan efisiensi kinerja sektoral, baik terhadap tambahan *output* maupun terhadap penambahan kesempatan kerja ternyata memberikan nilai efisiensi kinerja yang bervariasi, dan berkecenderungan terjadi *Overbudgeting* (*Tabel 5.9.5*), sehingga dikhawatirkan tujuan (*goal*) dari kebijakan pembangunan Jawa Tengah tidak tercapai secara optimal.

## 6.2. Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan analisis *Input-Output* mengenai dampak kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja sektoral, telah dapat memberikan informasi cukup berarti terutama dalam

Tabel 5.9.5  
Rekapitulasi Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD TA. 2000

NAMA SEKTOR	Implikasi Kebijakan Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral dilihat dari Efisiensi Kinerja (sektor di atas rata-rata perekonomian)									
	Prov. Jateng					Kab. Brebes				
	Output	TK	3	4	5	Output	TK	6	7	TK
1 Tanaman Bahan Makanan	over	cukup	cukup	over	cukup	cukup	under	cukup	under	under
2 Tanaman Perkebunan	cukup	under	under	cukup	under	cukup	under	cukup	under	under
3 Peternakan dan Hasilnya	cukup	cukup	cukup	cukup	cukup	under	under*	under*	cukup	cukup
4 Kehutanan	under	under	under	cukup	under	under*	under*	under*	under*	under*
5 Perikanan										
6 Pertambangan dan Penggalian										
7 Industri Migas										
8 Makanan, Minuman dan Tembaku										
9 Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	under	cukup	cukup	under	cukup	under	cukup	under	cukup	cukup
10 Barang Kayu dan Hasil Hutan										
11 Kertas dan barang cetakan										
12 Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet										
13 Semen dan Barang Lain bukan logam										
14 Logam dasar, besi dan baja										
15 Alat angk. Mesin dan Peralatan										
16 Barang Lainnya										
17 Listrik, Gas dan Air Bersih	under	cukup	cukup	under	cukup	under	cukup	under	cukup	under*
18 Bangunan	under	under	under	over	over	under	under	over	under	over
19 Perdagangan Besar dan Eceran	cukup	under	under	cukup	under	cukup	under	cukup	under	under
20 Hotel										
21 Pengangkutan	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over
22 Komunikasi										
23 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	over	over	over	over	over	over	over	sesuai	sesuai	sesuai
24 Pemerintahan Umum	over	over	cukup	over	cukup	over	over	over	over	over
25 Jasa Umum	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over

Keterangan :

- a. Over : bila angka penganda sektor di bawah 1, prosentase anggaran di atas 4%, efisiensi kinerja di bawah 100%.
- b. Under : bila angka penganda sektor di atas 1, prosentase anggaran di bawah 4%, efisiensi kinerja di atas 100%.
- c. Cukup : bila angka penganda sektor di bawah 1, prosentase anggaran di bawah 4%, efisiensi kinerja di bawah/ di atas 100%.
- d. Sesuai : bila angka penganda sektor di atas 1, prosentase anggaran di atas 4%, mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% atau bila angka penganda sektor di atas 1, prosentase anggaran di bawah 4%, efisiensi kinerja di bawah 100%
- e. Tanda \* : sektor tersebut tidak mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD
- f. Cetak Merah pada nama sektor menandakan bahwa sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD atau dianggap telah dibiayai pihak swasta
- g. Cetak Biru pada nama sektor adalah sektor yang mempunyai angka penganda output dan kesempatan kerja, serta mempunyai keterkaitan sektoral tinggi (key sector)

mengkaji peranan permintaan akhir (pengeluaran pemerintah dalam bentuk realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD) dalam mendorong pertambahan *output* sektoral dan kesempatan kerja, memberikan hasil analisis tentang efisiensi kinerja terhadap alokasi dana, serta implikasi kebijakan dalam pengalokasian anggaran sektoral.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pilihan alternatif strategi kebijakan bagi pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), dalam kaitannya di bidang ekonomi. Pemilihan kebijakan terhadap sektor-sektor mana yang dapat dijadikan pendorong pertambahan *output*, penyerapan tenaga kerja, dan sektor kunci/sektor unggulan yang mempunyai keterkaitan ke depan maupun ke belakang tinggi, serta sektor mana yang dapat diharapkan dapat menciptakan kesempatan tinggi, perlu disesuaikan dengan potensi, permasalahan, tujuan (*goal*) yang hendak dicapai, serta tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) secara nyata dan bertanggungjawab.

Dari hasil penelitian ternyata hanya pada sektor Bangunan yang mempunyai klasifikasi tinggi untuk semua jenis kriteria yang dijadikan sebagai alat analisis, yaitu mempunyai angka pengganda *output* dan tenaga kerja tinggi, mempunyai angka keterkaitan sektoral (ke belakang dan ke depan) tinggi, dan mempunyai efisiensi kinerja yang memuaskan (melebihi 100%). Sedangkan terhadap sektor-sektor lainnya tidak ada yang memenuhi klasifikasi untuk semua jenis kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berarti pemerintah

daerah tidak dapat hanya bertumpu pada salah satu sektor (selain sektor Bangunan) untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilihan strategi kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan mutlak dilakukan secara kritis, hati-hati, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara praktis.

Apabila tujuan dan sasaran pemerintah daerah adalah dalam rangka meningkatkan *output*, maka sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki; sektor hotel; sektor makanan, minuman dan tembakau; barang lainnya; sektor logam dasar, besi dan baja; sektor barang kayu dan hasil hutan; sektor bangunan; sektor pupuk, kimia dan barang dari karet; sektor peternakan dan hasilnya; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor semen, dan barang lain bukan logam; dan sektor pengangkutan dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan. Namun yang menjadi kendala adalah ternyata potensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk sektor-sektor industri tersebut, baik lokasi maupun bahan bakunya sedikit sekali yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa Jawa Tengah hanya sebagai tempat transaksi untuk sektor-sektor industri tersebut. Demikian pula bila dari tingkat kewenangan pengelolaan alokasi anggaran, akan lebih efisien bila diserahkan pada pihak swasta atau dunia usaha. Peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada fungsi fasilitator, dinamisator, serta pengaturannya/*regulatory*, kecuali untuk sektor listrik, gas dan air bersih, peran pemerintah dalam hal pengelolaan pengalokasian anggaran masih perlu ditingkatkan dikarenakan berdasarkan perhitungan analisis implikasi kebijakan

terhadap pengalokasian anggaran sektor, ternyata sektor ini masih *Underbudgeting*.

Apabila tujuan dan sasaran pemerintah daerah akan menciptakan lapangan kerja yang tinggi, maka sektor tanaman bahan makanan; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor pemerintahan umum; sektor kehutanan; sektor tanaman perkebunan; sektor bangunan; sektor jasa umum; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dapat dijadikan alternatif pilihan kebijakan. Namun ada beberapa sektor yang investasinya lebih efisien bila dilakukan oleh pihak swasta atau dunia usaha, seperti sektor perdagangan besar dan eceran; sektor bangunan; sektor jasa umum; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Peran Pemerintah daerah hanya sebatas pada fungsi fasilitator dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, dinamisator, serta pengaturannya/*regulatory*. Sedangkan terhadap sektor tanaman bahan makanan; sektor pemerintahan umum; sektor kehutanan; dan sektor tanaman perkebunan, investasi pemerintah dalam bentuk pengalokasian anggaran sektoral masih diperlukan. Khusus untuk sektor pemerintahan umum, implikasi kebijakan pengalokasian anggaran pembangunannya ternyata memberikan nilai 128,89%, yang berarti terjadi *Overbudgeting*, sedangkan di anggaran rutin sektor pemerintahan umum ini telah mendapat alokasi anggaran pula, sehingga akan lebih tepat bila alokasi anggaran sektor pemerintahan umum dibatasi secukupnya/dikurangi dan prosentase alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur diharapkan dapat lebih besar. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa indeks angka pengganda *output*

pada sektor Pemerintahan Umum ini cenderung rendah, dibawah rata-rata perekonomian.

Sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang, serta mempunyai angka pengganda (*output* dan tenaga kerja) tinggi adalah sektor bangunan, sehingga jika strategi pembangunan Jawa Tengah pertumbuhan perekonomian secara total maka sektor bangunan ini dapat menjadi alternatif kebijakan. Namun dikarenakan sektor bangunan ini merupakan sektor sekunder maka akan lebih efisien bila diserahkan kepada pihak swasta atau dunia usaha, sedang fungsi pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator/pengaturan, dan kurang relevan bila apabila mendapat alokasi dana pembangunan secara langsung, seperti terlihat dari hasil perhitungan implikasi kebijakan pengalokasian anggaran sektoralnya ternyata memang terjadi *Overbudgeting*.

### **6.3. Keterbatasan dan Saran**

#### **6.3.1. Keterbatasan**

Penelitian ini menggunakan analisis *Input-Output* berdasarkan pada Tabel *Input-Output* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 dengan klasifikasi 85 x 85 sektor lapangan usaha, dengan data-data pendukung antara lain Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000, Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000. Namun dari data-data tersebut di atas mungkin belum sepenuhnya dapat mewakili/representatif untuk kepentingan penelitian yang lebih sempurna.

Ada beberapa keterbatasan yang belum dapat dihindari dalam penelitian ini, antara lain :

1. Agregasi Tabel *Input-Output* Jawa Tengah 85 x 85 sektor lapangan usaha menjadi 25 x 25 sektor menurut KLUI dan agregasi/diasgregasi 20 sektor pembangunan menjadi 25 sektor menurut KLUI, mungkin saja masih dirasakan belum sepenuhnya representatif, walaupun telah diupayakan secermat mungkin mendekati kriteria sektor lapangan usahanya;
2. Agregasi dan disagregasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah berdasarkan atas sektor pada nomenklatur sektor pembangunan APBD, khususnya APBD di Jawa Tengah, belum mendetail sampai jenis kegiatan sehingga mungkin saja terjadi pengalokasian dana kegiatan yang seharusnya masuk dalam suatu sektor tertentu namun masuk dalam sektor lainnya. Dapat diambil contoh, seperti adanya jenis kegiatan pembangunan laboratorium perikanan pada sektor perikanan, dimana seharusnya masuk dalam sektor bangunan, namun dalam penelitian ini masih masuk dalam sektor perikanan.
3. Kebijakan pengalokasian alokasi pembangunan sektoral pada penelitian ini yang dipakai sebagai instrumen kebijakan permintaan akhir, masih berasal dari realisasi anggaran pembangunan sektoral Provinsi Jawa Tengah dan realisasi anggaran pembangunan sektoral seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, belum memasukkan anggaran Ingub, dan anggaran pembangunan sektoral/departemen yang berasal dari APBN;



4. Juga adanya keterbatasan data sehingga perlu dilakukan proxy/pendekatan, antara lain terhadap :
  - a. Koefisien *input* kabupaten masih digunakan koefisien *input* Provinsi berdasarkan atas Tabel *Input-Output* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 x 85 sektor lapangan usaha yang telah diagregasi dan disagregasi menjadi 25 x 25 sektor lapangan usaha;
  - b. Koefisien tenaga kerja kabupaten masih digunakan data jumlah tenaga kerja sektoral hasil Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000, belum dapat berdasarkan data tenaga kerja sektoral di Kabupaten/kota;

Justifikasi dilakukannya proxy/pendekatan terhadap koefisien *input* dan koefisien tenaga kerja, adalah bahwa secara geografis dan administratif, kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari Provinsi Jawa, sehingga arah dan tujuan pembangunan kabupaten/kota harus selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan regional Jawa Tengah.

#### 6.3.2. Saran

Berdasarkan hasil perhitungan analisis dari penelitian terhadap Dampak Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap tambahan *output* dan tambahan kesempatan kerja sektoral dapatlah diberi saran-saran sebagai berikut :

### A. Saran untuk Praktisi

1. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan sektoralnya hendaknya mempertimbangkan sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi *output* dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Peran pemerintah dalam pengalokasian anggaran pembangunan sektoral, dapat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Arti pengalokasian anggaran pembangunan sektoral secara langsung, yaitu terhadap sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi *output* dan kesempatan kerja tinggi, namun belum dapat/dilakukan oleh pihak swasta/dunia usaha. Sedangkan arti pengalokasian anggaran pembangunan sektoral secara tidak langsung, yaitu bila pihak swasta/dunia usaha telah mampu membiayai sektor-sektor tersebut dalam bentuk investasi langsung, sehingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator berupa penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pihak swasta/dunia usaha tersebut. Pengalokasian anggaran pemerintah tersebut mungkin bukan pada sektor-sektor yang telah dapat dilakukan oleh pihak swasta/dunia usaha, seperti misalnya bila pihak swasta/dunia usaha akan menginvestasikan berupa industri pabrik, maka peran pemerintah dapat berupa penyediaan tata ruang, jalan, dan sarana komunikasi yang layak, penyediaan SDM yang memadai, adanya kepastian hukum usaha dan jaminan keamanan, dan lain sebagainya;

2. Sedapat mungkin pengelompokan sektor lapangan usaha bukan hanya didasarkan nomenklatur sektor APBD, namun sudah lebih detail lagi sampai terhadap jenis kegiatannya, hal ini untuk menghindari kesalahan pemasukan pada digit kegiatan. Misalnya pada sektor Perikanan, ada kegiatan pembuatan Laboratorium Perikanan. Jika pengelompokkan hanya terbatas pada sektor maka kegiatan pembuatan laboratorium tersebut akan masuk pada Sektor Perikanan. Namun bila pengelompokkan sudah pada jenis kegiatan, maka pembuatan laboratorium perikanan akan masuk pada Sektor Bangunan.
3. Perlu adanya data tenaga kerja sektoral menurut sektor lapangan usaha di masing-masing kabupaten/kota. Data tenaga kerja sektoral di Kabupaten dan Kota selama ini belum tersedia secara memadai, bahkan pengelompokkan sektornya pun sering tidak sama/konsisten antar kabupaten/kota sehingga.
4. Adanya “keunikan-keunikan” potensi sumberdaya di tiap-tiap kabupaten/kota dan dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, maka bila tidak berlebihan perlu juga dibuat Tabel *Input-Output* Kab/kota atau Tabel *Input-Output* Sub Regional (*cluster*), walaupun banyaknya sektor lapangan usaha mungkin saja tidak sebesar seperti di sektor lapangan usaha Provinsi, disesuaikan dengan sektor-sektor ekonomi yang dianggap menonjol di daerah.

**B. Saran untuk Akademisi**

Penelitian ini adalah mencoba mengkaji dampak kebijakan alokasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000, khususnya terhadap efisiensi kinerja pengalokasian anggarannya. Kemungkinan besar kajian pada penelitian ini belum pernah dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan masih belum sempurna dan masih perlu lebih dipertajam atau ditingkatkan secara akademis/teoritis oleh kalangan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hasto Y. 2001. Dampak Alokasi Belanja Pembangunan APBD I Jawa Tengah T.A. 1994/1995 –1999/2000 Terhadap Output Sektor. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Arief Hadiono. 2001. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Anonimus. 2000. Pelatihan Aplikasi Program *Input-Output* Dalam Perencanaan dan Penyusunan Model Metode Alokasi Dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Daerah. *Modul*. PAU UGM. Yogyakarta, Mei 2000.
- Bachrawi Sanusi. 2000. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bambang PS. Brodjonegoro. 2002. Mencari Prioritas Pengeluaran Pembangunan Dengan Analisis Dampak Ekonomi (Jakarta Regional Econometrik Input-Output Model/JREIM). *Workshop on Fiscal Decentralization Policy For Sustaining Regional Development in The Decentralizing Era*. Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unibraw bekerja sama dengan LPEM-FEUI, IRIS, USAID, 09-11 April 2002. Klub Bunga Boutique Resort.
- Boediono. 1993. *Mengenai Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi*. Edisi Pertama. BPFE.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Seri Sinopsis No.2. BPFE Yogyakarta. Edisi ke 4. Cetakan ke 19.
- BPS. 1999. *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. Jakarta, Januari 1999.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Jawa Tengah Dalam Angka*. BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2000*. BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Tabel Input-Output Jawa Tengah 2000*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Dwiyama Satyani B. 2001. Aplikasi Model Input-Output Regional Tunggal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah : Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

- Esa Suryaningrum A. 2000. Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Media Ekonomi & Bisnis*. Vol XII No. 1, Juni 2000. Hal. : 8-16
- Faried Wijaya, M. 1999. *Ekonomi Makro*. BPFE. Yogyakarta.
- Guritno Mangkoesobroto. 2000. *Ekonomi Publik*. BPFE Yogyakarta. Edisi ke-3 cetakan ke-9.
- Haryo Kuncoro dan Sri Suharsih. 2001. Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Sektoral. *Kompak Nomor 1*, Januari 2001.
- Hewings, Geoffrey J.D. 1985. *Regional Input-Output Analysis*. SAGE Publications, Beverly Hills, California. First Printing.
- Jalili, A.R. 2000. Exogenous Information and Input Output Updating, and Evaluation. *International Advanced in Economic Research*. Vol. 6, Issue 1.
- Lee, Chong-Ki. 1996. Input-Output Analysis and Income Distribution Patterns of the Tourism Industry in South Korea. *Asia Pasific Journal of Tourism Research*. Vol. 1, Issue 1.
- Lincoln, Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE Yogyakarta. Edisi Pertama.
- Miller, R.E., dan Blair, P.D. 1985. *Input-Output Analysis; Foundations and Extentions*. Prentice-Hall, Inc, Englewood, Cliffs, New Jersey.
- Miera, G. S. 2000. A Hybrid Input-Output Model of Water . *XIII International Conference on Input-Output Techniques*. University of Macerata, Italy 21-25<sup>th</sup>. Page 1 (down load Internet).
- Mudrajad Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Edisi Pertama Cetakan Pertama.
- Nahak. 1998. Dampak Alokasi Belanja Pembangunan APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 1991/1992 – 1995/1996 terhadap output sektoral dalam Kaitan Intersektoral Perekonomian (analisa input-output). *Tesis S2*. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Parkin, M dan Bade. R. 1992. *Macroeconomics*. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Richardson, Harry W. 1972. *Input-Output and Regional Economic*. Kendwood Press Limited. Trowbridge Willshire.
- Sadono Sukirno. 2000. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Samuelson, Paul A., and Nordhaus, William D. 1994. *Ekonomi* (edisi terjemahan ). Edisi ke XII, Jilid 2, Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Sritua Arief. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UI Press. Cetakan Pertama.
- Stahmer, C. 2000. *The Magic Triangle Of I-O Tables. XIII International Conference on Input-Output Techniques*. University of Macerata, Italy 21-25<sup>th</sup>, Macerata, Italy. 21-25 August, 2000 (down load Internet)
- Suahasil Nazara. 1994. Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia. *Prisma*. No. 8, Hal. : 19-36, Agustus 1994.
- Suahasil Nazara. 1997. *Analisis Input – Output*. LP FE UI.
- Supranto. 1980. *Metode Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan*. PT. Gramedia Jakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan – Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat. Edisi Pertama.
- Suseno Triyanto, W. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius. Cetakan Pertama.
- Tambunan, Tulus T.H. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Todaro, M.P. 1997. *Economic Development in the Third World*. Longman Inc. Edisi ke-6. New York.
- West, G.R. *Input-Output Analysis for Practitioners, Version 7.0 User's Guide*. Departement of Economics, Queensland University. 1992.
- Wolff, E.N. 1994. *Productivity Measurement within Input-Output Frame Work. Regional Science and Urban Development*, 24 North Holland.